



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan berpedoman pada rancangan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilewati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 1
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I – 5
1.5 Maksud dan Tujuan	I – 6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II – 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II – 157
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 262
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 23
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2 Prioritas Pembangunan	IV – 7
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga .Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014– Triwulan I 2017(dalam Milyar Rp).....	II – 5
Tabel II. 2	Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya	II – 7
Tabel II. 3	Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 13
Tabel II. 4	Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan.....	II – 14
Tabel II. 5	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Triwulan I Tahun 2017.....	II – 15
Tabel II. 6	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama.....	II – 16
Tabel II. 7	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Triwulan I Tahun 2017	II – 17
Tabel II. 8	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Triwulan I Tahun 2017	II – 18
Tabel II. 9	Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 19
Tabel II. 10	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp).....	II – 21
Tabel II. 11	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp).....	II – 23
Tabel II. 12	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 26
Tabel II. 13	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-Triwulan I 2017 (%)	II – 27
Tabel II. 14	Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2016 – Triwulan I 2017	II – 29

Tabel II. 15 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2014-Triwulan I 2017	II – 31
Tabel II. 16 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 32
Tabel II. 17 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya.....	II – 32
Tabel II. 18 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya.....	II – 33
Tabel II. 19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 34
Tabel II. 20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 35
Tabel II. 21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 36
Tabel II. 22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-LakiTahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 36
Tabel II. 23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 37
Tabel II. 24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 38
Tabel II. 25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 38
Tabel II. 26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 38
Tabel II. 27 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 39
Tabel II. 28 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 40
Tabel II. 29 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota SurabayaTahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 42
Tabel II. 30 Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 42
Tabel II. 31 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota SurabayaTahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 42'

Tabel II. 32 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang)	
Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan I 2017	II – 42
Tabel II. 33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2014	
– Triwulan I 2017	II – 43
Tabel II. 34 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan	
Umur Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 45
Tabel II. 35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 46
Tabel II. 36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut	
Kecamatan Triwulan I Tahun 2017	II – 48
Tabel II. 37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut	
Kecamatan Triwulan I Tahun 2017	II – 49
Tabel II. 38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017	II – 51
Tabel II. 39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 52
Tabel II. 40 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017	II – 53
Tabel II. 41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	
Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 54
Tabel II. 42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	
Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015	II – 55
Tabel II. 43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2014-2016	II – 58
Tabel II. 44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang	
Pendidikan Tahun 2016	II – 59
Tabel II. 45 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan	
Jenjang Pendidikan Tahun 2016	II – 59
Tabel II. 46 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2016	II – 59
Tabel II. 47 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 60
Tabel II. 48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2014 – Triwulan I 2017 ..	II – 60
Tabel II. 49 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 60
Tabel II. 50 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	

Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 61
Tabel II. 51 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 61
Tabel II. 52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 62
Tabel II. 53 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 62
Tabel II. 54 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 63
Tabel II. 55 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 63
Tabel II. 56 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017 ..	II – 64
Tabel II. 57 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017 ...	II – 64
Tabel II. 58 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 66
Tabel II. 59 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 67
Tabel II. 60 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II – 68
Tabel II. 61 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 69
Tabel II. 62 Luas Kawasan Terlayani Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 71
Tabel II. 63 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya	II – 73
Tabel II. 64 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II – 73
Tabel II. 65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 75
Tabel II. 66 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 76
Tabel II. 67 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 76

Tabel II. 68 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 77
Tabel II. 69 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 78
Tabel II. 70 Kejadian Kebakaran per Penyebab.....	II – 78
Tabel II. 71 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 79
Tabel II. 72 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	
Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 80
Tabel II. 73 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017..	II – 81
Tabel II. 74 Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017.....	II – 82
Tabel II. 75 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017.....	II – 83
Tabel II. 76 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 84
Tabel II. 77 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017.....	II – 84
Tabel II. 78 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II – 85
Tabel II. 79 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 86
Tabel II. 80 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 87
Tabel II. 81 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 88
Tabel II. 82 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya	
Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II – 88
Tabel II. 83 KDRT Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 89
Tabel II. 84 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan	
dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017.....	II – 90
Tabel II. 85 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 –	
Triwulan I 2017.....	II – 91

Tabel II. 86 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 91
Tabel II. 87 Pola Pangan Harapan Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 92
Tabel II. 88 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 93
Tabel II. 89 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 93
Tabel II. 90 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 94
Tabel II. 91 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 94
Tabel II. 92 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 95
Tabel II. 93 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 96
Tabel II. 94 Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya	II – 98
Tabel II. 95 Jumlah Upaya Penerapan Konservasi Energi	II – 99
Tabel II. 96 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 100
Tabel II. 97 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 101
Tabel II. 98 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 102
Tabel II. 99 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 102
Tabel II. 100 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 103
Tabel II. 101 Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 105
Tabel II. 102 Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II – 107
Tabel II. 103 Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif ..	II – 108

Tabel II. 104 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 110
Tabel II. 105 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 110
Tabel II. 106 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 111
Tabel II. 107 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya.....	II– 112
Tabel II. 108 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 112
Tabel II. 109 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 113
Tabel II. 110 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 113
Tabel II. 111 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 114
Tabel II. 112 Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 115
Tabel II. 113 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 115
Tabel II. 114 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 116
Tabel II. 115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 117
Tabel II. 116 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 117
Tabel II. 117 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 118
Tabel II. 118 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 119
Tabel II. 119 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 120
Tabel II. 120 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 122

Tabel II. 121 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 123
Tabel II. 122 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 124
Tabel II. 123 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 125
Tabel II. 124 Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 125
Tabel II. 125 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 126
Tabel II. 126 Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 127
Tabel II. 127 Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Tertib Tata Kearsipan dan yang Diakusisi Dokumen Arsip Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 128
Tabel II. 128 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 128
Tabel II. 129 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 129
Tabel II. 130 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 130
Tabel II. 131 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 130
Tabel II. 132 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 131
Tabel II. 133 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 133
Tabel II. 134 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 134
Tabel II. 135 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 134
Tabel II. 136 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.	II– 135

Tabel II. 137 Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 136
Tabel II. 138 Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 136
Tabel II. 139 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 137
Tabel II. 140 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 137
Tabel II. 141 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 138
Tabel II. 142 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 139
Tabel II. 143 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 140
Tabel II. 144 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 140
Tabel II. 145 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	II– 140
Tabel II. 146 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 141
Tabel II. 147 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – Triwulan I 2017.....	II– 141
Tabel II. 148 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 142
Tabel II. 149 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 142
Tabel II. 150 Persentase Mou Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga yang Memberikan Manfaat Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 144
Tabel II. 151 Persentase Mou Kerjasama Luar Negeri Yang Memberikan Manfaat Tahun 2014 – Triwulan I 2017.....	II– 144
Tabel II. 152 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – Triwulan I 2017.....	II– 145

Tabel II. 153 Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 146
Tabel II. 154 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 147
Tabel II. 155 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II–148
Tabel II. 156 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan	II– 148
Tabel II. 157 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 149
Tabel II. 158 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 149
Tabel II. 159 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 150
Tabel II. 160 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 151
Tabel II. 161 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 151
Tabel II. 162 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 152
Tabel II. 163 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 152
Tabel II. 164 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 153
Tabel II. 165 PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 154
Tabel II. 166 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 155
Tabel II. 167 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2011-2016	II– 156
Tabel II. 168 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 156
Tabel II. 169 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017	II– 157

Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)	III – 2
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)	III – 3
Tabel III.3 Peranan Ekonomi PerKategoriTerhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III – 4
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)	III – 6
Tabel III.5 Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)	III – 7
Tabel III.6 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III – 8
Tabel III.7 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2011- 2016	III - 9
Tabel III.8 Ekspor Kota Surabaya Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III – 10
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III – 11
Tabel III.10 Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2010- 2014 dan Perkiraan Tahun 2015-2016	III – 12
Tabel III.11 Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta)	III – 19
Tabel III.12 Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 ADHK (dalam Persen)	III – 20
Tabel III.13 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 (dalam Persen)	III – 21
Tabel III.14 Perkiraan Inflasi Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019	III – 21
Tabel III.15 Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019	III – 22
Tabel III.16 Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 (dalam US\$)	III – 23
Tabel III.17 Perkiraan Tingkat Pengagguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)	III – 23
Tabel III.18 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Tahun 2015-2018	III – 24

xiii

Tabel 4.3. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional	IV – 23
Tabel 4.4. Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018	IV – 38
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018	V – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD	I – 5
Gambar II.1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya	II – 4
Gambar II.2 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya ...	II – 8
Gambar II.3 Peta Sesar Kendeng	II – 10
Gambar II.4 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara ..	II – 11
Gambar II.5 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya	II – 11
Gambar II.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya	II – 12
Gambar II.7 Grafik Penduduk Kota Surabaya Triwulan I Tahun 2017	II – 15
Gambar II.8 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2016	II – 29
Gambar II.9 Persentase Atlet Berprestasi	II – 121
Gambar II.10 Perangkat Smart Water Level	II – 153
Gambar III.1 Grafik Inflasi Kota Surabaya Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)	III – 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Awal RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Rancangan awal RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Rancangan Renja Perangkat Daerah, verifikasi dimaksud dilakukan dengan mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Rancangan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota, Surabaya, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

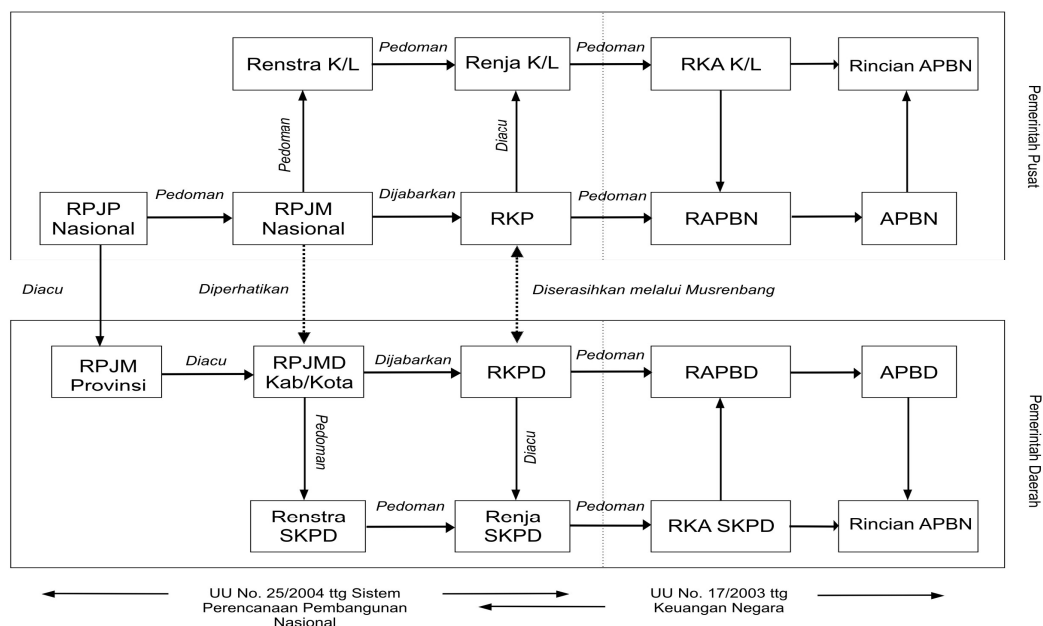
Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Surabaya Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Periode 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD menjadi Renja PD.

Sesuai tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan awal RKPD perlu mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perumusan RKPD meliputi pengolahan data dan informasi, analisis

gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan program prioritas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

VI. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2018 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Renja SKPD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi

peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

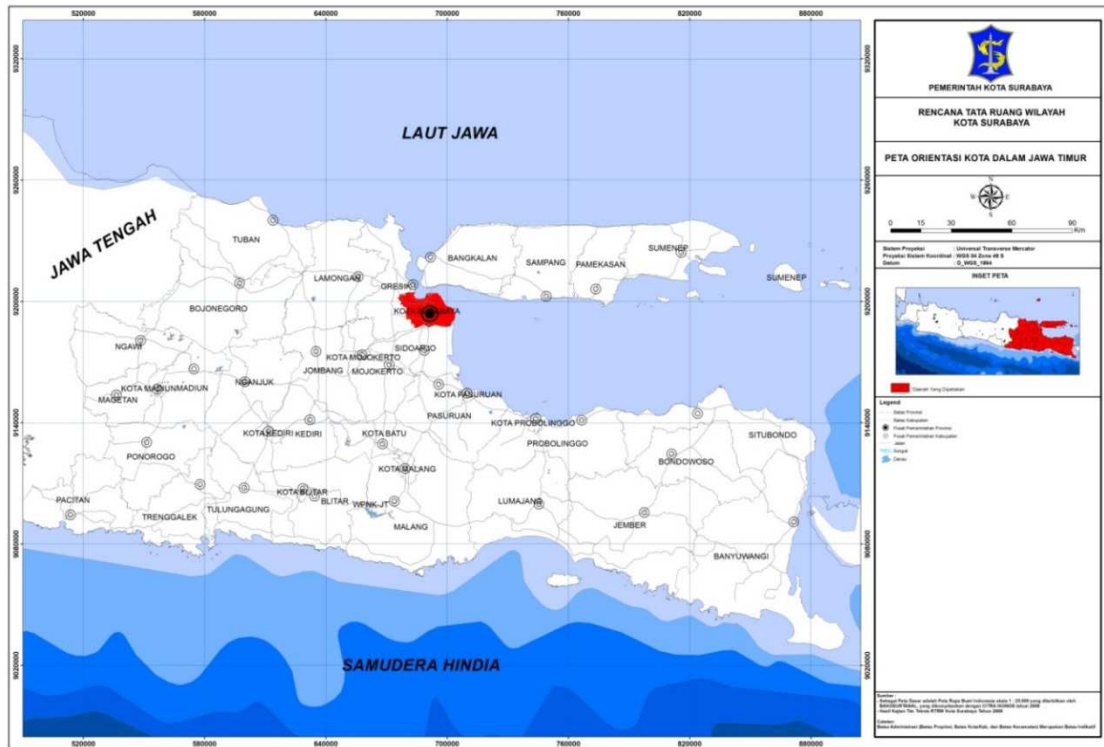
Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun

Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.



Gambar II. 1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota

Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Di samping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional seperti terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Bulak.

Tabel II. 1
PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014–Triwulan I 2017 (dalam Milyar Rp)

KODE	KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	91,12	91,88	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	560,71	584,98	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,59	3,6	N/A	N/A
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,25	5,53	N/A	N/A
F	Konstruksi	471,4	489,79	N/A	N/A
G	Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor	1.190,44	1.240,22	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	138,23	149,77	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.314,09	1.427,79	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	226,29	241,59	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,25	40,36	N/A	N/A
L	Real Estate	176,82	185,79	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	45,15	47,03	N/A	N/A
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	48,81	50,77	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	50,77	53,36	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,86	4,19	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,8	13,25	N/A	N/A

Sumber: PDRB Kecamatan Bulak, 2017

- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II. 2
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	29
2	Krembangan	50
3	Genteng	64
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	21
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	27
8	Bubutan	30
9	Semampir	14
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
Jumlah		273

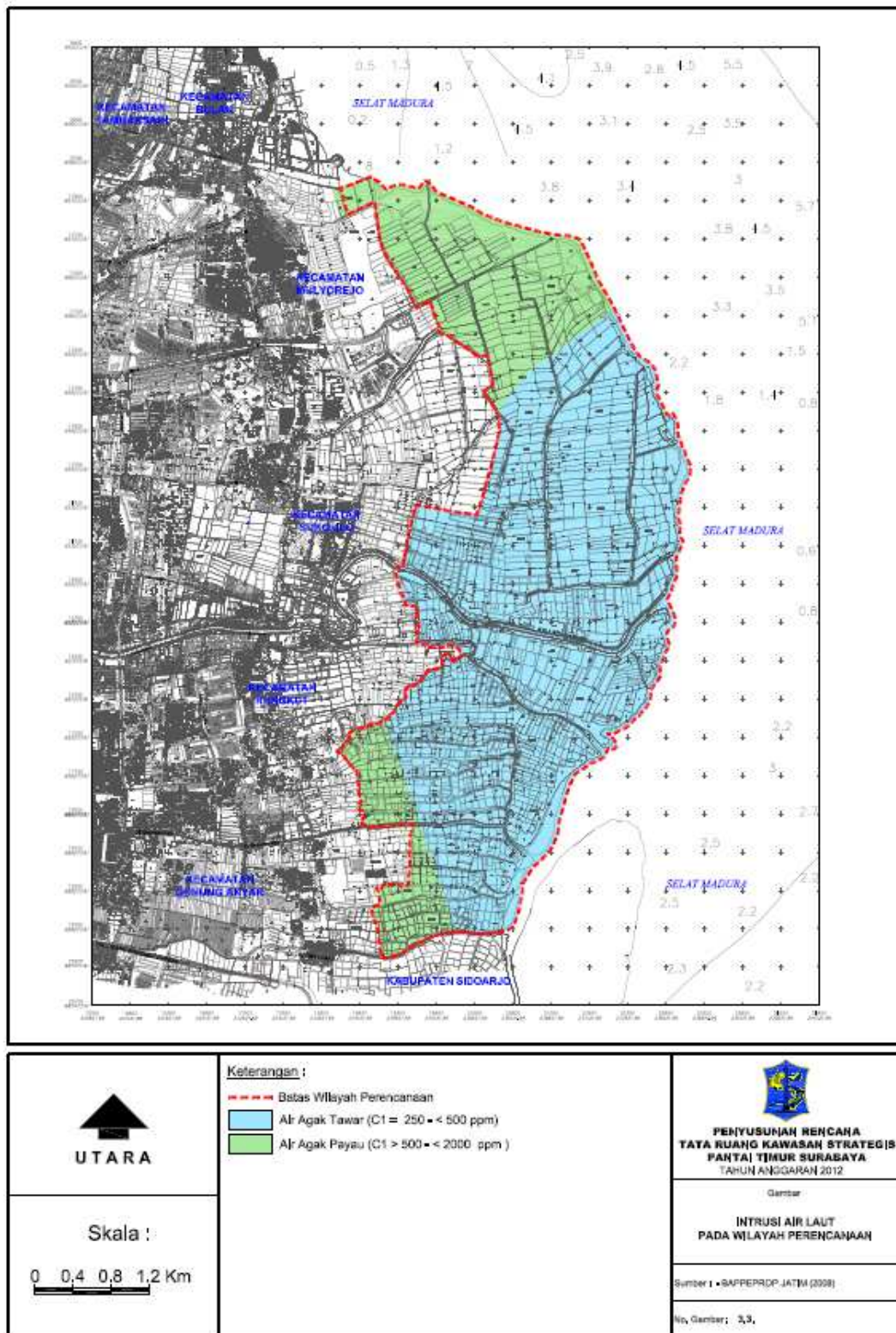
– Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses

abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar II. 2
Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



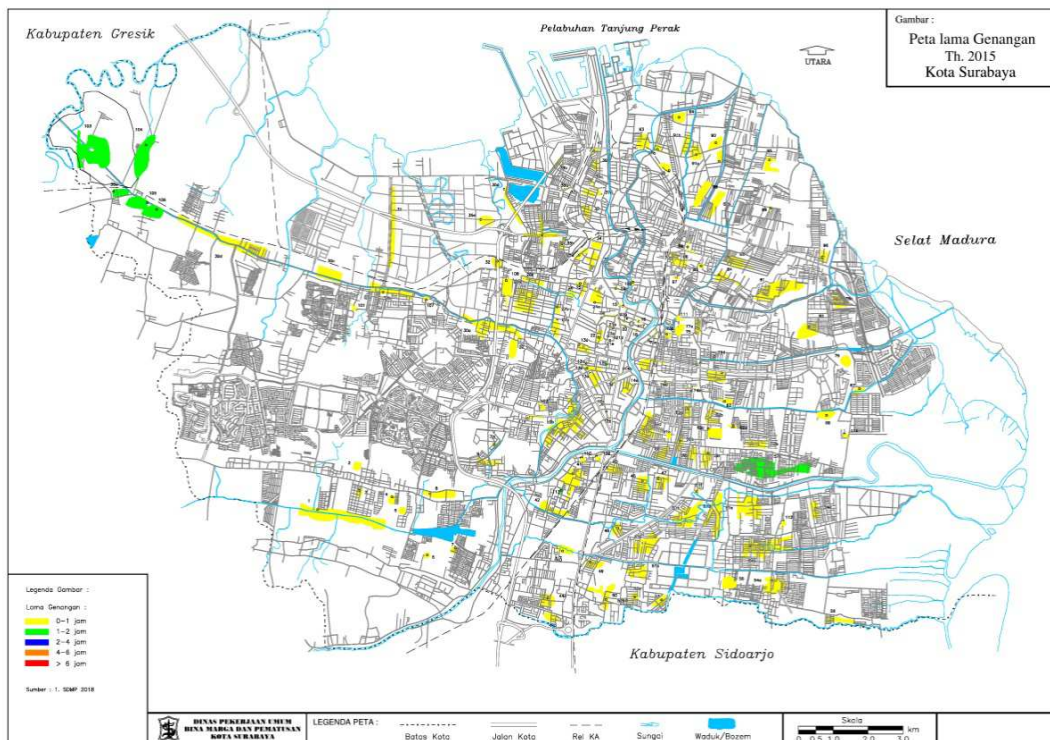
Gambar II. 3
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:

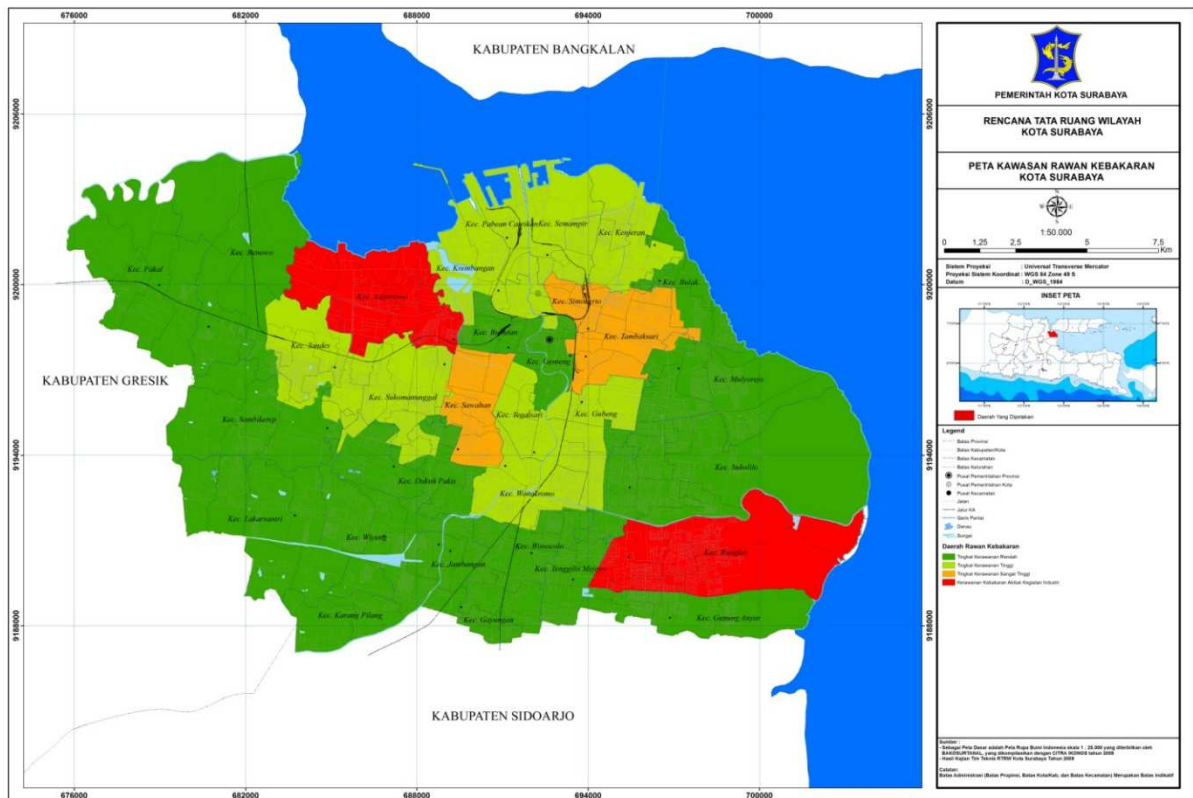


Gambar II. 4
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



Gambar II. 5
Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar II. 6
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Surabaya oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait yang tergabung didalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satgas Satlak PB) Kota Surabaya sesuai

dengan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/104/436.1.2/2014. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir dan puting beliung yang ditangani oleh Satlak dan Satgas Satlak PB di Kota Surabaya.

Tabel II. 3
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Banjir	1	2	10	1
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	11	28	12	6

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2017

2.1.1.3. Kondisi Demografis

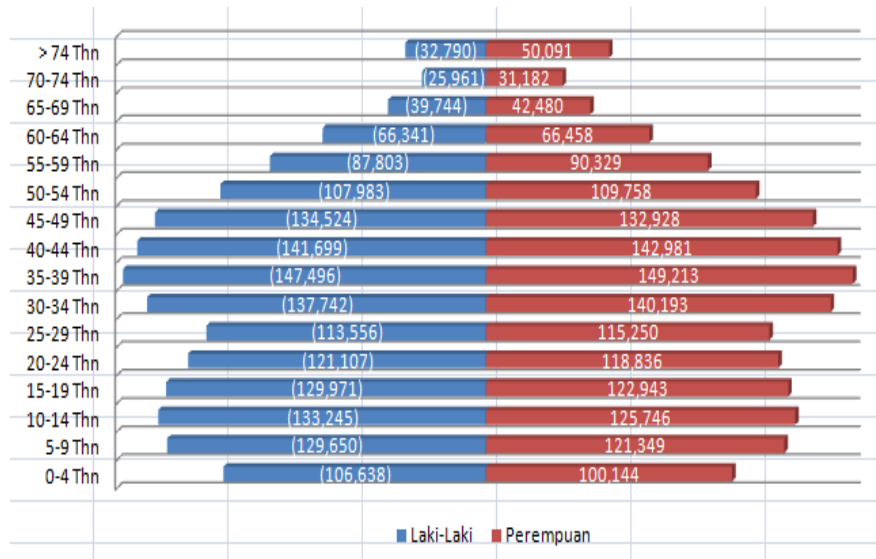
Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per triwulan I Tahun 2017 sebesar 3.316.131 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II. 4. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II. 4 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II. 4
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (per triwulan I 2017)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (per triwulan I 2017)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Karang Pilang	9,23	81.948	8.878	17	Kenjeran	7,77	173.832	22.372
2	Wonocolo	6,77	91.145	13.463	18	Lakarsantri	18,99	61.551	3.241
3	Rungkut	21,08	121.708	5.774	19	Benowo	23,73	65.575	2.763
4	Wonokromo	8,47	190.719	22.517	20	Wiyung	12,46	75.835	6.086
5	Tegalsari	4,29	118.032	27.513	21	Dukuh Pakis	9,94	67.298	6.770
6	Sawahan	6,93	234.157	33.789	22	Gayungan	6,07	52.654	8.674
7	Genteng	4,05	68.162	16.830	23	Jambangan	4,19	55.218	13.179
8	Gubeng	7,99	155.869	19.508	24	Tenggiling Mejoyo	5,52	62.737	11.365
9	Sukolilo	23,68	121.566	5.134	25	Gunung Anyar	9,71	60.709	6.252
10	Tambaksari	8,99	253.522	28.200	26	Mulyorejo	14,21	95.034	6.688
11	Simokerto	2,59	110.974	42.847	27	Sukomanunggal	9,23	111.999	12.134
12	Pabean Cantian	6,8	93.621	13.768	28	Asemrowo	15,44	50.716	3.285
13	Bubutan	3,86	117.630	30.474	29	Bulak	6,72	46.544	6.926
14	Tandes	11,07	101.968	9.211	30	Pakal	22,07	56.887	2.578
15	Krembangan	8,34	136.512	16.368	31	Sambikerep	23,68	66.754	2.819
16	Semampir	8,76	215.255	24.572	JUMLAH		326,81	3.316.131	10.147

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.659.881 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.656.250 jiwa. Dari piramida penduduk seperti Gambar II.7 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.751.455 jiwa atau 52,82 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.002.847 jiwa atau 30,24 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 355.047 atau 10,71 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.7.



Gambar II. 7

Grafik Penduduk Kota Surabaya Triwulan I Tahun 2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan I tahun 2017 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 306.605 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 304.652 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 158.893 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 151.027 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan I tahun 2017 disajikan pada Tabel II. 5 berikut ini.

Tabel II. 5

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Triwulan I Tahun 2017

No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Karang Pilang	7.472	7.342	4.024	3.751
2	Wonocolo	8.111	7.932	4.089	4.130
3	Rungkut	12.086	11.231	5.675	5.675
4	Wonokromo	15.339	16.656	9.201	9.120
5	Tegalsari	9.811	9.967	5.367	5.194
6	Sawahan	20.469	21.118	11.023	10.736
7	Genteng	5.648	5.663	3.080	2.989
8	Gubeng	13.031	13.556	7.098	6.906
9	Sukolilo	11.587	10.995	5.577	5.239
10	Tambak Sari	23.057	22.642	11.941	11.312
11	Simokerto	9.788	9.620	5.096	4.944
12	Pabean Cantian	7.519	8.159	4.309	4.146
13	Bubutan	10.157	10.708	5.631	5.547
14	Tandes	9.927	9.814	4.711	4.401
15	Krembangan	11.917	11.909	6.441	6.176
16	Semampir	20.610	20.807	10.947	10.325
17	Kenjeran	18.509	18.080	9.563	8.872
18	Lakar Santri	6.340	6.196	3.172	2.888
19	Benowo	6.887	6.865	3.486	3.194

No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
20	Wiyung	7.343	6.998	3.765	3.661
21	Dukuh Pakis	6.141	6.021	3.059	2.944
22	Gayungan	4.361	4.370	2.393	2.336
23	Jambangan	5.591	5.149	2.627	2.407
24	Tenggilis Mejoyo	5.850	5.624	2.795	2.711
25	Gunung Anyar	6.176	5.773	2.876	2.823
26	Mulyorejo	8.736	8.427	4.381	4.239
27	Sukomanunggal	10.660	10.235	5.263	4.997
28	Asemrowo	5.099	5.336	2.652	2.452
29	Bulak	4.805	4.773	2.484	2.353
30	Pakal	5.864	5.937	3.100	2.849
31	Sambikerep	6.920	6.426	3.232	2.869
Jumlah		305.811	304.329	159.058	152.186

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II. 5 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 6.

Tabel II. 6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

AGAMA	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1. Islam	84,76%	84,90%	85,04%	85,04%
2. Katholik	4,07%	4,04%	4%	3,98%
3. Kristen	9,29%	9,21%	9,14%	9,16%
4. Hindu	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%
5. Budha	1,57%	1,53%	1,51%	1,52%
6. Konghuchu	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dilihat dari Tabel II. 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,04% sedangkan sebesar 14,96% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha,

Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,07 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 24,44 persen dan di posisi ketiga adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,59 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II. 7.

Tabel II. 7

Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Triwulan I Tahun 2017

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Belum/ Tidak Bekerja	810.565	24,44	51	Presiden	0	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	616.619	18,59	52	Wakil Presiden	0	0,00
3	Pelajar/ Mahasiswa	588.092	17,73	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
4	Pensiunan	27.427	0,83	54	Anggota Kabinet Kementrian	6	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	53.792	1,62	55	Duta Besar	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	16.639	0,50	56	Gubernur	1	0,00
7	Kepolisian Ri (Polri)	6.434	0,19	57	Wakil Gubernur	0	0,00
8	Perdagangan	2.975	0,09	58	Bupati	0	0,00
9	Petani/ Pekebun	2.982	0,09	59	Wakil Bupati	1	0,00
10	Peternak	25	0,00	60	Walikota	1	0,00
11	Nelayan/ Perikanan	1.178	0,04	61	Wakil Walikota	1	0,00
12	Industri	506	0,02	62	Anggota DPRD Prov,	19	0,00
13	Konstruksi	273	0,01	63	Anggota DPRD Kab,	19	0,00
14	Transportasi	263	0,01	64	Dosen	5.674	0,17
15	Karyawan Swasta	930.933	28,07	65	Guru	25.958	0,78
16	Karyawan Bumh	5.251	0,16	66	Pilot	20	0,00
17	Karyawan Bumh	529	0,02	67	Pengacara	203	0,01
18	Karyawan Honorer	1.439	0,04	68	Notaris	172	0,01
19	Buruh Harian Lepas	5.953	0,18	69	Arsitek	112	0,00
20	Buruh Tani/ Perkebunan	369	0,01	70	Akuntan	62	0,00
21	Buruh Nelayan/ Perikanan	109	0,00	71	Konsultan	169	0,01
22	Buruh Peternakan	18	0,00	72	Dokter	6.665	0,20
23	Pembantu Rumah Tangga	832	0,03	73	Bidan	706	0,02
24	Tukang Cukur	37	0,00	74	Perawat	2.771	0,08

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
25	Tukang Listrik	131	0,00	75	Apoteker	333	0,01
26	Tukang Batu	1.471	0,04	76	Psikiater/ Psikolog	48	0,00
27	Tukang Kayu	299	0,01	77	Penyiar Televisi	7	0,00
28	Tukang Sol Sepatu	67	0,00	78	Penyiar Radio	14	0,00
29	Tukang Las/ Pandai Besi	179	0,01	79	Pelaut	345	0,01
30	Tukang Jahit	514	0,02	80	Peneliti	31	0,01
31	Tukang Gigi	7	0,00	81	Sopir	1984	0,06
32	Penata Rias	67	0,00	82	Pialang	9	0,00
33	Penata Busana	23	0,00	83	Paranormal	5	0,28
34	Penata Rambut	63	0,00	84	Pedagang	8.838	0,27
35	Mekanik	409	0,01	85	Perangkat Desa	8	0,00
36	Seniman	143	0,00	86	Kepala Desa	4	0,00
37	Tabib	13	0,00	87	Biarawati	172	0,01
38	Paraji	4	0,00	88	Wiraswasta	178.329	5,38
39	Perancang Busana	14	0,00	89	Pekerjaan Lainnya	5.477	0,17
40	Penterjemah	17	0,00	90	Trading & Industry	60	0,00
41	Imam Masjid	18	0,00	91	Forestry	0	0,00
42	Pendeta	481	0,02	92	Mining & Energy	2	0,00
43	Pastor	30	0,00	93	Public Work	1	0,00
44	Wartawan	218	0,01	94	Farming	0	0,00
45	Ustadz/ Mubaligh	81	0,00	95	Religion	2	0,00
46	Juru Masak	73	0,00	96	Bank & Financial	0	0,00
47	Promotor Acara	3	0,00	97	Health & Society	0	0,00
48	Anggota DPR RI	10	0,00	98	Tourism	0	0,00
49	Anggota DPD	0	0,00	99	Transportation & Communication	1	0,00
50	Anggota BPK	1	0,00	100	Culture & Education	4	0,00
				101	OTHERS	264	0,01
TOTAL						3.316.131	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 8. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 29,39 persen, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 17,40 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SMP sebanyak 13,22 persen.

Tabel II. 8

Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Triwulan I Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	673.821	20,32%

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
2.	Belum Tamat SD	235.640	7,11%
3.	Tamat SD	577.143	17,40%
4.	SMP	438.376	13,22%
5.	SMA	974.585	29,39%
6.	DI/II	26.063	0,79%
7.	DIII	40.917	1,23%
8.	DIV/S1	326.520	9,85%
9.	S2	21.779	0,66%
10.	S3	1.287	0,04%
11.	LAIN-LAIN	-	0,00%
JUMLAH		3.316.131	100,00%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Tabel II. 9.

Tabel II. 9
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
IPM	78,87	79,47	80,38	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, April 2017

2.1.2.1.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of*

National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 10. Selanjutnya dalam Tabel II. 11 dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2016 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sekitar 28,38 persen. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,38 persen, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 14,52 persen.

Tabel II. 10
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.574,14	0,18	746.720,05	0,18	820.350,49	0,18	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	24.336,14	0,01	26.941,93	0,01	29.713,21	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	70.966.879,22	19,42	78.093.618,11	19,23	85.527.271,00	18,91	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.978.907,22	0,54	2.065.169,29	0,51	2.094.419,86	0,46	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,35	0,16	626.533,26	0,15	678.587,67	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	37.891.835,80	10,37	40.707.433,65	10,02	45.133.943,92	9,98	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,35	27,36	111.640.311,30	27,48	124.801.368,44	27,59	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	19.016.375,30	5,20	21.369.674,61	5,26	23.634.681,26	5,22	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,64	14,80	61.613.863,04	15,17	70.922.863,27	15,68	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,27	5,51	22.165.986,69	5,46	24.457.105,38	5,41	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,51	5,28	21.640.835,24	5,33	24.105.835,15	5,33	N/A	N/A

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
L	Real Estate	9.372.176,45	2,57	10.706.034,35	2,64	11.889.141,32	2,63	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,16	2,43	9.852.481,83	2,43	10.926.169,75	2,42	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.071.610,56	1,39	5.602.248,99	1,38	6.221.289,53	1,38	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,73	2,53	10.156.316,47	2,50	11.036.182,83	2,44	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.814.318,82	0,77	3.089.796,00	0,76	3.389.778,02	0,75	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,44	1,47	6.092.795,53	1,50	6.676.541,93	1,48	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		365.354.831,12	100,00	406.196.760,34	100,00	452.345.242,07	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

Tabel II. 11
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	522.314,99	0,17	547.043,18	0,17	570.894,08	0,17	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	18.674,88	0,01	19.418,14	0,01	20.183,42	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	59.951.752,45	19,59	63.458.578,25	19,57	66.657.284,99	19,38	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.569.076,33	0,51	1.518.492,24	0,47	1.508.608,17	0,44	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	474.293,69	0,16	498.808,24	0,15	528.322,40	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	31.368.882,67	10,25	32.314.502,24	9,97	33.887.787,14	9,85	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.711.515,05	28,34	92.054.398,55	28,39	97.586.534,54	28,38	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	14.843.763,22	4,85	15.797.144,72	4,87	16.554.190,88	4,81	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.503.082,56	13,89	45.918.309,15	14,16	49.931.297,69	14,52	N/A	N/A

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
J	Informasi dan Komunikasi	19.701.365,86	6,44	20.958.313,00	6,46	22.421.127,22	6,52	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.851.436,96	4,85	15.964.079,11	4,92	17.184.785,53	5,00	N/A	N/A
L	Real Estate	8.264.384,54	2,70	8.683.388,83	2,68	9.145.630,78	2,66	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	7.011.356,21	2,29	7.388.567,18	2,28	7.761.412,08	2,26	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.994.512,44	1,31	4.172.196,31	1,29	4.384.611,62	1,27	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	7.144.694,86	2,34	7.595.525,11	2,34	8.052.649,03	2,34	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.405.595,14	0,79	2.502.680,04	0,77	2.649.121,77	0,77	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.620.617,78	1,51	4.836.400,63	1,49	5.077.815,13	1,48	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		305.957.319,63	100,00	324.227.844,92	100,00	343.922.256,47	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2014-2016 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut membuat kategori industri pengolahan menjadi kategori lapangan usaha yang dominan kedua dengan kontribusi persen 19 setiap tahunnya terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 14 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama tahun 2014 - triwulan I 2017

pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kota Surabaya tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 12.

Tabel II. 12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,56	4,73	4,38	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	3,20	3,98	3,95	N/A
C	Industri Pengolahan	10,15	5,85	5,04	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,58	-3,22	-0,65	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	5,17	5,88	N/A
F	Konstruksi	6,85	3,01	4,92	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,88	6,16	6,01	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	8,46	6,42	4,78	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,06	8,04	8,71	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	6,38	6,98	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,79	7,49	7,65	N/A
L	Real Estate	6,68	5,07	5,32	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	6,45	5,38	5,04	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	4,45	4,94	N/A
P	Jasa Pendidikan	5,71	6,31	5,89	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,39	4,04	5,86	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,55	4,67	4,97	N/A
PDRB		6,96	5,97	6,07	N/A
PDRB TANPA MIGAS		6,96	5,97	6,07	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebelumnya mengalami perlambatan, namun kondisi ekonomi Kota Surabaya mulai menunjukkan perbaikan dimana pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,07 lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, dan rata-rata lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

Tabel II. 13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014-Triwulan I 2017 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Surabaya	6,96	5,97	6,07	N/A
Jawa Timur	5,86	5,44	5,55	N/A
Nasional	5,02	4,79	5,02	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

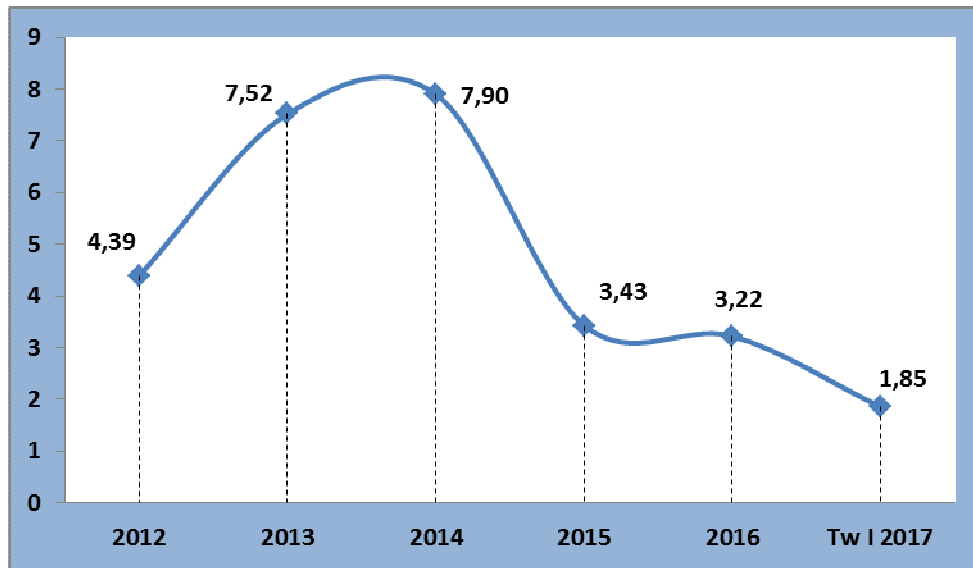
2.1.2.1.4. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus menerus. Inflasi yang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika capaian inflasi kurang dari 10 persen. Selama ini Pemerintah Nasional menetapkan sasaran inflasi sebesar $4\% \pm 1\%$. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak negatif karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat yang berdampak terhadap penurunan produktivitas ekonomi.

Secara histori, perkembangan inflasi kota surabaya dalam kurun waktu 2012-2016 cukup berfluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 inflasi Kota Surabaya sebesar 4,39 persen yang selanjutnya mengalami peningkatan signifikan di tahun 2013 menjadi sebesar 7,52 persen dan meningkat kembali di tahun 2014 mencapai 7,90 persen. Pada tahun 2015 inflasi Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 3,43 persen dan stabil hingga tahun 2016 sebesar 3,22 persen.

Inflasi Kota Surabaya yang tinggi di tahun 2013-2014 utamanya dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok *administered price* khususnya kenaikan harga komoditi bahan bakar minyak (BBM). Sementara pada tahun 2015 dan 2016 inflasi Kota Surabaya lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan, sebaliknya kelompok *administered price* menjadi penahan laju inflasi sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 dan 2016 cukup terkendali meskipun terdapat beberapa komoditi pada kelompok *administered price* yang mengalami kenaikan harga seperti tarif listrik non subsidi dan bea cukai rokok.

Berdasarkan perkembangan harga terkini, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga triwulan I 2017 sebesar 1,85 persen. Berdasarkan kelompok komponen pembentuknya, ketiga kelompok yaitu kelompok inti, kelompok *volatile food* dan kelompok *administered price* memberikan andil terhadap inflasi Kota Surabaya pada triwulan I 2017. Pada kelompok inti dipicu oleh meningkatnya tarif pulsa ponsel dan harga emas perhiasan sementara pada kelompok *administered price* dipicu oleh meningkatnya bahan bakar minyak (BBM), tarif ponsel, kenaikan tarif listrik dan kenaikan biaya perpanjangan stnk. Pada kelompok *volatile food* pada bulan pertama tahun 2017 menjadi pemicu inflasi yang disebabkan karena meningkatnya harga cabai rawit akibat pasokan yang terbatas dipasaran. Namun, pada bulan Maret 2017 kelompok bergejolak menjadi penahan laju inflasi karena pasokan komoditi pertanian melimpah seiring masa panen tiba. Selengkapanya terkait perkembangan inflasi di Kota Surabaya pada tahun 2012- Triwulan I 2017 terangkum dalam grafik berikut.



Gambar II. 9
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II. 14
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2016 – Triwulan I 2017

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2016		Triwulan I 2017	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
BERAS					
- Beras IR.64 Kualitas I	Kg	13,3%	-65,3%	3,1%	137,3%
- Beras IR.64 Kualitas II	Kg	1,2%	175,9%	5,0%	101,0%
- Beras IR.64 Kualitas III	Kg	3,8%	124,8%	3,3%	134,3%
GULA					
- Gula Pasir Lokal Curah	Kg	10,0%	0,4%	5,0%	100,7%
MINYAK GORENG					
- Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	7,0%	59,7%	5,1%	97,5%
DAGING					
- Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	1,7%	165,4%	10,5%	-10,5%

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2016		Triwulan I 2017	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
- Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	2,4%	152,9%	7,9%	41,9%
- Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,3%	174,1%	4,1%	118,9%
- Daging Ayam Broiler	Kg	7,0%	60,4%	7,6%	47,6%
I K A N					
- Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	6,4%	72,7%	5,6%	88,3%
- Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	7,7%	45,2%	6,4%	71,9%
- Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	7,6%	48,8%	5,9%	81,3%
- Ikan Lele Segar (Uk. Sedang)	Kg	1,8%	163,9%	5,2%	96,5%
- Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,1%	117,7%	6,2%	76,6%
- Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	6,1%	77,5%	5,2%	95,4%
TELUR					
- Telur Ayam Broiler	Kg	9,9%	2,4%	6,9%	63,0%
- Telur Ayam Kampung	Butir	4,1%	117,6%	6,2%	76,1%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, 2017, diolah Bappeko, 2017

*) Angka sementara

2.1.2.1.5. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah

kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017.

Tabel II. 15
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2014-Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
PDRB (Milyar Rp)	365.354,83	406.196,76	452.345,23	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	128,03	141,52	156,86	N/A
ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
PDRB (Milyar Rp)	305.957,32	324.227,84	343.914,13	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	107,22	112,96	119,26	N/A
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	2.853.661	2.870.200	2.883.800	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya 2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.6. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat

sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 16
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Gini Ratio	0,39	0,39	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

2.1.2.1.7. Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Williamson *Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II. 17
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun Dasar 2000)	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,66	0,67	N/A	N/A

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2017, BPS Kota Surabaya 2016

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan

besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II. 17. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.8. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II. 18
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok
Pendapatan Kota Surabaya

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II. 18, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40 % penduduk termiskin mencapai lebih dari 17 % dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81 %.

2.1.2.1.9. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2015 sebesar Rp. 418.930 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 19.

Tabel II. 19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Kemiskinan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angka Kemiskinan (persen)	5,79	5,82	N/A	N/A
Garis Kemiskinan (Rp)	393.151	418.93	N/A	N/A
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	164,36	165,72	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Memperhatikan data pada Tabel II. 19 tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk miskin yang ada sebanyak 165.720 jiwa pada tahun 2015. Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperand alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15

tahun ke atas tercatat sebanyak 2.537.150 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 2.537.150 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.199.721	2.121.329	2.537.150	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.199.721	2.121.329	2.537.150	N/A
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada Tabel II. 20 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM tahun 2014 jenjang SD/MI sebesar 97,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,87 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 93,47 persen. APM tahun 2015 jenjang SD/MI sebesar 95,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,03 persen, jenjang SMA/MA/SMK sebesar 92,55 persen. Sedangkan untuk APM Kota Surabaya sampai tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 83,75 persen jenjang SMP/MTs sebesar 81,07 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 85,59 persen. Pada triwulan I tahun 2017 APM jenjang SD/MI sebesar 99,59 perse dan jenjang SMP/MTs sebesar 86,23 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APM SD/MI dan SMP/MTs tercatat mengalami kenaikan. Hal ini selain dikarenakan sekolah telah melakukan *up date* data profil sekolah berdasarkan data siswa tahun ajaran baru 2016/2017 (*by name* siswa) sedangkan data penduduk per usia sekolah telah mengikuti data *up date* dari Dinas kependudukan dan Pencatatan

Sipil per triwulan I juga telah mencerminkan peningkatan konsistensi masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya sesuai jenjang usia ideal dengan jenjang pendidikannya. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 21 sebagai berikut:

Tabel II. 21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	252.434	256.703	255.142	276.266
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
	APM SD/MI (persen)	97,02	95,02	83,75	99,59
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	124.018	131.306	128.810	122.940
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	158.893	142.565
	APM SMP/MTs (persen)	95,9	95	81,07	86,23

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,85	104	N/A	N/A
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	106,47	105,06	N/A	N/A

Sumber: Laporan MDGs Kota Surabaya, 2017

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara

umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs, tahun 2014 sebesar 100,37 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI sebesar 92,34 persen, APK jenjang SMP/MTs sebesar 84,14 persen dan APK jenjang SMA/MA/SMK sebesar 90,57 persen. Sedangkan sampai dengan Triwulan I 2017 jumlah APK jenjang SD/MI sebesar 104,07 persen dan APK jenjang SMP/MTs sebesar 91,46 persen. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 23 sebagai berikut.

Tabel II. 23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	SD/MI				
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.789	284.313	281.310	288.704
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
	APK SD/MI (persen)	108,3	105,24	92,34	104,07
2.	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.845	145.123	135.283	130.390
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	158.893	142.565
	APK SMP/MTs (persen)	100,37	105,03	84,14	91,46

Sumber: Dinas Pendidikan, Triwulan I 2017

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 24. Data tahun 2016 tersebut masih merupakan angka proyeksi (angka sangat sementara).

Tabel II. 24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Rata-Rata Lama Sekolah	10,07	10,24	10,41	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 rilis terbaru dari BPS adalah tahun 2016 (proyeksi dan angka sangat sementara), sehingga untuk triwulan I 2017 masih menggunakan data rilis tahun 2016 tersebut seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,52	13,60	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

2.1.2.2.2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 26.

Tabel II. 26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angka Harapan Hidup (persen)	73,85	73,85	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

AHH penduduk Kota Surabaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tetap pada angka 73.85 persen, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2017 masih dalam proses perhitungan oleh BPS Kota Surabaya.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0,21% dan pada tahun 2015 sebesar 0,16%. Pada tahun 2016 persentase balita gizi buruk sebesar 0,16% sebagaimana tampak pada tabel berikut. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2014 – triwulan I 2017.

Tabel II. 27
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Prevalensi Balita Gizi Buruk (persen)	0,21	0,16	0,16	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Tabel II. 28
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	2	3.495	0,06%	0	3.522	0,00%	5	3.629	0,14%	<p style="text-align: center;">Belum dilakukan survey PSG (Pemantauan Status Gizi)</p>		
2	Kec. Benowo	1	4.129	0,02%	2	4.004	0,05%	2	4.198	0,05%			
3	Kec. Bubutan	3	6.139	0,05%	5	6.108	0,08%	3	6.153	0,05%			
4	Kec. Bulak	5	2.522	0,20%	7	2.722	0,26%	5	2.887	0,17%			
5	Kec. Dukuh Pakis	7	2.583	0,27%	2	2.646	0,08%	3	2.849	0,11%			
6	Kec. Gayungan	5	2.474	0,20%	3	2.478	0,12%	11	2.291	0,48%			
7	Kec. Genteng	7	3.037	0,23%	6	3.002	0,20%	3	2.974	0,10%			
8	Kec. Gubeng	6	7.556	0,08%	5	7.319	0,07%	7	7.327	0,10%			
9	Kec. Gunung Anyar	2	2.733	0,07%	0	3.596	0,00%	0	2.672	0,00%			
10	Kec. Jambangan	2	3.527	0,06%	4	3.546	0,11%	6	3.562	0,17%			
11	Kec. Karangpilang	17	3.238	0,53%	15	3.277	0,46%	4	3.759	0,11%			
12	Kec. Kenjeran	12	10.222	0,12%	11	11.075	0,10%	4	10.888	0,04%			
13	Kec. Krembangan	4	7.446	0,05%	2	7.406	0,03%	5	7.533	0,07%			
14	Kec. Lakarsantri	2	3.195	0,06%	2	3.118	0,06%	2	3.760	0,05%			
15	Kec. Mulyorejo	31	4.934	0,63%	12	5.483	0,22%	5	5.624	0,09%			
16	Kec. Pabean Cantian	10	4.400	0,23%	9	4.441	0,20%	9	4.462	0,20%			
17	Kec. Pakal	40	4.664	0,86%	36	4.527	0,80%	48	4.496	1,07%			
18	Kec. Rungkut	9	6.033	0,15%	7	6.083	0,12%	9	6.210	0,14%			
19	Kec. Sambikerep	6	3.620	0,17%	8	4.741	0,17%	6	4.282	0,14%			

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
20	Kec. Sawahan	16	12.793	0,13%	13	12.843	0,10%	12	12.865	0,09%	Belum dilakukan survey PSG (Pemantauan Status Gizi)		
21	Kec. Semampir	27	11.332	0,24%	9	11.406	0,08%	16	11.456	0,14%			
22	Kec. Simokerto	17	5.759	0,30%	13	5.777	0,23%	14	5.868	0,24%			
23	Kec. Sukolilo	16	5.667	0,28%	10	5.766	0,17%	11	5.751	0,19%			
24	Kec. Sukomanunggal	54	7.446	0,73%	48	7.346	0,65%	47	6.791	0,69%			
25	Kec. Tambaksari	6	10.687	0,06%	7	10.683	0,07%	7	10.520	0,07%			
26	Kec. Tandes	4	7.199	0,06%	11	6.675	0,16%	3	6.282	0,05%			
27	Kec. Tegalsari	18	6.030	0,30%	10	6.030	0,17%	7	5.991	0,12%			
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	6	3.448	0,17%	1	3.072	0,03%	1	3.121	0,03%			
29	Kec. Wiyung	10	3.557	0,28%	5	3.789	0,13%	8	4.125	0,19%			
30	Kec. Wonocolo	3	4.957	0,06%	4	4.986	0,08%	2	5.111	0,04%			
31	Kec. Wonokromo	18	9.265	0,19%	15	9.263	0,16%	15	9.005	0,17%			
Total		366	174.085	0,21%	282	176.728	0,16%	280	176.439	0,16%			

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), balita gizi buruk dan kurang dapat dilihat pada Tabel II. 29, Tabel II. 30, dan Tabel II. 31 sebagai berikut:

Tabel II. 29
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	39	38	37	7
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	N/A
3	AKI per 100.000 KH	90,19	87,35	85,72	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 30
Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah bayi lahir meninggal	243	282	276	26
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	N/A
3	AKB per 1.000 KH	5,62	6,48	6,39	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 31
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	366	282	280	N/A
2	Jumlah balita yang ditimbang	174.085	176.728	176.439	N/A
3	Persentase (persen)	0,21	0,16	0,15	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 32
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2016 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	29.888	N/A
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	N/A
3	Persentase (persen)	16,94	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2014 – tahun 2015 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%, adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 - triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 33.

Tabel II. 33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	85.345	102.914	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
3	Persen Pengangguran Terbuka	5,82%	7,01%	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.465.502 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 34
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Golongan Umur	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	15-19	51.799	25.307	77.106	45.923	23.289	69.212	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	20-24	134.873	31.449	166.322	156.253	38.194	194.447	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	25-29	188.850	8.725	197.575	188.405	19.949	208.354	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	30-34	230.950	5255	236.205	201.262	5.362	206.624	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	35-39	177.735	4.686	182.421	178.120	2.001	180.121	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	40-44	188.379	1.071	189.450	162.859	3.730	166.589	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	45-49	128.094	2.192	130.286	141.305	3.140	144.445	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	50-54	126.944	1.190	128.134	120.863	2.543	123.406	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	55-59	73.830	3.730	77.560	90.158	2.576	92.734	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	60+	78.703	1.840	80.543	80.032	2.130	82.162	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Pada Tahun 2014 penduduk Surabaya yang bekerja sebesar 1.380.157 orang atau 94,17 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Surabaya, sedangkan pada tahun 2015 penduduk Surabaya yang bekerja sebesar 1.365.180 orang atau 92.99 persen dari keseluruhan angkatan kerja.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 35.

Tabel II. 35
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Grup Kesenian	226	219	498	561
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	43	43	43
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok / grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 226, tahun 2015 sebanyak 219 grup kesenian sedangkan pada tahun 2016 terdapat 498

grup kesenian dan 4 gedung kesenian. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah grup kesenian di Kota Surabaya sebanyak 561 grup kesenian dan 4 gedung kesenian.

Jumlah cabang olahraga pada tahun 2017 sebanyak 43 cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk memfasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Pada tahun 2017, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.1.1. Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.a Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014 – Triwulan I 2017 telah disajikan di atas pada Tabel II. 23 dan APK per kecamatan dalam Tabel II. 36 berikut.

Tabel II. 36
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Triwulan I Tahun 2017

Kecamatan	APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	4.999	3.814	76,30%	2.429	1.680	69,16%
Benowo	6.396	6.523	101,99%	3.200	1.589	49,66%
Bubutan	9.681	9.055	93,53%	5.007	2.337	46,67%
Bulak	4.431	6.105	137,78%	2.300	2.564	111,48%
Dukuh Pakis	5.494	6.198	112,81%	2.735	2.613	95,54%
Gayungan	3.933	6.503	165,34%	2.078	2.685	129,21%
Genteng	5.122	7.089	138,40%	2.715	5.134	189,10%
Gubeng	12.361	14.034	113,53%	6.369	3.809	59,81%
Gunung Anyar	5.283	4.823	91,29%	2.549	1.412	55,39%
Jambangan	4.682	4.509	96,30%	2.364	3.571	151,06%
Karangpilang	6.666	7.017	105,27%	3.578	3.828	106,99%
Kenjeran	16.445	16.728	101,72%	8.580	8.097	94,37%
Krembangan	10.882	13.083	120,23%	5.756	8.354	145,14%
Lakarsantri	5.688	7.556	132,84%	2.840	4.416	155,49%
Mulyorejo	7.670	9.912	129,23%	3.974	5.505	138,53%
Pabean Cantian	7.383	4.592	62,20%	3.833	1.898	49,52%
Pakal	5.498	6.875	125,05%	2.850	3.283	115,19%
Rungkut	10.299	10.656	103,47%	5.137	5.017	97,66%
Sambikerep	5.935	5.122	86,30%	2.994	2.443	81,60%
Sawahan	19.594	16.306	83,22%	10.100	4.371	43,28%
Semampir	18.700	20.430	109,25%	9.636	5.833	60,53%
Simokerto	8.941	6.568	73,46%	4.646	3.711	79,88%
Sukolilo	9.941	11.758	118,28%	4.972	6.837	137,51%
Sukomanunggal	9.356	10.536	112,61%	4.731	5.895	124,60%
Tambaksari	20.554	17.924	87,20%	10.631	6.195	58,27%
Tandes	8.886	11.143	125,40%	4.241	4.828	113,84%
Tegalsari	8.952	10.576	118,14%	4.729	3.788	80,10%
Tenggilis Mejoyo	5.114	5.707	111,60%	2.525	2.908	115,17%
Wiyung	6.379	6.498	101,87%	3.393	2.625	77,37%
Wonocolo	7.192	8.770	121,94%	3.642	4.652	127,73%
Wonokromo	14.947	12.294	82,25%	8.031	8.512	105,99%
Jumlah	277.404	288.704	104,07%	142.565	130.390	91,46%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

2.1.3.1.1.b Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014 – Triwulan I 2017 telah disajikan di atas pada Tabel II. 21 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 37.

Tabel II. 37
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Triwulan I Tahun 2017

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APK
Asemrowo	4.999	3.577	71,55%	2.429	1499	61,71%
Benowo	6.396	6.346	99,22%	3.200	1552	48,50%
Bubutan	9.681	8.754	90,42%	5.007	2166	43,26%
Bulak	4.431	5.876	132,61%	2.300	2384	103,65%
Dukuh Pakis	5.494	5.989	109,01%	2.735	2544	93,02%
Gayungan	3.933	6.235	158,53%	2.078	2541	122,28%
Genteng	5.122	6.868	134,09%	2.715	4966	182,91%
Gubeng	12.361	13.162	106,48%	6.369	3662	57,50%
Gunung Anyar	5.283	4.667	88,34%	2.549	1271	49,86%
Jambangan	4.682	4.358	93,08%	2.364	3478	147,12%
Karangpilang	6.666	6.780	101,71%	3.578	3706	103,58%
Kenjeran	16.445	15.690	95,41%	8.580	7430	86,60%
Krembangan	10.882	12.630	116,06%	5.756	7966	138,39%
Lakarsantri	5.688	7.412	130,31%	2.840	4272	150,42%
Mulyorejo	7.670	9.589	125,02%	3.974	5153	129,67%
Pabean Cantian	7.383	4.335	58,72%	3.833	1787	46,62%
Pakal	5.498	6.703	121,92%	2.850	3154	110,67%
Rungkut	10.299	10.037	97,46%	5.137	4805	93,54%
Sambikerep	5.935	4.983	83,96%	2.994	2332	77,89%
Sawahan	19.594	15.652	79,88%	10.100	4085	40,45%
Semampir	18.700	18.843	100,76%	9.636	5189	53,85%
Simokerto	8.941	6.273	70,16%	4.646	3414	73,48%
Sukolilo	9.941	11.381	114,49%	4.972	6522	131,17%
Sukomanunggal	9.356	10.122	108,19%	4.731	5587	118,09%
Tambaksari	20.554	17.126	83,32%	10.631	5682	53,45%
Tandes	8.886	10.782	121,34%	4.241	4538	107,00%
Tegalsari	8.952	10.176	113,67%	4.729	3624	76,63%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTs		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APK
Tenggilis Mejoyo	5.114	5.515	107,84%	2.525	2740	108,51%
Wiyung	6.379	6.315	99,00%	3.393	2530	74,57%
Wonocolo	7.192	8.314	115,60%	3.642	4365	119,85%
Wonokromo	14.947	11.776	78,79%	8.031	7996	99,56%
	277.404	276.266	99,59%	142.565	122.940	86,23%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data pada Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK dan APM lebih dari 100 %, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK dan APM kurang dari 100 % menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.1.c Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2014 sampai 2015 mencapai angka 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 99,99 persen dan tahun 2015 mencapai 100 persen. Untuk angka kelulusan pada tahun 2016, untuk jenjang

SD/MI sebesar 100 persen dan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 99,97 persen. Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 masih sesuai tahun 2016 karena akhir tahun ajaran baru dibulan Juni 2017 seperti disajikan pada Tabel II. 38.

Tabel II. 38
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	45.498	45.990	40.849	N/A
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	45.498	45.990	40.849	N/A
	AL SD/MI (persen)	100	100	100	N/A
2.	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	38.319	43.090	39.570	N/A
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.321	43.090	39.580	N/A
	AL SMP/MTs (persen)	99,99	100	99,97	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada Tabel II. 38 menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.1.d Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh

pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2015 APS di jenjang SD/MI sedikit meningkat menjadi sebesar 0,00% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 0,0025%. APS SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 0,00%, naik dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 0,002%. APS di jenjang SMA/MA tahun 2015 sebesar 0,004%, dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,01%. Pada tahun 2016, APS di jenjang SD/MI dan di jenjang SMP/MTs sebesar 0 persen, sedangkan di jenjang SMA/MA sebesar 0,01 persen dan di jenjang SMK sebesar 0,01 persen. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 39.

Tabel II. 39
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	SD/MI				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	7	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.789	284.313	281.310	285.627
	APS SD/MI (persen)	0,0025	0	0	0
2.	SMP/MTs				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	3	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	129.845	145.123	135.283	130.505
	APS SMP/MTs (persen)	0,002	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Seperti halnya angka kelulusan, dari data pada Tabel II. 39 di atas menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan hanya sebagian kecil dari siswa jenjang SMA dan SMK yang mengalami putus sekolah dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.1.e Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah

siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 99,54% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 99,60%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 110,42% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 100,04%. Menurunnya Angka Melanjutkan tersebut (0,06%) di atas dikarenakan salah satunya karena keterbatasan akses untuk mendata lulusan siswa Surabaya yang melanjutkan ke luar kota Surabaya. Pada tahun 2016, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 105,51 persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 116,54 persen. Data Angka Melanjutkan sampai dengan Triwulan I 2017 masih menggunakan data sesuai tahun 2016 karena tahun ajaran baru pada bulan Juli 2017.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 40
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				
	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTs	45.316	45.778	43.099	N/A
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	45.498	45.990	40.849	N/A
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	100,8	99,54	105,51	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.1.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar

masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 41.

Tabel II. 41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	971	862	733	739
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
1.3.	Rasio	1 : 268	1 : 313	1 : 415	1.375
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah gedung sekolah	375	356	341	348
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	129.367	138.173	158.893	130.505
2.3	Rasio	0,28	0,31	1 : 465	1.375

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 42

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
Asemrowo	15	5	20	4782	1:240	4	0	4	2340	1:585	1	0	1	2	2181	1 : 1091
Benowo	11	5	16	5897	1:369	3	2	5	3044	1:609	2	1	1	4	2843	1 : 711
Bubutan	37	2	39	9422	1:242	9	0	9	4972	1:553	1	0	3	4	4754	1 : 1189
Bulak	16	5	21	4306	1:206	5	1	6	2257	1:377	2	0	1	3	2028	1 : 676
Dukuh Pakis	30	1	31	5228	1:169	14	1	15	2702	1:181	6	0	0	6	2489	1 : 415
Gayungan	18	1	19	3798	1:200	8	1	9	2035	1:227	5	0	2	7	1953	1 : 279
Genteng	23	1	24	4993	1:209	11	0	11	2727	1:248	13	0	5	18	2568	1 : 143
Gubeng	44	4	48	12085	1:252	18	0	18	6268	1:349	9	0	8	17	6008	1 : 354
Gununganyar	12	0	12	5014	1:418	7	0	7	2438	1:349	0	0	2	2	2398	1 : 1199
Jambangan	11	4	15	4508	1:301	6	0	6	2282	1:381	3	0	3	6	2054	1 : 343
Karangpilang	19	3	22	6453	1:294	12	0	12	3550	1:296	5	0	4	9	3234	1 : 360
Kenjeran	27	23	50	15519	1:311	14	4	18	8062	1:448	3	0	2	5	7447	1 : 1490
Krembangan	31	8	39	10493	1:270	17	1	18	5592	1:311	7	0	2	9	5331	1 : 593
Lakarsantri	19	5	24	5502	1:230	7	2	9	2771	1:308	6	0	1	7	2467	1 : 353
Mulyorejo	36	2	38	7365	1:194	12	0	12	3933	1:328	5	0	3	8	3550	1 : 444
Pabean Cantian	18	4	22	7202	1:328	8	0	8	3700	1:463	3	0	2	5	3564	1 : 713
Pakal	17	7	24	5233	1:219	6	3	9	2650	1:295	4	1	1	6	2532	1 : 422
Rungkut	23	5	28	9820	1:351	7	2	9	5133	1:571	5	2	2	9	4874	1 : 542
Sambikerep	13	6	19	5682	1:300	9	1	10	2894	1:290	7	1	4	12	2508	1 : 209
Sawahan	57	1	58	19154	1:331	16	2	18	9882	1:549	7	0	9	16	9317	1 : 583
Semampir	50	31	81	17875	1:221	22	5	27	9240	1:343	4	1	4	9	8614	1 : 958
Simokerto	27	6	33	8702	1:264	9	2	11	4611	1:420	6	1	3	10	4395	1 : 440

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
Sukolilo	39	0	39	9531	1:245	17	1	18	4821	1:268	12	0	10	22	4482	1 : 204
Sukomanunggal	39	1	40	9123	1:229	18	0	18	4562	1:254	6	1	8	15	4339	1 : 290
Tambaksari	50	8	58	19867	1:343	18	5	23	10478	1:456	8	2	4	14	9650	1 : 690
Tandes	21	9	30	8574	1:286	13	2	15	4112	1:275	1	2	1	4	3749	1 : 938
Tegalsari	36	3	39	8634	1:222	17	0	17	4646	1:274	4	0	0	4	4496	1 : 1124
Tenggilis Mejoyo	18	0	18	4842	1:269	9	0	9	2468	1:275	3	0	0	3	2366	1 : 789
Wiyung	17	1	18	6123	1:341	6	0	6	3329	1:555	1	1	0	2	3151	1 : 1576
Wonocolo	25	3	28	6828	1:244	10	2	12	3671	1:306	9	3	7	19	3429	1 : 181
Wonokromo	42	7	49	14666	1:300	19	1	20	7985	1:400	11	0	9	20	7623	1 : 382

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada Tabel II. 41 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD dan SMP semakin meningkat. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II. 42 ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah Kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dan Kecamatan Dukuh Pakis merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan Tahun 2015 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. tahun 2016 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2016, terdapat 31 lembaga kursus/pelatihan yang telah terakreditasi dan 470 lembaga kursus/pelatihan belum terakreditasi.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2015 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus

2.1.3.1.1.g Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23. Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 6.460 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:22.

Tabel II. 43
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2014-2016

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	SD/MI				
1.1	Guru	12.767	12.418	N/A	N/A
1.2	Murid	281.794	284.313	281.310	N/A
1.3	Rasio	1 : 22	1 : 23	N/A	N/A
2	SMP/MTs				N/A
2.1	Guru	7.723	6.460	N/A	N/A
2.2	Murid	129.845	145.123	135.283	N/A
2.3	Rasio	1 : 17	1 : 22	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 44
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2016

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	0	N/A	N/A	13	0	3407	112	0	3532
SD	143	8	183	26	N/A	4,375	645	3	5383
SMP	34	11	12	41	0	2324	631	22	3075
TOTAL	177	19	195	80	0	10106	1388	25	11990

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 45
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2016

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	584	63	116	51	0	2786	84	1	3685
SD	863	49	195	121	N/A	8314	341	4	9887
SMP	223	23	28	108	N/A	4285	371	2	5040
TOTAL	1670	135	339	280	0	15385	796	7	18612

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 46
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2016

No	Jenjang	Kondisi 2015 (Telah Sertifikasi)			Jumlah Total Guru			Selisih Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML
1	TK	455	1755	2210	689	4757	5446	234	3002	3236
2	SD	3808	2031	5839	8981	5117	14098	5173	3086	8259
3	SMP	2286	1512	3798	2884	5939	8819	598	4423	5021
4	SLB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SMA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	SMK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PENGAWAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	JUMLAH	6549	5298	11847	12554	15809	28363	6005	10511	16516

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 13.511 guru di seluruh jenjang pendidikan yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 47 sampai Tabel II. 50.

Tabel II. 47
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	69	28	38	9
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	69	28	38	9
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 48
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	41.939	42.846	42.548	9.981
2	Jumlah ibu nifas	45.505	45.680	45.322	44.963
3	Persentase (persen)	92,37%	93,80%	93,88%	22,20%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 49
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kunjungan bayi	40.315	40.455	40.086	9.780
2	Jumlah bayi	42.568	43.178	42.767	42.377
3	Persentase (persen)	94,71%	93,69%	93,73%	23,08%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel II. 50
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	366	282	280	58
2	Jumlah balita gizi buruk	366	282	280	58
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Terdapat 10 jenis PHBS di rumah tangga yaitu: 1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) memberikan bayi ASI eksklusif; 3) menimbang balita setiap bulan; 4) menggunakan air bersih; 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6) menggunakan jamban sehat; 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8) makan buah dan sayur setiap hari; 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok dalam rumah. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Perkembangan rumah tangga ber- PHBS dapat dilihat pada Tabel II. 51 di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah tangga yang ber-PHBS nya semakin meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Tabel II. 51
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS	141.162	160.758	157.878	N/A
2	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	210.369	223.584	210.302	N/A
3	Persentase (persen)	67,1	71,9	75,07	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Rumah tangga ber- PHBS juga didukung dengan adanya kelurahan siaga aktif yang dapat dilihat pada Tabel II. 52.

Tabel II. 52
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah posyandu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat, sedangkan pada tahun 2016 jumlah posyandu mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat dalam Tabel II. 53.

Tabel II. 53
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah posyandu	2.820	2.826	2.824	2.778
2	Jumlah balita	218.774	217.873	215.713	213.590
3	Rasio posyandu per 1.000 penduduk	12,89	12,97	13,09	13,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Dari data Tabel II. 53 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 100 penduduk angkanya relatif stagnan berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dari 20

Puskesmas di tahun 2014 menjadi 21 puskesmas di tahun 2015. Pada tahun 2016, terdapat 21 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan sampai dengan triwulan I 2017, sebanyak 21 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan triwulan I 2017 sejumlah **3,307,300** jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 1.750 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai triwulan I 2017 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 54.

Tabel II. 54
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah puskesmas	62	63	63	63
2	Jumlah klinik	243	261	296	304
3	Jumlah pustu	60	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 55.

Tabel II. 55
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.307.300
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	3	3	3
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	5	5	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	44	44	43	44
Jumlah Rumah Sakit		61	61	59	60
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0213	0,0207	0.0178	0.0181

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 6.364 orang, dengan rasio sebesar 2,23 dokter per 1.000 penduduk. Terjadi peningkatan jumlah dokter pada tahun 2015, menjadi 6.839 orang, dengan rasio sebesar 2,32 dokter per 1.000 penduduk atau 23,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2016, jumlah dokter sebanyak 7.358 orang, dengan rasio 2,22 per 1000 penduduk. Dan sampai dengan triwulan I 2017, jumlah dokter di Kota Surabaya sebanyak 74,88 Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 56.

Tabel II. 56
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.307.300
2	Jumlah dokter	6.364	6.839	7.358	7.488
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,23	2,32	2,22	2,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II. 57. Pada tahun 2017, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

Tabel II. 57
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Instansi	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
RSUD Bhakti Dharma Husada	74,67	-	78,91	Tahap Pelaksanaan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	72,83	-	77,02	

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Catatan : IKM Tahun 2015 di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie tidak dilakukan.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 terdapat 3 puskesmas yang telah diakreditasi yaitu puskesmas asemrowo, puskesmas tambakrejo, dan puskesmas Gayungan, dan pada tahun 2016 terdapat 12 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk. Untuk rumah sakit umum daerah, hanya RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang telah dikareditasi pada tahun 2015 dengan hasil akreditasi paripurna, sedangkan untuk RSUD Bhakti Dharma Husada pada tahun 2016 telah terakreditasi dengan hasil akreditasi utama.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.a Pekerjaan Umum

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2014 panjang jalan kondisi baik adalah 1.648,84 km dari panjang jalan secara keseluruhan 1.679,60 km, dengan prosentase 98,17%. Pada Tahun 2015, panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2014, yaitu menjadi sepanjang 1.660,17 km dari panjang jalan secara keseluruhan sepanjang 1.684,00 km, dengan prosentase sebesar 98,58%. Sementara pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel II. 58.

Tabel II. 58
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.648,84	1.660,17	1.662,99	-
Panjang Jalan (Km)	1.679,60	1.684,00	1.686,38	-
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,17%	98,58%	98,61%	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

2.1.3.1.3.b Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non

rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 59.

Tabel II. 59
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rumah Tinggal	4.461	6.411	7.196	930
2	Non Rumah Tinggal	1.306	1.239	1.762	114
3	Reklame	1.413	902	2.450	1.044
Total		7.180	8.552	11.408	2.088

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100-0-100. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II. 60.

Tabel II. 60

Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II. 61 berikut:

Tabel II. 61
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	602	723	749	22

Sumber: Dinas Sosial, 2017

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Sesuai Perwali Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat

meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Luas kawasan terbangun atau yang mendapatkan fasilitas perbaikan lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 232.412,79 m² dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 1.162.063,96 m². Pada tahun 2016, luas kawasan terbangun atau yang mendapat fasilitas perbaikan lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya sebesar 16.869,01 m² dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 84.345,03 m², sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 62
Luas Kawasan Terlayani Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2015 – Triwulan I 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Terlayani Tahun 2015		Luas Kawasan Terlayani Tahun 2016		Luas Kawasan Terlayani Triwulan I 2017	
			Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)
1	Kec. Asemrowo	15.440.000	3.957,58	19.787,90	0	0	N/A	N/A
2	Kec. Benowo	26.780.000	20.957,33	104.786,63	0	0	N/A	N/A
3	Kec. Bubutan	3.680.000	1.220,95	6.104,75	692	3.460,00	N/A	N/A
4	Kec. Bulak	6.780.000	1.630,25	8.151,25	1.454,43	7.272,15	N/A	N/A
5	Kec. Dukuh Pakis	9.940.000	641,36	3.206,80	0	0	N/A	N/A
6	Kec. Gayungan	6.070.000	8.947,45	44.737,25	852,5	4.262,50	N/A	N/A
7	Kec. Genteng	4.050.000	3.537,38	17.686,90	1.331,40	6.657,00	N/A	N/A
8	Kec. Gubeng	8.000.000	6.877,28	34.386,40	592,5	2.962,50	N/A	N/A
9	Kec. Gunung Anyar	8.710.000	4.933,15	24.665,75	0	0	N/A	N/A
10	Kec. Jambangan	4.190.000	972,5	4.862,50	273,9	1.369,50	N/A	N/A
11	Kec. Karangpilang	9.230.000	5.310,30	26.551,50	0	0	N/A	N/A
12	Kec. Kenjeran	7.640.000	24.989,32	124.946,60	1.723,05	8.615,25	N/A	N/A
13	Kec. Krembangan	8.340.000	2.889,27	14.446,34	0	0	N/A	N/A
14	Kec. Lakarsantri	20.430.000	5.247,00	26.235,00	300	1.500,00	N/A	N/A
15	Kec. Mulyorejo	14.210.000	8.409,91	42.049,55	602	3.010,00	N/A	N/A
16	Kec. Pabean Cantian	6.800.000	3.929,32	19.646,58	0	0	N/A	N/A
17	Kec. Pakal	19.010.000	10.539,35	52.696,75	41,93	209,63	N/A	N/A
18	Kec. Rungkut	21.080.000	12.029,23	60.146,13	525	2.625,00	N/A	N/A
19	Kec. Sambikerep	16.050.000	7.534,43	37.672,15	0	0	N/A	N/A

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Terlayani Tahun 2015		Luas Kawasan Terlayani Tahun 2016		Luas Kawasan Terlayani Triwulan I 2017	
			Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)
20	Kec. Sawahan	6.930.000	6.149,68	30.748,40	208,2	1.041,00	N/A	N/A
21	Kec. Semampir	8.770.000	7.627,44	38.137,18	0	0	N/A	N/A
22	Kec. Simokerto	2.590.000	6.217,20	31.086,00	0	0	N/A	N/A
23	Kec. Sukolilo	23.680.000	6.327,60	31.638,00	975,3	4.876,50	N/A	N/A
24	Kec. Sukomanunggal	9.230.000	7.441,51	37.207,55	1.441,30	7.206,50	N/A	N/A
25	Kec. Tambaksari	9.000.000	17.834,72	89.173,60	0	0	N/A	N/A
26	Kec. Tandes	11.060.000	12.846,51	64.232,53	1.261,16	6.305,80	N/A	N/A
27	Kec. Tegalsari	4.290.000	5.730,63	28.653,14	0	0	N/A	N/A
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	5.520.000	7.603,40	38.017,00	462,9	2.314,50	N/A	N/A
29	Kec. Wiyung	12.460.000	849,7	4.248,50	1.855,79	9.278,95	N/A	N/A
30	Kec. Wonocolo	6.780.000	6.964,04	34.820,20	657	3.285,00	N/A	N/A
31	Kec. Wonokromo	8.470.000	12.267,03	61.335,15	1.618,65	8.093,25	N/A	N/A
Total		325.210.000	232.412,79	1.162.063,96	16.869,01	84.345,03	N/A	N/A

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2017

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 63
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Pemohon Rusun	583	1199	801	212

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, dan pada triwulan I 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 81 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi, yang disajikan pada Tabel II. 64 berikut.

Tabel II. 64
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21 24	4 4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto I	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2013-2014 (APBN)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	3	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
Total				81		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

2.1.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.5.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan

masyarakat dan disiplin aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel II. 65 berikut.

Tabel II. 65
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	497	532	648	648
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,74	1,81	1,96	1,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2014, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 132 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, Pada tahun 2015, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 162 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 168 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan pada triwulan I 2017 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 183 patroli sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 66
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

URAIAN	T A H U N			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3	132	162	168	183

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2014 dan 2015 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100%. Hal ini dapat menggambarkan kinerja aparat dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Demikian pula pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada triwulan I 2017, sebanyak 9.896 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II. 67.

Tabel II. 67
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	84.382	72.218	47.067	9.896
2	Jumlah pelanggaran K3	84.382	72.218	47.067	9.896
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 35.556 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 orang maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 124,60 orang. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah linmas adalah sebanyak 36.969 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 125,59 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 orang. Pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 75 personil Linmas, dan pada triwulan I 2017, jumlah linmas adalah sebanyak 19.372 orang dengan jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 3.316.131 orang. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II. 68.

Tabel II. 68
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Linmas	35.556	36.969	24.859	19.372
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	124,6	125,59	75,16	58,42

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2016 sebanyak 19 kejadian anarkis, dan pada triwulan I 2017 sebanyak 2 kejadian anarkis. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.b Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 69 berikut.

Tabel II. 69
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	60	57	57
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	92,56%	92,56%	93%	93%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya penataan jaringan utilitas seperti jaringan listrik menjadi salah satu penyebab dominan bencana kebakaran sebagai salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 70
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Hubungan Listrik	99	153	142	24
2	Api Terbuka	404	417	125	14
3	Api Mekanis	0	0	3	0
4	Dalam Penyelidikan	74	38	30	15
5	Tidak Ada Keterangan	8	0	0	0
Total		585	608	300	53

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2017

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2016, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen, di mana rata-rata pada tahun sebelumnya hanya mencapai 94 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II. 71.

Tabel II. 71
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 Menit	536	604	300	53
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	596	608	300	53

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2017

Sepanjang tahun 2014 tercatat telah terjadi 596 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 536 kejadian. Pada tahun 2015, jumlah kejadian kebakaran meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 608 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 604 kejadian. Dan pada tahun 2016 terjadi 300 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017 triwulan 1, jumlah kejadian kebakaran yaitu 53 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 53 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga Pemerintah Kota berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran untuk memperluas skala

pelayanan kebakaran Kota Surabaya. Sampai dengan triwulan I 2017, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 20 unit.

Tabel II. 72
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	19	20	20	20
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan, tidak ada taman, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan, tidak ada taman, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.5.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 73
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Ormas Aktif	146	151	51	32
2	Jumlah Ormas Terdaftar	146	151	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 74 berikut.

Tabel II. 74
Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap ormas	3	3	1	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun 2017, kegiatan pembinaan terhadap ormas dilaksanakan pada triwulan II.

2.1.3.1.6. Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.6.a PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan

mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II. 75
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PMKS yang ada	47.199	49.881	50.222	50.222
2	Jumlah PMKS yang ditangani	27.652	28.907	30.468	27.945
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	58,59	57,95	60,67	55,64

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat tetapi belum dapat melayani seluruh PMKS di Kota Surabaya.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.465.502 pada tahun 2014 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015. Hal ini dimungkinkan bahwa sebagian penduduk usia 15 tahun ke atas, masih melanjutkan pendidikan sekolah. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II. 76.

Tabel II. 76

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.201.854	2.220.853	2.537.150	N/A
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,66	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

2.1.3.2.1.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II. 77.

Tabel II. 77

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	366	244	275	75
2	Jumlah Perusahaan	12.690	12.782	12.782	12.863
3	Rasio sengketa	2,88	1,91	2,15	0,58

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2014 sebanyak 366, menurun pada tahun 2015 menjadi 244 dan pada tahun 2016 sebesar 275 sengketa. Sengketa pada tahun 2016 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya pemutusan Hubungan kerja dan adanya hak-hak yang belum terpenuhi.

2.1.3.2.1.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Data pengangguran terbuka terbesar mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap

pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 78.

Tabel II. 78
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Tidak/belum pernah sekolah			N/A	N/A
2	Tidak/belum tamat SD	1.102	1.855	N/A	N/A
3	Sekolah Dasar	7.769	6.772	N/A	N/A
4	SLTP	14.779	11.807	N/A	N/A
5	SLTA			N/A	N/A
	Umum	23.023	35.468	N/A	N/A
	Kejuruan	25.021	35.218	N/A	N/A
6	Diploma I/II/III/Akademi	2.688	1.337	N/A	N/A
7	Universitas	10.963	10.457	N/A	N/A
	Jumlah	85.345	102.914	N/A	N/A

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 12.307 orang dan 3.902 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2015 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 22.091 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.225 orang. Sementara itu, pada tahun 2016, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 3.803 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II. 79.

Tabel II. 79
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.902	5.225	3.803	227
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	12.307	22.091	7.502	629

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 mengalami penurunan karena difokuskan pada data pencari kerja yang ber KTP Surabaya. Dengan ini diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat lebih efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang tidak mampu menampung pencari kerja yang telah memperoleh fasilitasi. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.1.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan pada 2016. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II. 80.

Tabel II. 80
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.242	3.303	5.174	5.215
2	Jumlah Perusahaan	12.476	12.782	12.782	12.863
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	25,98	25,84	40,48	40,45

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun 2014 sebanyak 3.242 perusahaan dari 12.476 perusahaan atau sebesar 25,98 persen, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 3.303 perusahaan dari 12.782 perusahaan yang ada di Surabaya, yaitu sebesar 25,84 persen. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.2.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2015 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.525 orang dari 559.357 orang atau sebesar 1,88 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Data partisipasi

perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 81.

Tabel II. 81
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pekerja Perempuan	566.649	559.357	N/A	N/A
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.112	10.525	10.159	8.619
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	1,78	1,88	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

Dari data pada Tabel II. 81 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2014 sebesar 566.649 orang atau 94,53% dari jumlah angkatan kerja perempuan. Sementara itu pada tahun 2015, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 536.473 orang atau 93,68% dari jumlah angkatan kerja perempuan, dan Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain . Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 82.

Tabel II. 82
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	599.414	572.644	N/A	N/A
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	566.649	536.473	N/A	N/A
3.	persen partisipasi angkatan kerja perempuan	94,53	93,68	N/A	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2017

2.1.3.2.2.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 83 di bawah ini.

Tabel II. 83
KDRT Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Rumah Tangga	846.472	896.967	N/A	N/A
2	Jumlah KDRT	70	41	77	24
3	Rasio KDRT	0,008	0,005	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 83 di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 84.

Tabel II. 84
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak
Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	219	287	263	85
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	219	287	263	85
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Dan sampai dengan triwulan I 2017, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak karena penentuan Kecamatan responsive gender pada triwulan IV dan Kelurahan ramah anak pada triwulan III.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 85.

Tabel II. 85
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,65	93,66***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

*** Angka Sangat Sementara

2.1.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Berikut tabel Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.

Tabel II. 86
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016*	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	443.021.157	404.158.210	479.602.970	151.242.150
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.853.661	2.902.736	3.307.300	3.307.300
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	155,24	139,23	145,01	45,72*

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Pada Tabel II. 86 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2014 sebesar 155,24 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 139,23 kg/kapita/th dan pada tahun 2016 naik menjadi 145,01 kg/kapita/th. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu.

Berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2016 rata-rata sebesar 63,93 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2016 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator

untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II. 87 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 95,28, hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Tabel II. 87
Pola Pangan Harapan Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Pola Pangan Harapan	92,93	95	95,28	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2017

2.1.3.2.4. Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II. 89 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada triwulan I 2017 sebesar 47,86 persen dari keseluruhan aset

tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II. 88
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	580	611	744	750
Total aset pemerintah	1251**	1251**	1567	1567
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	46,36%	48,84%	47,48%	47,86%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,

**) Total aset 2011-2015 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Tabel II. 89
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	22	23	29	26
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	4	4	6	2
3.	persen Kasus yang Diselesaikan	18,18%	17,39%	20,68%	7,69%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi

pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m³/hari yaitu pada tahun 2014 sebanyak 9.185,94 m³/hari kemudian pada tahun 2015 sebanyak 9.475,21 m³/hari dan pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m³/hari, seiring dengan perkembangan kota sebagaimana rekap data pada Tabel II. 90.

Tabel II. 90

Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	9.185,94	9.475,21	9.710,61	10.674,63
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	4.853	4.926	5.237,7	5.539,15
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53%	52%	53,94%	51,89%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2014-triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 91.

Tabel II. 91

Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
2	Jumlah TPS (unit)	184	185	187	187

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2015 mencapai 20,74 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2016 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.267,72 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 92
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2014 – Triwulan I 2017

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2014	2015	2016	Triwulan I 2017*
1	RTH makam	281,55	281,55	283,53	283,53
2	RTH lapangan dan stadion	346,55	346,55	350,34	N/A
3	RTH telaga/waduk/boezem	176,42	176,42	191,86	N/A
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	151,33	160,43	204,61	N/A
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.198,54	4.203,67	4.548,59	4.548,59
6	RTH hutan	41,89	41,89	45,23	45,17
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.641,20	1.642,95	1.643,55	1.643,67
Jumlah Luasan RTH Publik total		6.837,48	6.853,46	7.267,72	N/A
Luas Kota Surabaya		33.048	33.048	33.451	N/A
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		20,69	20,74	21,73	N/A

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 tercatat terdapat 81 kasus pencemaran lingkungan, sedangkan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus pencemaran lingkungan yang secara keseluruhan dapat ditangani, dan pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Sampai dengan triwulan I 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 21 kasus, dan sebanyak 21 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2014 sampai dengan triwulan I 2017 yang disajikan pada Tabel II. 93.

Tabel II. 93
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	81	78	75	21
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	81	78	75	21
3	Persentase Penegakan Hukum (persen)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Mutu air badan air dipantau melalui uji sampel air badan air Kota Surabaya dengan lokasi pengambilan sampel sebagai berikut.

Tabel II. 94**Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya**

No.	Nama Sungai	Kelas Air	Lokasi sampel
1	Kali Surabaya	II	Jl. Wonokromo
2.	Kali mas (Hulu)	III	Jl. Ngagel
3.	Kali mas (Tengah)	III	Jembatan Keputran
4.	Kali mas (Hilir)	III	Jembatan Kebon Rojo
5.	Kali Wonokromo (Hulu)	III	Jl. Jagir
6.	Kali Wonokromo (Hilir)	III	Jembatan Merr C
7.	Kali Jeblokan (Hulu)	III	Jl. Petojo
8.	Kali Jeblokan (Hilir)	III	Jl. Kedung Cowek
9.	Kali Kebonagung	III	Jl. Rungkut Industri
10.	Kali Makmur	III	Jl. Lidah Kulon

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II. 95
Jumlah Upaya Penerapan Konservasi Energi

Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
PJU LED	Unit	888	281	1.741	122
PJU Konversi HPS ke LED	Unit	375	328	1.883	0
PJU Solar Cell	Unit	8	0	0	0
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	0	0	0
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	0	0	3	0
Kincir Angin	Unit	0	4	4	0

Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	40	26	0	0
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	2	0	0	0

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II. 96
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693
2016	2.267.213	2.057.533
Triwulan I 2017	2.278.471	2.199.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Dari data pada Tabel II. 96 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui

indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.7.a Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2014 sebesar 62.205 atau sebesar 12,91 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 481.687 dan jumlah akseptor KB pada tahun 2015 sebesar 53.989 atau sebesar 10,62 persen dari jumlah PUS 508.308 sedangkan jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 97.

Tabel II. 97
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380	506.416	505.368
2	Jumlah Akseptor KB	62.205	53.989	40.349	10.645
3	Rasio Akseptor KB (persen)	12,91	10,62	7,96	2,11

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017

2.1.3.2.7.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 98.

Tabel II. 98
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380	506.416	505.368
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	392.206	407.724	415.241	398.075
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,42	80,2	81,99	78,77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, Tahun 2016

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2014 terdapat 481.687 PUS, tahun 2015 terdapat 508.380 PUS, dan pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS. Sampai dengan triwulan I 2017, terdapat 505.368 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 398.075

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 99.

Tabel II. 99
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Fertility Rate (TFR)	1,809	1,716	1,78***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

***angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2015 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.7.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat dilihat pada Tabel II. 100.

Tabel II. 100
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah keluarga	712.172	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	193.550	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I	27,18	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Catatan : Realisasi tahun 2015, 2016, triwulan I 2017 masih dalam proses analisis pendataan keluarga 2015 oleh BKKBN

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 867 BKB, 129 BKR, dan 256 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2016, sebanyak 233 BKB, 31 BKR, dan 31 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan triwulan I 2017, sebanyak 325 BKB baru.

2.1.3.2.7.d Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan

terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga.

Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 101 dan Tabel II. 102.

Tabel II. 101
Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
1.	Asemrowo	3	593	198	3	593	198	4	502	126	4	502	126
2.	Benowo	4	734	184	4	734	184	5	597	119	5	597	119
3.	Bubutan	5	1.390	232	5	1.390	232	6	1.677	280	6	1.677	280
4.	Bulak	4	513	103	4	513	103	5	545	109	5	545	109
5.	Dukuh Pakis	4	732	183	4	732	183	5	611	122	5	611	122
6.	Gayungan	4	604	121	4	604	121	5	682	136	5	682	136
7.	Genteng	5	1.007	252	5	1.007	252	6	1.125	188	6	1.125	188
8.	Gubeng	6	1.593	266	6	1.593	266	7	1.616	231	7	1.616	231
9.	Gunung Anyar	4	745	149	4	745	149	5	745	149	5	745	149
10.	Jambangan	4	774	129	4	774	129	5	650	130	5	650	130
11.	Karangpilang	4	1.028	171	4	1.028	171	5	777	155	5	777	155
12.	Kenjeran	4	4.970	1.243	4	4.970	1.243	5	1.246	249	5	1.246	249
13.	Krembangan	5	1.168	292	5	1.168	292	6	1.605	268	6	1.605	268
14.	Lakarsantri	6	761	152	6	761	152	7	642	92	7	642	92
15.	Mulyorejo	6	657	131	6	657	131	7	865	124	7	865	124
16.	Pabean Cantian	5	1.201	240	5	1.201	240	6	1.332	222	6	1.332	222
17.	Pakal	4	820	205	4	820	205	5	782	156	5	782	156
18.	Rungkut	6	1.474	211	6	1.474	211	7	1.669	238	7	1.669	238
19.	Sambikerep	4	587	147	4	587	147	5	938	188	5	938	188
20.	Sawahan	6	3.679	736	6	3.679	736	7	2.287	327	7	2.287	327
21.	Semampir	5	3.974	662	5	3.974	662	6	2.323	387	6	2.323	387

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
22.	Simokerto	5	1.230	308	5	1.230	308	6	1.393	232	6	1.393	232
23.	Sukolilo	7	1.527	255	7	1.527	255	8	1.531	191	8	1.531	191
24.	Sukomanunggal	6	1.119	280	6	1.119	280	7	1.095	156	7	1.095	156
25.	Tambaksari	8	2.598	325	8	2.598	325	9	2.702	300	9	2.702	300
26.	Tandes	6	1.347	269	6	1.347	269	7	1.323	189	7	1.323	189
27.	Tegalsari	5	1.339	335	5	1.339	335	6	1.100	183	6	1.100	183
28.	Tenggilis	4	1.285	214	4	1.285	214	5	649	130	5	649	130
29.	Wiyung	4	755	189	4	755	189	5	636	127	5	636	127
30.	Wonocolo	5	1.060	177	5	1.060	177	6	956	159	6	956	159
31.	Wonokromo	6	2.856	714	6	2.856	714	7	2.098	300	7	2.098	300
Total		154	44.120	286	154	44.120	286	185	36.699	197	185	36.699	197

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah kelompok binaan PKK Kota Surabaya sebanyak 44.120 pada tahun 2014 dan 2015, dengan rata-rata 286 yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan sedangkan tahun 2016 dan triwulan I 2017 sebanyak 36.699, dengan rata-rata 197 yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 102
Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PKK	154	154	185	185
2	Jumlah kelompok Binaan	44.120	44.120	36.699	36.699
3	Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK	286	286	197	197

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM, kemampuan membedakan berbagai jenis biaya, menghitung biaya langsung, tidak langsung dan total biaya produk, mempersiapkan rencana penjualan dan biaya, menghitung modal yang dibutuhkan, mengetahui jenis usaha dan sumber modal awal, mengevaluasi rencana

bisnis, memiliki rencana aksi yang menyatakan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam bidang usaha makanan, handycraft, produk rumah tangga, menjahit, membatik serta jasa pijat refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan dalam inkubasi dan Klinik Usaha Mandiri terdiri dari pelatihan surveyor dan pendamping, kepengusahaan dasar, MOU kepesertaan, analisa kebutuhan dasar, rancangan strategis untuk intervensi peserta, tindak lanjut pelatihan, market test dan networking, refleksi lanjut kemudian *coaching* dan *mentoring* sampai mandiri.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 103.

Tabel II. 103
Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1655	1725	1824	1885

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai

usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM, kemampuan membedakan berbagai jenis biaya, menghitung biaya langsung, tidak langsung dan total biaya produk, mempersiapkan rencana penjualan dan biaya, menghitung modal yang dibutuhkan, mengetahui jenis usaha dan sumber modal awal, mengevaluasi rencana bisnis, memiliki rencana aksi yang menyatakan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam bidang usaha makanan, handycraft, produk rumah tangga, menjahit, membatik serta jasa pijat refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan dalam inkubasi dan Klinik Usaha Mandiri terdiri dari pelatihan surveyor dan pendamping, kepengusahaan dasar, MOU kepesertaan, analisa kebutuhan dasar, rancangan strategis untuk intervensi peserta, tindak lanjut pelatihan, market test dan networking, refleksi lanjut kemudian *coaching* dan *mentoring* sampai mandiri.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 103.

Tabel II. 103 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

Sampai dengan tahun 2016, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 104 berikut.

Tabel II. 104
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	431	95	431	482
2	Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	431	95	431	482
3	% Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

2.1.3.2.8. Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2014 sejumlah 10.256 kendaraan, sejumlah 10.369 kendaraan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sejumlah 10.202 kendaraan seperti yang disajikan pada Tabel II. 105. Sampai dengan triwulan 1 TA 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 9.777 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

Tabel II. 105
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2015	Triwulan I 2017
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.256	10.369	10.202	9.777

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum seperti yang disajikan pada

Tabel II. 106. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II. 106
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	6.870	7.370	7.017	1.095
3	Rasio Ijin Trayek	0,0024	0,0025	0,0023	0,00033

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 6.870 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0024. Pada tahun 2015 ijin yang dikeluarkan sebanyak 7.370 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0025. Sampai dengan tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0023. Sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 1.095 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.316.131 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00033.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2015 sebanyak 103.902 kendaraan, dan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan. Sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 34.217. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II. 107.

Tabel II. 107
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*	33.071	33.971	37.575	11.096
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	100.091	102.052	97.377	77.714
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	109.191	141.742	133.463	37.200
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	104.069	103.902	123.830	34.217

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai tahun 2015 telah mencapai 11.283 unit, sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan triwulan I 2017 berjumlah 12.935 unit dimana Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penambahan pemasangan rambu baru selama triwulan pertama sebanyak 160 unit (sampai dengan bulan Februari 2017), dapat dilihat pada Tabel II. 108. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II. 108
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	9.910	11.283	12.775	12.935

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

2.1.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap

sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2016, tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 Unit dengan rincian ketinggian 6 meter sebanyak 1 unit, 12 meter sebanyak 19 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 23 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 85 meter sebanyak 1 unit; sedangkan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 802 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II. 109

Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Menara (Tower) (unit)	91	90	88	0
Alat Komunikasi (HT)	670	688	802	233

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II. 110

Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan, dan pada triwulan I 2017 jumlahnya belum mengalami penambahan karena masih dalam proses membangun sistem informasi. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II. 111.

Tabel II. 111
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	5	5	6	0
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	0	0	7	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

2.1.3.2.10. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.a Koperasi

Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa

pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2014 anggota koperasi berjumlah 252.345 orang, pada tahun 2015 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 252.645 orang sedangkan pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 261.799 orang. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 261.789 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II. 112.

Tabel II. 112
Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah anggota koperasi	252.345	252.645	261.799	261.789

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2014 jumlah koperssi yang ada di Kora Surabaya sebanyak 1.637, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 1.357 koperasi merupakan koperasi aktif. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang ada di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.669 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.403 koperasi. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah koperasi di kota Surabaya sebanyak 1.741 koperasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.476 koperasi merupakan koperasi aktif. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II. 113.

Tabel II. 113
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah koperasi	1.637	1.669	1.726	1.741
2	Jumlah koperasi aktif	1.357	1.403	1.461	1.476
3	persen koperasi aktif	82,9	84,06	84,65	84,78

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Jumlah koperasi aktif di surabaya mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas

koperasi. Pada tahun 2014 volume usaha koperasi sebesar 1.597 milyar dari 1.357 koperasi, pada tahun 2015 volume usaha koperasi sebesar 1.605 milyar dari 1.403 koperasi dan pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1.657 milyar dari 1.463 koperasi. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 volume usaha koperasi aktif sebesar 456 milyar rupiah dari 1.476 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II.113.

Tabel II. 114
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Koperasi Aktif	1.357	1.403	1.463	1.476
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.597	1.605	1.657	456
Rasio	1,18	1,14	1,13	0,31

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

2.1.3.2.10.b Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2014, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 28.759 UMKM yang terdiri dari 18.921 usaha mikro, 7.116 usaha kecil dan 2.722 usaha menengah. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 29.507 UMKM yang terdiri dari 19.650 Usaha Mikro, 7.150 Usaha Kecil dan 2.707 Usaha Menengah. Pada tahun 2016 tercatat 26.854 UMKM di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Sampai triwulan 1 tahun 2017, jumlag UMKM di Kota Surabaya mencapai 11.707 unit usaha dimana 92,90% atau 10.876 unit usaha merupakan usaha mikro dan kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 115.

Tabel II. 115
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah seluruh UMKM	28.759	29.507	26.854	11.707
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	26.037	26.800	22.924	10.876
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	90,54	90,83	85,37	92,90

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

2.1.3.2.11. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.a PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 116 di bawah ini.

Tabel II. 116
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Proyek PMDN	9	8	15	-
2	Jumlah Proyek PMA	24	12	43	1
3	Total	33	20	58	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 33 investasi. Jumlah investasi tersebut menurun pada tahun 2015 menjadi 20 investasi dan pada tahun 2016 tercatat sejumlah 58 investasi. Sampai triwulan I tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 1 investasi PMA dengan nilai investasi sebesar 1,2 juta USD.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2014 realisasi investasi dari PMA sebanyak 24 dan PMDN sebanyak 9 investasi. Sementara pada tahun 2015 realisasi investasi PMA sebanyak 12 investasi dan PMDN sebanyak 6 investasi dan pada tahun 2016 realisasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 15 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 117 di bawah ini.

Tabel II. 117
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Persetujuan				
1.1	Jumlah Proyek	76	35	109	40
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.653,75	3.648,67	2.371,45	1.119,32
	(USD Juta)	184,17	38,53	351,62	50,00
2	Realisasi				
2.1	Jumlah Proyek	33	20	58	1
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	639,63	1.026,53	3.797,87	0
	(USD Juta)	45,29	14,66	209,65	1,20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 118 di bawah ini.

Tabel II. 118

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PMA/PMDN	33	20	58	1
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	2.171	1.203	6.897	22
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	94,39	60,15	118,91	22

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2015 sebanyak 20 proyek. Dari jumlah proyek tersebut tersebut jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.203 orang maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya pada tahun 2015 terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 60,15, dan pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 118,91.

2.1.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, Lintasan Drag race Bung Tomo dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 272 lapangan olahraga, meningkat menjadi 346 lapangan olahraga pada tahun 2015 dan menjadi sejumlah 428 lapangan olahraga pada tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 428 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman

maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 119.

Tabel II. 119
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

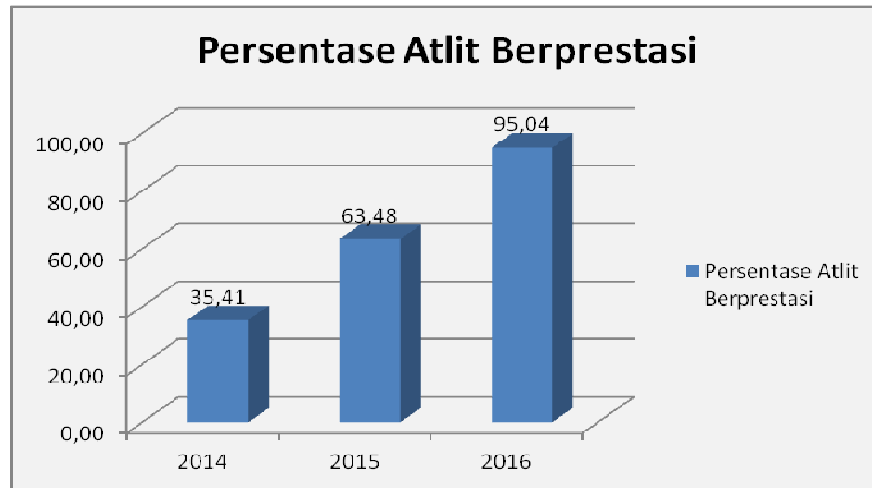
No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah lapangan olahraga	272	346	428	428
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 10.491	1 : 8.507	1 : 7.727	1 : 7.747

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2017

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk pemeratakan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2014 terdapat 1652 orang atlet yang dibina dan sejumlah 585 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 1350 orang atlet yang dibina dan sejumlah 857 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Secara keseluruhan persentase atlet olahraga yang berprestasi dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 35persen menjadi 63 persen. Pada tahun 2016, nilai persentase atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95 persen, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional.



Gambar II. 9
Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2015 total sebanyak 180 kader anti kenakalan remaja telah terbentuk di Kota Surabaya.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2015 terdapat sejumlah 180 orang pemuda yang dibentuk menjadi kader anti kenakalan remaja. Selanjutnya dalam tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.13. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II. 120
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya,
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Dokumen	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Tidak ada	N/A
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Tidak ada	N/A
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Tidak Ada	N/A
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	N/A

Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.14. Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.14.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan

budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II. 121 di bawah ini.

Tabel II. 121
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	449	613	887	103

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

Pada tahun 2014 sebanyak 449 festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surabaya, sedangkan tahun 2015 sebanyak 613 festival seni dan budaya. Untuk tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, sedangkan sampai dengan triwulan 1 2017 sebanyak 103 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

2.1.3.2.14.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.14.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 257, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan triwulan 1 2017 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan

karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan / benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Rekap data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II. 122

**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	257	273	273	273
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	257	273	273	273
3	persen pelestarian	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

2.1.3.2.15. Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, billboard, media cetak dan elektronik,

melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan bukan hanya di Pemerintah Kota, namun ada perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II. 123.

Tabel II. 123
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	59	59	61	61
3	Total	61	61	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan buku yang variatif dan koleksi baru. Jumlah koleksi buku sampai dengan tahun 2016 sebanyak 133.281 judul buku dan jumlah koleksi buku bertambah 64.159 buku menjadi 844.140 buku. Sampai dengan Triwulan I 2017 belum ada penambahan jumlah buku dikarenakan masih belum proses pengadaan buku. Data jumlah judul buku sebagaimana Tabel II. 124.

Tabel II. 124
Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah judul buku	119.256	126.482	133.281	133.281
2	Jumlah buku	714.160	780.970	844.140	844.140

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 125. Pada tahun 2016, indikator yang digunakan sebagai pengukur kinerja adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan, yaitu sebanyak 396.869 orang dari total 4.762.438 orang. Sampai dengan Triwulan I jumlah kunjungan di titik layanan Perpustakaan sebanyak 1.203.614 kunjungan.

Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling.

Tabel II. 125
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Kunjungan layanan baca per bulan (orang)	3.243.366	4.711.419	4.762.438	1.203.614

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan. Selanjutnya perlu diukur peningkatan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Upaya peningkatan minat baca dilakukan dengan meningkatkan jumlah even literasi yang diselenggarakan. Kegiatan literasi dilaksanakan dengan kegiatan Wisata buku, Bedah buku, Literasi Ceria, Pertura, Dongeng keliling bersama Komunitas Yout Peace Festival, Dongeng Keliling bersama Pusling dan Proyek Literasi Pembuatan Antologi Puisi.

2.1.3.2.16. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sistem pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar.

Data Perangkat Daerah (PD) dan pengelola arsip sistem pola baru selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 126.

Tabel II. 126
Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip pola baru	24	30
2.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja	226	226
3.	Persentase Pengelolaan Arsip pola baru (%)	10,61 %	13,27 %

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Pada tahun 2016 Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan pola baru, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 126, dimana yang menjadi pengukuran kinerja adalah persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib kearsipan, yakni 24 dari 226 Perangkat Daerah (10,61%). Sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 jumlah PD yang tertib kearsipan menjadi 30 PD; dan persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip, yakni 14 dari 72 SKPD (19%). Pada Triwulan I Tahun 2017 Jumlah Perangkat Daerah yang tertib kearsipan menjadi 30 Perangkat Daerah dan persentase Perangkat Daerah yang diakuisisi dokumen arsip, yakni 14 dari 72 Perangkat Daerah (19%). Pada Triwulan I Tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah yang diakuisisi bertambah 3 Perangkat Daerah, menjadi 17 Perangkat Daerah (23.6%). Perangkat Daerah yang tertib kearsipan adalah yang tetap konsisten mengelola kearsipan sesuai ketentuan yaitu telah memiliki SDM tenaga pengelola arsip, telah menggunakan program/aplikasi, telah tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan daftar arsip, dan telah memiliki sarana prasarana kearsipan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif. Realisasi indikator tersebut ditampilkan pada Tabel II. 127.

Tabel II. 127**Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Tertib Tata Kearsipan dan yang Diakuisisi Dokumen Arsip Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	N/A	24	30
2.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	8	6	3
3.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja	N/A	226	226
4.	Persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan (akumulasi)	N/A	10,70%	13.27%
5.	Persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip (akumulasi)	N/A	19%	23,61%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Untuk pengelolaan arsip sesuai dengan pola baru diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan atau yang pernah dilaksanakan. Tabel II. 128 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan, sedangkan pada tahun 2017 peningkatan SDM pengelola kearsipan juga dilaksanakan melalui pendampingan yang sekaligus evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan. Sampai dengan Triwulan I Peningkatan SDM kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan di 6 Perangkat Daerah.

Tabel II. 128**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3	3	2	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 129 dan Tabel II. 130.

Tabel II. 129
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Nilai Tambah PDRB	365.354.831,12	406.196.760,34	452.345.242,07	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	589.117,25	655.562,00	721.552,58	N/A
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,16%	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2014, sebesar 0,16% atau sebesar Rp 589.117,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp 365.354.831,12 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2015, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,16% atau sebesar Rp 655.562,00 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp 406.196.760,3 juta rupiah. Di tahun 2016, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,16% atau sebesar Rp 721.552,58 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp 452.345.242,07 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,16%. Berdasarkan data produksi perikanan pada Tabel II. 130 dapat disajikan bahwa jumlah produksi perikanan sampai dengan 2015 mengalami penurunan, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pendampingan yang intensif sehingga pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan dapat meningkat sebesar 26,01% dari tahun

2015. Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel II. 130.

Tabel II. 130
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Perikanan Laut	7.292,45	6.840,06	10.578,30	2.539,75
2.	Perikanan Tambak	6.530,32	6.785,15	6.915,03	1.210,35
3.	Perairan umum	277,02	88,49	93,38	21,65
4.	Kolam	1.025,88	1.101,27	1.116,48	98,98
5.	Jaring Apung	140,41	139,18	144,82	15,28
Jumlah		15.266,08	14.954,15	18.849,44	3.886,01

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 130 terlihat bahwa Produksi perikanan pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah pada perikanan laut yaitu pada tahun 2015 sebesar 6.840,06 ton menjadi sebesar 10.578,30 ton pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena disamping anomali cuaca pada tahun 2016 tidak begitu ekstrim sebagaimana tahun sebelumnya juga karena mulai meningkatnya kemampuan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan serta dalam mengantisipasi cuaca buruk.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 40,33 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 91,91% dari yang ditargetkan nasional yaitu 43,88 kg/kapita/th. Upaya untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya baik melalui sosialisasi/penyuluhan juga pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 131.

Tabel II. 131
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	32,06	35,2	40,33	18,67*
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	38	40	43,88	47,12
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	84,37	88	91,91	39,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II. 132 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 15.737.644 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 638.583 wisatawan sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 15.099.061 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 21.352.786 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 772.058 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 20.580.728 wisatawan.

Tabel II. 132
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	742.084	638.583	772.058	282.990
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	15.929.745	15.099.061	20.580.728	3.391.900
Jumlah		16.671.829	15.737.644	21.352.786	3.674.890

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata sebagaimana Tabel II. 132. Jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II. 133 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20

obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data pada Tabel II. 133 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tersebut pada tahun 2014 sebanyak 5.583.822 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 6.034.129 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 kunjungan wisatawan ke obyek – obyek wisata sebanyak 5.622.177 orang dan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah kawasan wisata religi Ampel. Sampai dengan triwulan 1 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 1.067.996 orang dan obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya masih kawasan religi Ampel.

Tabel II. 133
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	526.617	9,43	493.191	8,17	747.950	13,30	179.566	17,60
Kenjeran Park	670.529	12,01	715.690	11,86	549.144	9,77	N/A	N/A
Taman Prestasi	32.872	0,59	31.553	0,52	41.925	0,75	14.170	1,39
Taman Hiburan Rakyat	15.359	0,28	16.960	0,28	18.725	0,33	3.995	0,39
Taman Remaja Surabaya	382.276	6,85	354.230	5,87	157.470	2,80	27.796	2,72
Monumen Tugu Pahlawan	166.565	2,98	223.463	3,7	246.400	4,38	58.163	5,70
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.950.698	34,93	2.040.476	33,82	1.513.076	26,91	323.102	31,67
Masjid Al-Akbar	25.149	0,45	38.027	0,63	75.123	1,34	24.573	2,41
Masjid Cheng Ho	18.583	0,33	24.914	0,41	20.918	0,37	5.026	0,49
Kebun Binatang	1.121.246	20,08	1.148.465	19,03	1.157.643	20,59	253.046	24,81
Monumen Kapal Selam	18.286	0,33	181.032	3	333.122	5,93	38.252	3,75
Monumen Jalesveva Jayamahe	43.734	0,78	15.065	0,25	-	-	-	-
Loka Jala Srana	42.217	0,76	30.762	0,51	48.247	0,86	2.556	0,25
Rumah wafat WR. Soepratman	960	0,02	470	0,01	804	0,01	263	0,03
Makam DR. Soetomo	9.602	0,17	3.554	0,06	5.101	0,09	3.157	0,31
Patung Djoko Dolog	3.114	0,06	1.627	0,03	5.399	0,10	N/A	N/A
Balai Pemuda	80.241	1,44	264.875	4,39	252.299	4,49	65.783	6,45
House Of Sampoerna	176.710	3,16	194.700	3,23	212.100	3,77	19.600	1,92
Ciputra Water Park	283.722	5,08	233.388	3,87	227.704	4,05	47.931	4,49
Museum Kesehatan	15.342	0,27	21.687	0,36	9.027	0,16	1.017	0,10
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.583.822	100	6.034.129	100	5.622.177	100	1.067.996	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

2.1.3.3.3. Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 134 sampai dengan Tabel II. 135 berikut:

Tabel II. 134
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Nilai Tambah PDRB	365.354.831,12	406.196.760,34	452.345.242,07	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	82.456,89	91.158,03	98.797,92	N/A
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II. 135
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	9.424,51	11.177,96	11.799,80	4.623
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.687,00	1.760,31	2.289	893
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,59	6,35	5,16	5,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 135 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,6% dari tahun 2015 atau meningkat dari 11.177,96 ton menjadi 11.799,80 ton. Peningkatan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penambahan luas areal penanaman akibat adanya penambahan pola tanam yang semula 1 atau 2 kali tanam menjadi 2 atau 3 kali tanam dalam satu tahun. Sedangkan produktivitas justru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,35 ton/ha menjadi 5,16 ton/ha, hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas tanaman padi.

Tabel II. 136
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017*
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	9.424,51	11.177,96	11.799,80	4.623
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	366,43	948,79	519,2	97,71
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	115,43	299	406,9	167,8
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	566,37	584,81	757,2	342,46
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	10.058,57	3.726,10	4.466,57	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2016 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi, lombok dan sayur, sedangkan jagung dan buah mengalami penurunan. Produksi jagung mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman jagung karena beralih ke komoditi padi. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II. 136.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar

tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana Tabel II. 137 sampai dengan Tabel II. 139.

Tabel II. 137
Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Jenis Pasar Modern	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Factory Outlet	31	31	0	0
2	Supermarket	35	48	53	53
3	Minimarket	348	476	317	317
4	Departement Store	18	8	7	7
5	Mall/Plaza	24	33	28	28
6	Waralaba Asing	29	29	0	0
Total		603	625	405	405

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II. 138
Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Tahun			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	N/A	N/A
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	N/A	N/A
3	Nambangan/ Kenjeran	Nambangan/ Kenjeran	N/A	N/A
4	Kakahrejo	Kakahrejo	N/A	N/A
5	Dupak	Dupak	N/A	N/A

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Tabel II. 139
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Cabang	Tahun			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Selatan	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28
Total	67	67	67	67

Sumber : PD Pasar Surya, 2017

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari ijin usaha perdagangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana pada Tabel II. 140 berikut:

Tabel II. 140
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Jenis Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Perdagangan	12.803	14.666	13.670	3.977
2	Industri	303	309	275	63
T o t a l		13.106	14.975	13.945	4.040

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.

Aktivitas perdagangan dikota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II. 141.

Tabel II. 141
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Nilai Ekspor (US \$)	18.022.413.011	16.452.486.419	17.901.405.669	N/A
2	Nilai Impor (US \$)	17.056.615.375	14.888.180.928	14.849.559.537	N/A
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	965.797.636	1.564.305.491	3.051.846.132	N/A

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 tercatat surplus sebesar US \$3.051.846.132 yang lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar US \$1.564.305.491. Neraca perdagangan yang mengalami surplus tersebut didorong seiring dengan meningkatnya permintaan eksternal, dari US\$16.452.486.419 pada tahun 2015 menjadi US \$17.901.405.669 pada tahun 2016. Meningkatnya permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mendorong peningkatan net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2016.

2.1.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.4.1. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang

dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 142
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Jenis Dokumen	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel II. 143
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	58	58	79	102
2	Jumlah Program RKPD	58	60	79	102
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017

Tabel II. 144
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	89,66%	88,33%	94,94%	N/A

Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata- rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.

Tabel II. 145
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	82,66	74,35	89,29	N/A

Sumber : Bappeko diolah, 2017

2.1.3.4.2. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.2.a Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi

perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II. 146.

Tabel II. 146
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	-
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	57,48	60,2	63,08	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2015 dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2016 belum dapat diketahui karena baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak 267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II. 147
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	Tahap Pelaksanaan
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II. 148.

Tabel II. 148

Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah rancangan produk hukum	89	87	73	12
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	89	87	73	12
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum, 2017

2.1.3.4.2.b Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 149 berikut.

Tabel II. 149

Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	77,13	72,89	82,67	Tahap Pelaksanaan

Sumber: Bagian Organisasi, 2017

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori sangat puas, UPTSA Surabaya Pusat masuk kategori puas, UPTSA Surabaya Timur masuk kategori sangat puas, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 Puskesmas masuk kategori puas, 28 kecamatan masuk kategori sangat puas dan 3 kecamatan masuk kategori puas. Sedangkan 89 kelurahan masuk kategori sangat puas dan 65 kelurahan masuk kategori puas. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua unit pelayanan publik termasuk dalam kategori sangat puas. Tahun 2017 pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

2.1.3.4.2.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Kerjasama bidang perdagangan baru akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2016 terdapat 112 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 94 MoU atau 83,93% memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 8 MoU dan 6 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 120 MoU kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri, 49 MoU diantaranya telah dievaluasi. Pada triwulan I 2017, sebanyak 55 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat, dari 111 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga, atau sebesar 49,55%.

Tabel II. 150
Persentase Mou Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga
yang Memberikan Manfaat Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	28	25	96	55
2.	Jumlah keseluruhan MoU antar daerah dan pihak ketiga	29	25	112	111
3.	Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	96,55%	100%	85,71%	49,55%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

Tabel II. 151
Persentase Mou Kerjasama Luar Negeri Yang Memberikan Manfaat
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	8	8	6	3
2.	Jumlah keseluruhan MoU luar negeri	8	8	8	8
3.	Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	100%	100%	75,00%	37,50%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

Salah satu kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah di kawasan sekitar, yakni:

(1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor 181.4/2063/013/2013 dan 180/4617/436.1.2/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya
- b. Perjanjian Kerjasama Nomor 120.1/54/012/2016 dan 415.4/3194/436.2.3/2016 pada tanggal 24 Juni 2016 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

(2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui:

- a. Kesepakatan Bersama Nomor 188/16/404.1.1.2/2016 dan 415.4/9899/436.2.3/2016 pada tanggal 28 September 2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
- b. Kesepakatan Bersama Nomor 30 Tahun 1991 dan 119/057/adpum/2014 pada tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum "PURABAYA" di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

2.1.3.4.2.d Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 152 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

Tabel II. 152
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2011 – Triwulan I 2017

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2015	2016	Triw I 2017
Hukuman Disiplin Ringan				
1	Teguran Lisan	3		0
2	Teguran Tertulis	0	2	10
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	2	
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	5	4	10
Hukuman Disiplin Sedang				
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	1	2	0
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	0
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	0	1	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	3	4	0
Hukuman Disiplin Berat				
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	5	7	3
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	0	1

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2015	2016	Triw I 2017
3	Pembebasan Dari Jabatan	4	8	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	4	5	0
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	3	1	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	0		1
Jumlah Hukuman Disiplin Berat		16	21	5
Hukuman Disiplin PP 4 Tahun 1966				
d	Pemberhentian Sementara (PP. No. 04 Tahun 1966)	2	3	0
e	Pencabutan Pemberhentian Sementara	1	0	0
f	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0
g	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0
h	Rehabilitasi	0	0	0
Jumlah		3	3	0
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		27	32	15

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

2.1.3.5. Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.5.1. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II. 153 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II. 153
Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah pejabat struktural	1.654	1.645	1.638	1.609
2.	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	1.320	1.387	1.135	1.405

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
3.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	79,81%	84,32%	69,29%	87,32 %

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat konsumsi rumah tangga, produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 154
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2014	511.325	36,82	877.523	63,18	1.388.848	100
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Triwulan I 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana Tabel II. 155 berikut:

Tabel II. 155
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angkatan Kerja (orang)	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
PDRB (Juta Rp)	365.354.831,12	406.196.760,3	452.345.242,07	N/A
Produktivitas (Juta per orang)	249,30	276,68	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2017

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II. 156
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan

Uraian		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Nilai PDRB ADHB					
Transportasi dan Pergudangan		19.016.375,3	21.369.674,6	23.634.681,26	N/A
1	Angkutan Rel	151.459,0	194.327,6	233.756,50	N/A
2	Angkutan Darat	4.278.765,5	4.829.863,8	5.440.711,52	N/A
3	Angkutan Laut	2.942.710,4	3.343.306,0	3.697.317,86	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	76.754,0	84.079,4	92.817,17	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	11.566.686,5	12.918.097,7	14.170.087,20	N/A
Laju Pertumbuhan					
Transportasi dan Pergudangan		7,94	5,59	4,78	N/A
1	Angkutan Rel	15,36	16,12	9,61	N/A
2	Angkutan Darat	6,17	6,37	7,49	N/A
3	Angkutan Laut	11,82	8,71	4,07	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	6,86	5,26	4,20	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7,57	4,35	3,77	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen, dan sampai dengan triwulan I 2017, wilayah produktif Kota Surabaya seluas 23.665,80 Ha atau sebesar 93,27 persen dari luas seluruh wilayah budidaya. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II. 157
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
3	Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Tabel II. 158
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
3	Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah

sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya dan sampai dengan triwulan I 2017 sebesar 9,88 persen.

Tabel II. 159

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
3	Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2017

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.2. Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Terlihat pada tahun 2014 jumlah kendaraan sebanyak 2.285.382 kendaraan, dan menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kota Surabaya di mana pada tahun 2014 panjang jalannya mencapai sejumlah 1.679.140 meter dan pada tahun 2015 panjang jalan meningkat menjadi 1.683.116 meter saja. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Data jumlah kendaraan tahun 2016 bisa didapatkan pada pertengahan tahun 2017 dikarenakan perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) dihitung oleh BPKAD Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya) dan Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut.

Tabel II. 160
Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Panjang Jalan (m)	1.679.140	1.683.116	1.686.380,5	N/A
2	Jumlah Kendaraan	2.285.382	2.361.250	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

2.1.4.2.3. Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya sebesar 54,75 menit dan pada tahun 2015 sebesar 53,38 menit. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 161
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Lama Terjadinya Genangan	54,75	53,38	52,98	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014 rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar mencapai 16,82 cm dan pada tahun 2015 turun menjadi 16,40 cm. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm, dan sampai dengan triwulan I 2017, pekerjaan fisik masih dalam progress pelaksanaan di lapangan sehingga belum ada capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 162
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Tinggi Genangan	16,82	16,40	16,27	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017.

Berdasarkan Tabel II. 163 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 luasan wilayah genangan sebesar 1.303 ha, dan pada Tahun 2015 tercapai sebesar 1.271 ha, dan pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha. Sampai dengan triwulan I 2017, pekerjaan fisik masih dalam progress pelaksanaan di lapangan sehingga belum ada capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 163
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.303	1.271	1.257	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa

baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan smart water level di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II. 10
Perangkat Smart Water Level

2.1.4.2.4. Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II. 164 di bawah ini.

Tabel II. 164
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	2.585.137	2.997.360	3.127.782	3.137.496
2	Jumlah Penduduk*	2.790.414	3.234.925	3.274.687	3.266.218
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	92,64	92,66	95,51	96,06

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2017

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter,

pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 92,64 persen menjadi 92,66 persen pada tahun 2015. Hingga tahun 2016 cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya telah mencapai 95,51 persen dan pada triwulan I tahun 2017 mencapai 96,06 persen, selanjutnya akan terus dioptimalkan pelayanannya dalam mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100.

2.1.4.2.5. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 terus bertambah hingga 4.405 titik.

Tabel II. 165

PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah PJU (Titik)	7.216	5.320	5.293	122

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 166 berikut.

Tabel II. 166
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Bidang Politik	86	90	48	0
2	Ekonomi	91	126	126	20
3	Sosial Budaya	105	129	165	20
4	Jumlah unjuk rasa	282	345	339	40

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II. 167 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Sampai dengan tahun 2017 triwulan I Perda yang terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan belum ada karena perda tahun 2016 masih berlaku.

Tabel II. 167
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	3	2	1	1	1	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	1	3	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	1	0	0

Sumber :Bagian Hukum 2016, *)Angka Perkiraan/Sementara

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 168.

Tabel II. 168
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah lulusan S1	291.423	297.023	325.755	326.520
2	Jumlah lulusan S2	18.914	19.647	21.579	21.779
3	Jumlah lulusan S3	1.100	1.204	1.279	1.287
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	311.437	317.874	348.613	349.586
5	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,109	0,108	0,105	0,105

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

2.1.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya

beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II. 169
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	613.554	636.425	717.636	716.772
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	170.895	182.446	220.340	222.248
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	784.449	818.871	937.976	939.020
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.069.212	2.124.657	2.369.324	2.377.111
6	Rasio ketergantungan	0,379	0,385	0,396	0,395

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas Komposisi penduduk Surabaya per triwulan I Tahun 2017, berdasarkan kelompok usia non produktif usia (0-15 th) sebesar 716.772 orang (21,61%), dan usia (64+) sebesar 222.248 orang (6,70%), sedangkan kelompok usia produktifnya (15-64th) sebesar 2.377.111 orang (71,68%). Sehingga rasio ketergantungannya sebesar 0,39 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2018, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun tahun 2016, juga memperhatikan isu strategis yang dihadapi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan triwulan I 2017 dijelaskan pada Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan sebagaimana Tabel II.170 berikut.

Tabel II.170
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
Tahun 2016											
1	Urusan Pemerintahan										
1.1	Wajib										
1.1.1	Pelayanan Dasar										
1.1.1.01	Pendidikan										
1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini										
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD		99,01%	99%	49,40%	49,90%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		99,02%	61,34%	64,46%	105,09%	-	-	-	
1.1.1.01.01.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Keberhasilan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0002	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0003	Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim	Persentase Keberhasilan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Persentase Keberhasilan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100,00%	98,90%	99,97%	101,08%	-	-	-	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs		99,54%	99%	105,51%	106,57%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		105,24%	96,16%	92,34%	96,03%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		105,03%	88,25%	85,14%	96,48%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		95,02%	92,67%	83,75%	90,37%	-	-	-	
				95,03%	81,07%	81,07%	100,00%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs						-	-	-	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0%	1,08%	0,00%	200,00%	-	-	-	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0%	1,08%	0,00%	200,00%	-	-	-	
		Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik		20,91%	44,18%	65,88%	149,11%	-	-	-	
1.1.1.01.02.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.02.0002	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	-	-	100%	146%	146%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	-	-	100%	123%	123%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	-	-	100%	188%	188%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	-	-	100%	80%	80%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	-	-	100%	219%	219%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0008	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03	Program Pendidikan Menengah										
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA		0,00%	1,04%	0,01%	199,13%	-	-	-	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK		0,01%	1,04%	0,01%	198,75%	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik		21,88%	53,13%	62,50%	117,64%		-	-	
		Persentase Siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi		N/A	100%	0,00%	0,00%		-	-	
		Angka Kelulusan (AL) SMK		99,97%	97,80%	99,96%	102,21%		-	-	
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK		100,04%	97,80%	116,54%	119,16%		-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK		105,08%	87,04%	90,57%	104,06%		-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK		92,55%	81,35%	85,59%	105,21%		-	-	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/ MA		99,97%	97,80%	99,96%	102,21%		-	-	
1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	-	-	100%	19%	19%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	-	-	100%	88%	88%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.03.0005	Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0008	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa DIKMEN	-	-	100%	83%	83%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0009	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0010	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
1.1.1.01.06.0001	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Persentase Pendidik yang kompeten	-	63,81%	71,05%	73,60%	103,59%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	-	-	100%	185%	185%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0003	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	-	-	100%	300%	300%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07	Program Peningkatan Prestasi Non Akademik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	100%	189%	189%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0001	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Persentase prestasi non akademik	-	75%	78%	86,96%	111,48%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.10	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase Ketuntasan pendidikan kesetaraan		N/A	90%	100,00%	111,11%		-	-	
		Persentase Lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi		22,69%	25%	25,30%	101,20%		-	-	
1.1.1.01.10.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	-	-	100%	114%	114%	-	-	-	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.01.10.0002	Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat	-	-	100%	108%	108%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.1.02	Kesehatan										
1.1.1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin										
		Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	100%	313%	313%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak										
		Cakupan kunjungan bayi		90%	90%	93,73%	104,15%	-	-	-	
1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	-	-	100%	92%	92%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03.0002	Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
		Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20%)		14,41%	20%	16,94%	115,30%	-	-	-	
1.1.1.02.04.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu										
		Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik		34,78%	40,87%	48,39%	118,39%	-	-	-	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu		70%	72%	72,95%	101,32%	-	-	-	
1.1.1.02.06.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	-	-	100%	140%	140%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.06.0002	Operasional Pelayanan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan	-	-	100%	375%	375%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0004	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
		Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi		100%	100%	97,77%	97,77%	-	-	-	
1.1.1.02.07.0001	Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	-	-	100%	345%	345%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0003	Akreditasi Puskesmas	Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0005	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0006	Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0007	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	-	-	100%	136%	136%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0008	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0009	Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.02.07.0010	Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0011	Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	-	-	100%	200%	200%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0012	Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	-	-	100%	146%	146%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0013	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata										
		Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada		80%	80%	90,99%	113,74%		-	-	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie		70%	75%	77,58%	103,44%		-	-	
1.1.1.02.08.0001	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	-	-	100%	200%	200%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08.0003	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08.0006	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0007	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.08.0008	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08.0009	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan		80%	82%	107,14%	130,66%		-	-	
1.1.1.02.10.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.10.0002	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.10.0003	Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	-	-	100%	146%	146%	-	-	-	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.02.13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus		N/A	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan		80%	80%	94,02%	117,52%		-	-	
1.1.1.02.13.0001	Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	-	-	100%	86%	86%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0002	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	-	-	100%	201%	201%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0003	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	-	-	100%	186%	186%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0004	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0005	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0006	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	-	-	100%	1,00%	1,00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0007	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.13.0008	DAK Jampersal	Persentase Keberhasilan DAK Jampersal	-	-	100%	0%	0%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.1.03.01	Program Pengendalian Banjir										
		Tingkat Genangan		44,21%	30,7	41,95	63,34%		-	-	
1.1.1.03.01.0001	Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0002	Perencanaan Pematusan Kota	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pematusan Kota	-	-	100%	165%	165%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0003	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0004	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0005	Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	-	-	100%	119%	119%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan										
		Penambahan jalan baru		1683 m2	1000 m2	2382,00 m2	238,20%		-	-	
		Persentase jalan dalam kondisi baik		98,64%	94,95%	98,61%	103,86%		-	-	
		Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki		0%	3,80%	28,24%	743,14%		-	-	
1.1.1.03.03.0001	Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	-	-	100%	133%	133%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0003	Koordinasi Jaringan Utilitas	Persentase Keberhasilan Koordinasi Jaringan Utilitas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0004	Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	-	-	100%	140%	140%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.03.03.0005	Pembangunan Kelengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Kelengkapan Jalan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0006	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0007	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya	-	-	100%	78%	78%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0008	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan										
		Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih		N/A	2000 m	0,00 m	0,00%		-	-	
1.1.1.03.04.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	-	-	100%	0%	0%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04.0002	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	Persentase Keberhasilan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	-	-	100%	0%	0%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05	Program Utilitas Perkotaan										
		Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan		2365920 meter	2431470 meter	2540910,00 meter	104,50%		-	-	
		Persentase lama perbaikan PJU padam <6 jam		N/A	64%	79,86%	124,78%		-	-	
		Persentase penggunaan LED untuk PJU		8,75%	13%	39,52%	304,03%		-	-	
1.1.1.03.05.0001	Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.1.03.05.0002	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	-	-	100%	144%	144%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.1.03.08	Program Penataan Ruang										
		proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota		10%	20%	100,00%	500,00%		-	-	
1.1.1.03.08.0001	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.1.1.03.08.0002	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	-	-	100%	127%	127%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0003	Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.03.08.0004	Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.03.08.0005	Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.03.08.0006	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0007	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0008	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	-	-	100%	143%	143%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0009	Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	-	-	100%	192%	192%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.03.08.0010	Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	Persentase Keberhasilan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0011	Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	-	-	100%	140%	140%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0012	Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0013	Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.03.08.0014	Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Persentase Keberhasilan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	-	-	100%	300%	300%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.03.08.0015	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.1.1.03.08.0016	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.08.0017	Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	-	-	100%	87%	87%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Permukiman										
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni		3479 KK	3691 KK	3706,00 KK	100,41%		-	-	
		Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana		120,06 Ha	591,51 Ha	674,04 Ha	113,95%		-	-	
1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	-	-	100%	58%	58%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematatan
1.1.1.04.01.0002	Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	-	-	100%	130%	130%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.1.04.01.0003	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0004	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0005	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05	serta Perlindungan Masyarakat										
1.1.1.05.01	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										
		Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.1.05.01.0002	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	-	-	100%	370%	370%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	410%	410%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.1.05.01.0013	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	-	-	100%	66%	66%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.05.01.0018	Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Persentase Keberhasilan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	-	-	100%	136%	136%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.1.05.01.0023	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0024	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	-	-	100%	127%	127%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0025	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Kec. Rungkut
1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.1.05.01.0032	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.1.05.01.0033	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.1.05.01.0034	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.1.05.01.0035	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.05.01.0036	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.1.05.01.0037	Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.1.05.01.0038	Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.1.05.03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										
		Persentase tertanganinya konflik di masyarakat		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.1.05.03.0001	Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	-	-	100%	207%	207%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0004	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0005	Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0006	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Persentase Keberhasilan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0008	Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas	-	-	100%	87%	87%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.05	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran										
		Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran		6459 orang	7427 Orang	10284,00 Orang	138,47%		-	-	
		Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit		99%	90%	100,00%	111,11%		-	-	
		Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal		64%	66%	73,08%	110,72%		-	-	
		Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.1.05.05.0001	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	100%	83%	83%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.05.0002	Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.05.0003	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05.05.0004	Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Persentase Keberhasilan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	-	-	100%	249%	249%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.05.0005	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.05.0006	Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.05.0007	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Dinas Kebakaran
1.1.1.06	Sosial										
1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial										
		Persentase PMKS yang ditangani		70%	60%	60,67%	101,11%		-	-	
1.1.1.06.01.0001	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0002	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat	Persentase Keberhasilan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0004	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0005	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0006	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.06.01.0007	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0008	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0009	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0010	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0011	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0012	Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia	-	-	100%	86%	86%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0013	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0014	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0015	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0016	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0017	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	-	-	100%	83%	83%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0018	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0019	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0020	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0021	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0022	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0023	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0024	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	71%	71%	-	-	-	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0025	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0026	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0027	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0028	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	-	-	100%	76%	76%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0029	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0030	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0031	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0032	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	195%	195%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0033	Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu	Persentase Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.06.01.0034	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0035	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0036	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0037	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0038	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0039	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0040	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0041	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0042	Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial										
		Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan		N/A	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	-	-	100%	87%	87%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0002	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.1.06.02.0003	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0004	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	-	-	100%	72%	72%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0005	Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Sosial
1.1.2	Non Pelayanan Dasar										
1.1.2.01	Tenaga Kerja										
1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
		Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja		68%	40%	50,69%	126,73%		-	-	
1.1.2.01.01.0001	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Persentase Keberhasilan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	-	-	100%	92%	92%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0002	Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	-	-	100%	200%	200%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0003	Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja	Persentase Keberhasilan Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0004	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0005	Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas										
		Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi		62%	50%	64,32%	128,63%		-	-	
1.1.2.01.02.0001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja										
		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama		6,26%	6,51%	6,70%	102,99%		-	-	
1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	100%	115%	115%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan										
		Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3		25,84%	33%	40,48%	122,66%		-	-	
1.1.2.01.04.0001	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	-	-	100%	70%	70%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	100%	30%	30%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.02	Perlindungan Anak										
1.1.2.02.02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak										
		Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi		87%	93%	100,00%	107,53%		-	-	
		Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi		86%	86%	85,71%	99,67%		-	-	
		Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.2.02.02.0001	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
1.1.2.02.02.0002	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.02.02.0003	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.02.02.0004	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.2.02.02.0007	Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.2.02.02.0014	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.2.02.02.0022	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.02.02.0023	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Persentase Keberhasilan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.2.03	Pangan										
1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)										
		Persentase tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Tingkat Keamanan Produk Pangan		82%	80%	94,19%	117,74%	-	-	-	
1.1.2.03.01.0001	Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif	Persentase Keberhasilan Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0002	Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0003	Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0004	Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase Keberhasilan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0005	Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan	-	-	100%	58%	58%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0007	Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.1.2.04	Pertanahan										
1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum										
		Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		N/A	43367 m2	29794,00 m2	68,70%	-	-	-	
1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	-	-	100%	37%	37%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0002	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0003	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	-	-	100%	115%	115%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.01.0004	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota										
		Rasio aset pemkot yang tersertifikat		49%	55,72%	47,48%	85,21%	-	-	-	
1.1.2.04.02.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0002	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0003	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.05	Lingkungan Hidup										
1.1.2.05.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
		Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada		34,56%	41,15%	36,88%	89,63%	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.01.0001	Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.1.2.05.01.0002	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.1.2.05.01.0003	Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	-	-	100%	123%	123%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0005	Pengembangan Dekorasi Kota	Persentase Keberhasilan Pengembangan Dekorasi Kota	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0006	Penataan RTH	Persentase Keberhasilan Penataan RTH	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03	Program Pengelolaan Kebersihan Kota										
		Cakupan Layanan Kebersihan		185 TPS	187 TPS	187,00 TPS	100,00%	-	-	-	
		Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA		1477,65 ton/hari	1400 ton/hari	1571,31 ton/hari	87,76%	-	-	-	
		Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS		3940,43 m3/hari	3500 m3/hari	4458,88 m3/hari	127,40%	-	-	-	
1.1.2.05.03.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.05.03.0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.2.05.03.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.2.05.03.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.2.05.03.0005	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	2,00%	2,00%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.2.05.03.0006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.2.05.03.0007	Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Persentase Keberhasilan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0008	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.2.05.03.0009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.2.05.03.0010	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.05.03.0011	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
1.1.2.05.03.0012	Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.03.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.05.03.0014	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	-	-	100%	85%	85%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.2.05.03.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.2.05.03.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.2.05.03.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.2.05.03.0019	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	-	100%	271%	271%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0020	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	-	-	100%	164%	164%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0021	Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	Persentase Keberhasilan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.2.05.03.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.2.05.03.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	1,33%	1,33%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.05.03.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.2.05.03.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.05.03.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.2.05.03.0028	Operasional Pengolahan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengolahan Sampah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
1.1.2.05.03.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.2.05.03.0031	Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.03.0032	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	-	-	100%	182%	182%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0033	Operasional Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengangkutan Sampah	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.2.05.03.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.2.05.03.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0037	Operasional Penyapuan Jalan	Persentase Keberhasilan Operasional Penyapuan Jalan	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.2.05.03.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.2.05.03.0040	Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.03.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
1.1.2.05.03.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.2.05.03.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.2.05.03.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.2.05.05	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
		Tingkat kualitas air limbah domestik TSS		55,26%	55%	56,26%	102,30%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah hotel BOD		58,42%	57%	57,42%	100,74%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah hotel COD		47,05%	47%	48,10%	102,34%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah hotel TSS		52,58%	51%	52,66%	103,26%		-	-	
				77,91%	77%	78,07%	101,39%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah industri BOD							-	-	
		Tingkat kualitas air limbah industri COD		71,77%	71%	72,49%	102,10%		-	-	
				74,07%	73%	74,37%	101,87%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah industri TSS							-	-	
		Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD		72,09%	71%	72,59%	102,24%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah rumah sakit COD		72,65%	71%	71,44%	100,61%		-	-	
		Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS		74,01%	73%	74,61%	102,21%		-	-	
		Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2		86,24%	86%	86,77%	100,90%		-	-	
		Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2		87,15%	86%	88,19%	102,55%		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Tingkat kualitas air limbah domestik BOD		56,02%	53%	53,69%	101,30%		-	-	
1.1.2.05.05.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0002	Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0003	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Car Free Day	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0005	Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0006	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	100%	175%	175%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0007	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.05.05.0008	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0009	Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0010	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0011	Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0012	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Limbah	-	-	100%	158%	158%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0013	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase Keberhasilan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0014	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	100%	128%	128%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05.0015	Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.07	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi										
		Jumlah perusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan		1 kegiatan	4 kegiatan	4,00 kegiatan	100,00%		-	-	
1.1.2.05.07.0001	Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.07.0002	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	-	-	100%	300%	300%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.05.07.0003	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.06	Pencatatan Sipil										
1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
		cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)		99,55%	99,56%	99,12%	99,56%		-	-	
		cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)		70%	85,51%	96,68%	113,06%		-	-	
		Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran dan akte kematian)		89,00%	93,91%	95,56%	101,75%		-	-	
		Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)		70%	85%	100,00%	117,65%		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)		45,54%	99,56%	50,43%	50,65%		-	-	
1.1.2.06.01.0001	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	86%	86%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.2.06.01.0002	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.2.06.01.0003	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.2.06.01.0004	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.06.01.0005	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.2.06.01.0006	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.2.06.01.0007	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.06.01.0008	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.2.06.01.0009	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.2.06.01.0018	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.2.06.01.0021	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	-	-	100%	275%	275%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0027	Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	500%	500%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	86%	86%	-	-	-	Kec. Rungkut
1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.2.08	Berencana										
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana										
		Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif		75,00%	76,32%	82,00%	107,44%		-	-	
1.1.2.08.01.0001	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0002	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keluarga Berencana	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	-	-	100%	112%	112%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	-	-	100%	25%	25%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif		14,22%	23,90%	24,96%	104,43%		-	-	
1.1.2.08.02.0001	Pembinaan Ketahanan keluarga	Persentase Keberhasilan Pembinaan Ketahanan keluarga	-	-	100%	133%	133%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat										
		Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya		(859 kelompok)	1%	2,85%	284,85%		-	-	
		Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
1.1.2.08.03.0001	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.08.03.0002	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
1.1.2.08.03.0003	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.08.03.0004	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
1.1.2.08.03.0005	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
1.1.2.08.03.0006	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
1.1.2.08.03.0007	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
1.1.2.08.03.0008	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0009	Bulan Bhakti Gotong Royong	Persentase Keberhasilan Bulan Bhakti Gotong Royong	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0010	Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0011	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
1.1.2.08.03.0012	Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Dinamisasi Data Keluarga Miskin	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0013	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	-	-	100%	112%	112%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0015	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
1.1.2.08.03.0016	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
1.1.2.08.03.0017	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.08.03.0018	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
1.1.2.08.03.0019	Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	Persentase Keberhasilan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
1.1.2.08.03.0020	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
1.1.2.08.03.0021	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
1.1.2.08.03.0022	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.08.03.0023	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.08.03.0024	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
1.1.2.08.03.0025	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
1.1.2.08.03.0026	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.08.03.0027	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
1.1.2.08.03.0028	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
1.1.2.08.03.0029	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
1.1.2.08.03.0030	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
1.1.2.08.03.0031	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
1.1.2.08.03.0032	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
1.1.2.08.03.0033	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
1.1.2.08.03.0034	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
1.1.2.08.03.0035	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
1.1.2.08.03.0036	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
1.1.2.08.03.0037	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.03.0038	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
1.1.2.08.03.0039	Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
1.1.2.09	Perhubungan										
1.1.2.09.01	Program Pengembangan Sistem Transportasi										
		Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)		27%	35,54%	30,96%	87,12%		-	-	
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer		28,88 km/jam	30 km/jam	27,86 km/jam	94,77%		-	-	
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder		28,79 km/jam	30 km/jam	27,47 km/jam	91,70%		-	-	
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Angkot)		26,21 menit	25,91 menit	26,50 menit	97,72%		-	-	
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota)		43,86 menit	43,32 menit	44,67 menit	96,89%		-	-	
1.1.2.09.01.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0002	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	100%	90%	90%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0004	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	-	-	100%	216%	216%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0005	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0008	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0009	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	100%	147%	147%	-	-	-	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.09.01.0010	Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0011	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0012	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	-	-	100%	61%	61%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	-	-	100%	90%	90%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0014	Operasional Bis Sekolah	Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0015	Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)	-	-	100%	67%	67%	-	-	-	Dinas Perhubungan
1.1.2.10	Persandian										
1.1.2.10.01	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
		Persentase layanan publik yang berbasis TIK		27%	46,10%	53,25%	115,50%		-	-	
1.1.2.10.01.0001	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0002	Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.2.10.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0005	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0006	Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0008	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0009	Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.03	Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat										
		Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat		81%	83%	86,50%	104,22%		-	-	
1.1.2.10.03.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.03.0002	Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.03.0003	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.04	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										
		Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi		2000 kunjungan/peserta	57154 kunjungan/peserta	71736,00 kunjungan/peserta	125,51%		-	-	
		Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id		155262 kunjungan	199768 kunjungan	218082,00 kunjungan	109,17%		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.10.04.0001	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	-	-	100%	145%	145%	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.1.2.10.04.0002	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.04.0003	Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.04.0004	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.04.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.04.0006	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1.1.2.11.01	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										
		Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan		761 pedagang	810 Pedagang	955,00 Pedagang	117,90%	-	-	-	
		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan		Rp. 62.323 Juta	68555 Rp (Juta)	69398,19 Rp (Juta)	101,23%	-	-	-	
		Akumulasi volume usaha mikro binaan		Rp. 2.662 Juta	2928 Rp (Juta)	3222,01 Rp (Juta)	110,04%	-	-	-	
		Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Persentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat		N/A	20%	20,80%	104,00%	-	-	-	
		Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan		Rp. 35.910 juta	10%	31,24%	312,45%	-	-	-	
		Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan		Rp 765 juta	10%	36,22%	362,20%	-	-	-	
1.1.2.11.01.0001	Fasilitasi Pengembangan UKM	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan UKM	-	-	100%	79%	79%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0002	Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0003	Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Persentase Keberhasilan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.11.01.0004	Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	-	-	100%	126%	126%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0005	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0007	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil	-	-	100%	135%	135%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0008	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0009	Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0010	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0011	Penataan Tempat Berusaha (Sentra)	Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra)	-	-	100%	156%	156%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.11.01.0012	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.11.04	Program Peningkatan Kualitas Koperasi										
		Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas		(268 koperasi)	15%	19,78%	131,84%		-	-	
		Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi		0%	6%	18,99%	316,46%		-	-	
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif		0%	1%	2,69%	269,03%		-	-	
		Tingkat Pertumbuhan anggota koperasi		252645 orang	0,39%	3,62%	929,04%		-	-	
1.1.2.11.04.0001	Pembinaan SDM Koperasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0002	Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0003	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan	-	-	100%	81%	81%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0004	Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0005	Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi	-	-	100%	81%	81%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0006	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0007	Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0008	Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0009	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.12	Penanaman Modal										
1.1.2.12.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi										
		Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi		24037 ijin	6%	20,26%	337,74%		-	-	
1.1.2.12.02.0001	Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	-	-	100%	165%	165%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.02.0002	Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	-	-	100%	199%	199%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.02.0003	Pengembangan Potensi Investasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Potensi Investasi	-	-	100%	450%	450%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.02.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Investasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.02.0005	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.12.02.0006	Pelayanan UPTSA	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTSA	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga										
1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan										
		Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan		5 orang	10 Orang	13,00 Orang	130,00%	-	-	-	
		Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri		5 orang	10 Orang	36,00 Orang	360,00%	-	-	-	
		Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan		10915 orang	11615 Orang	9802,00 Orang	84,39%	-	-	-	
1.1.2.13.01.0001	Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri	Persentase Keberhasilan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0002	Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0003	Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0004	Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0005	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0006	Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0007	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olah Raga										
		Akumulasi Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya		48 Jenis	53 Jenis	53,00 Jenis	100,00%	-	-	-	
		Akumulasi Prasarana Olahraga yang dikembangkan		282 lokasi	322 Lokasi	346,00 Lokasi	107,45%	-	-	-	
		Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga		1937 orang	1937 Orang	2433,00 Orang	125,61%	-	-	-	
1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0003	Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0004	Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase Keberhasilan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0005	Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi	Persentase Keberhasilan Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi	-	-	100%	81%	81%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0006	Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0007	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0008	Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0009	Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo	Persentase Keberhasilan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.13.02.0010	Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	-	-	100%	35%	35%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0011	Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.14	Statistika										
1.1.2.16	Kebudayaan										
1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya										
		persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik		91,50%	91,50%	91,58%	100,08%		-	-	
1.1.2.16.01.0001	Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02	Program Pengelolaan Keragaman Budaya										
		Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi		36%	40%	41,97%	104,92%		-	-	
1.1.2.16.02.0001	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-	100%	106%	106%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.17	Perpustakaan										
1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
		Rata-rata kunjungan layanan baca per bulan		187172 kunjungan/bulan	205889 Kunjungan/bulan (2.470.670 Kunjungan)	396869,83 Kunjungan/bulan (2.470.670 Kunjungan)	192,76%		-	-	
1.1.2.17.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0002	Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Persentase Keberhasilan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0003	Pengelolaan Layanan Baca	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Layanan Baca	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0004	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18	Kearsipan										
1.1.2.18.01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan										
		Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan		0%	10,70%	10,71%	100,13%		-	-	
1.1.2.18.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Sistem Kearsipan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18.01.0002	Layanan Informasi Kearsipan	Persentase Keberhasilan Layanan Informasi Kearsipan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18.01.0003	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	-	-	100%	168%	168%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.18.02	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah										
		Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip		11%	19%	19,44%	102,34%		-	-	
1.1.2.18.02.0001	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18.02.0002	Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.2	Pilihan										
1.2.2	Non Pelayanan Dasar										
1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan										
1.2.2.01.01	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Produktivitas Hasil Olahan Perikanan		10,76 ton/orang	14,16 Ton/Orang	14,58 Ton/Orang	102,97%		-	-	
		Produktivitas Usaha Garam		74,06 ton/ha	81,47 Ton/Ha	1,60 Ton/Ha	1,96%		-	-	
1.2.2.01.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.01.01.0002	Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.01.02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap										
		Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)		3,18 ton/orang	3,2 Ton/Orang	4,67 Ton/Orang	145,88%		-	-	
1.2.2.01.02.0001	Pembinaan dan Pengembangan Nelayan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan	-	-	100%	53%	53%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.01.03	Program Pengembangan Perikanan Budidaya										
		Produktivitas budidaya perikanan		2,11 ton/ha	2,13 Ton/Ha	2,77 Ton/Ha	129,86%		-	-	
1.2.2.01.03.0001	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat	-	-	100%	52%	52%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.02	Pariwisata										
1.2.2.02.01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
		Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan		53.215 wisatawan/ bulan	64333 wisatawan/bulan	64338,17 wisatawan/bulan	100,01%		-	-	
		Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan		1.258.255 wisatawan/ bulan	1373168 wisatawan/bulan	1715060,00 wisatawan/bulan	124,90%		-	-	
1.2.2.02.01.0001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0002	Penyelenggaraan Festival Kuliner	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Festival Kuliner	-	-	100%	78%	78%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0003	Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0004	Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0005	Penyelenggaraan Event Wisata	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Event Wisata	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0006	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
		Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan		276 wisatawan/ bulan	500 wisatawan/bulan	1177,58 wisatawan/bulan	235,52%		-	-	
		Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan		256.595 wisatawan/ bulan	258333 wisatawan/bulan	319452,00 wisatawan/bulan	123,66%		-	-	
1.2.2.02.02.0001	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0002	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0003	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan	-	-	100%	112%	112%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.03	Pertanian										
1.2.2.03.01	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan										
		Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya		42,25%	75%	90,35%	120,47%		-	-	
		Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani		80%	80%	69,68%	87,10%		-	-	
1.2.2.03.01.0001	Penyediaan bibit	Persentase Keberhasilan Penyediaan bibit	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.03.01.0002	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sumber Daya Pertanian	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.03	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
		Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan		3,16 Ton/Ha	3,73 Ton/Ha	4,63 Ton/Ha	124,08%		-	-	
1.2.2.03.03.0001	Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan	-	-	100%	227%	227%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.03.0002	Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan	Persentase Keberhasilan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan	-	-	100%	176%	176%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.03.0003	Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan	-	-	100%	119%	119%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak										
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan		21,43%	28,62%	28,69%	100,25%		-	-	
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi		86,72%	89,69%	89,75%	100,07%		-	-	
1.2.2.03.05.0001	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	-	-	100%	117%	117%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.05.0002	Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	-	-	100%	402%	402%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.06	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
		Produktivitas di bidang peternakan		1 Ekor/ Kelompok	2 Ekor/Kelompok	2,00 Ekor/Kelompok	100,00%		-	-	
1.2.2.03.06.0001	Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyebaran dan Pengembangan Ternak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.03.06.0002	Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pertanian
1.2.2.06	Perdagangan										
1.2.2.06.02	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan										
		Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur		0%	15%	22,03%	146,85%		-	-	
		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur		3%	3%	29,05%	968,49%		-	-	
1.2.2.06.02.0001	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal	-	-	100%	160%	160%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.02.0002	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	-	-	100%	130%	130%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.02.0003	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Penunjang Urusan Pemerintahan										
2.1	Fungsi Manajemen										
2.1.2	Non Pelayanan Dasar										
2.1.2.01	Pengembangan										
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi		80%	88%	97,75%	111,08%		-	-	
		Persentase Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis		60%	60%	100,00%	166,67%		-	-	
2.1.2.01.02.0001	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0002	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0003	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	-	-	100%	81%	81%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0005	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.01.02.0006	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0007	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0008	Evaluasi LAKIP SKPD	Persentase Keberhasilan Evaluasi LAKIP SKPD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.01.02.0009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0010	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0011	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0012	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0013	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0014	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0015	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0016	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	-	-	100%	120%	120%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0017	Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	-	-	100%	198%	198%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0018	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0019	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0020	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0021	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0022	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0023	Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0025	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0026	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0027	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0028	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0029	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0030	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0031	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0032	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0033	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0034	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0035	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0036	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0037	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0038	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0039	Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0040	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0041	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0042	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0043	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0044	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0045	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0046	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0047	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0048	Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0049	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0050	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0051	Evaluasi Program Bidang Kesehatan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesehatan	-	-	100%	131%	131%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0052	Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Persentase Keberhasilan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0053	Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Persentase Keberhasilan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.02	Keuangan										
2.1.2.02.01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu		94%	100%	89,19%	89,19%	-	-	-	
		Persentase laporan aset/ barang daerah diterbitkan tepat waktu		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Rata-rata Peningkatan PAD		0%	10%	11,70%	117,04%	-	-	-	
		Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah		0%	3,44%	2,95%	85,61%	-	-	-	
2.1.2.02.01.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	-	-	100%	194%	194%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
2.1.2.02.01.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0003	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	-	-	100%	125%	125%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0004	Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan	Persentase Keberhasilan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan	-	-	100%	300%	300%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0005	Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.02.01.0006	Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0007	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan	-	-	100%	65%	65%	-	-	-	Dinas Kebakaran
2.1.2.02.01.0008	Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.02.01.0009	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.1.2.02.01.0010	Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0011	Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Perlengkapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.02.01.0012	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0013	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.2.02.01.0014	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0015	Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.02.01.0016	Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	Persentase Keberhasilan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0017	Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Persentase Keberhasilan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0018	Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0019	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0020	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Persentase Keberhasilan Penyusunan Bahan Anggaran Kas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0021	Inventarisasi Aset / Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Aset / Barang Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.1.2.02.01.0022	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	-	-	100%	377%	377%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.2.02.01.0023	Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.02.01.0024	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	-	-	100%	115%	115%	-	-	-	Dinas Perhubungan
2.1.2.02.01.0025	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0026	Pengelolaan Parkir	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir	-	-	100%	136%	136%	-	-	-	Dinas Perhubungan
2.1.2.02.01.0027	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.03	Koordinasi Perangkat Daerah										
2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan										
		Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP		49%	44%	81,16%	184,44%		-	-	
		Persentase SKPD yang Tidak Terjadi Tumpang Tindih pada Tugas Pokok dan Fungsinya		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
2.1.2.03.01.0001	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0003	Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0004	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.01.0005	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0006	Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0007	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan										
		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Persentase Produk hukum yang disebarluaskan		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
2.1.2.03.02.0001	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Kesenjangan Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Keberhasilan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Kesenjangan Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0002	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	100%	142%	142%	-	-	-	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	-	100%	123%	123%	-	-	-	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0004	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0005	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hukum
2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom										
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
2.1.2.03.03.0001	Operasional Kelurahan Rangkah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rangkah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0002	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Siwalankerto	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0003	Operasional Kelurahan Banjarsugihan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banjarsugihan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0004	Operasional Kelurahan Kedurus	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedurus	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0005	Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	-	-	100%	52%	52%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0006	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukomanunggal	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumur Welut	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Bubutan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bubutan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babat Jerawat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Tandes	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tandes	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Wedi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Ngagel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Ampel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ampel	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Sidotopo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokusumo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0019	Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Persentase Keberhasilan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	-	-	100%	78%	78%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Warugunung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Warugunung	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawunggaling	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Babatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Jagir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jagir	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Margorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Margorejo	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0026	Lomba Kelurahan Berhasil	Persentase Keberhasilan Lomba Kelurahan Berhasil	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Morokrembangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0029	Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Jaya	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0031	Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0032	Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Kendangsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kendangsari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Ayu	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genting Kalianak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Utara	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nyamplungan	-	-	100%	128%	128%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Perak Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Utara	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Kebraon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebraon	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Bulak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Bongkaran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bongkaran	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Gunungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunungsari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Gununganyar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Kulon	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Karah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Kutisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kutisari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	-	-	100%	114%	114%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Ketintang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketintang	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Sawahan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Romokalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Romokalisari	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Jepara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jepara	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Kapasan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Panjati	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Panjati	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menanggal	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0059	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Pegirian	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pegirian	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Perak Timur	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Timur	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Benowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Benowo	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Keputran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lakarsantri	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Putat Gede	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Gede	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Kebonsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebonsari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Gayungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gayungan	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Simokerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simokerto	-	-	100%	224%	224%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Simolawang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simolawang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Tambakrejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambakrejo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Asemrowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Asemrowo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Kandangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kandangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Simomulyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Balongsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balongsari	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Karangpoh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpoh	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Wetan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Tandes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Cowek	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Genteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genteng	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Kapasari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Ketabang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketabang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Peneleh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Peneleh	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Sidodadi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidodadi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Sememi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sememi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Airlangga	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Airlangga	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Barata Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Barata Jaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Kertajaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kertajaya	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Mojo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mojo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pucang Sewu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Klampisngasem	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Klampisngasem	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banyu Urip	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Darmo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Darmo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Balas Klumprik	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balas Klumprik	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Wonokromo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokromo	-	-	100%	159%	159%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Petemon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Petemon	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Sidosermo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidosermo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Pagesangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pagesangan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kupang Krajan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Gubeng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gubeng	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanjungsari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Jambangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jambangan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakis	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Wiyung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wiyung	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Bangkingan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bangkingan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Gading	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gading	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Jeruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jeruk	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Karangpilang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpilang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Baruk	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalirungkut	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Gundih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gundih	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Kulon	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	-	-	100%	92%	92%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Semampir	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Semolowaru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Semolowaru	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputih	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gebang Putih	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Wetan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Pakal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakal	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumber Rejo	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Bringin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bringin	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kenjeran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Dupak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dupak	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Perak Barat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Barat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Lontar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lontar	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Made	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Made	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Sambikerep	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sambikerep	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sonokwijenan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kalijudan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalijudan	-	-	100%	2,30%	2,30%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bendul Merisi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Kalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalisari	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedungdoro	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Tegalsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tegalsari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak Banteng	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	-	-	100%	110%	110%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Kemayoran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kemayoran	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mulyorejo	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Setro	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Keling	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Kembang	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Ploso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ploso	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Tambaksari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambaksari	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0160	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0161	Operasional Kelurahan Ujung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ujung	-	-	100%	128%	128%	-	-	-	Kec. Semampir
2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah										
		Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar		N/A	50%	100,00%	200,00%		-	-	
		Persentase kajian/ rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan		0%	25%	25,00%	100,00%		-	-	
2.1.2.03.04.0001	Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.03.04.0002	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.03.06	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										
		Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
2.1.2.03.06.0001	Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan	Persentase Keberhasilan Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Persentase Keberhasilan Informasi dan Pengolahan Data	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0003	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	100%	159%	159%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Persentase Keberhasilan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	-	-	100%	316%	316%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0005	Rapat-rapat Paripurna	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Paripurna	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0006	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	-	-	100%	70%	70%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0007	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Keberhasilan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	100%	128%	128%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0008	Pengkajian/ Penelaahan Kebijakan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengkajian/ Penelaahan Kebijakan Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06.0009	Kegiatan Reses	Persentase Keberhasilan Kegiatan Reses	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
		Persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
2.1.2.03.08.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Bagian Umum dan Protokol
2.1.2.03.08.0002	Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	-	-	100%	254%	254%	-	-	-	Bagian Umum dan Protokol
2.1.2.03.10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah										
		Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat		100%	80%	85,71%	107,14%		-	-	
		Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat		100%	50%	75,00%	150,00%		-	-	
		Persentase MoU yang dievaluasi		0%	22,22%	32,35%	145,60%		-	-	
2.1.2.03.10.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	-	-	100%	133%	133%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.10.0002	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	-	-	100%	75%	75%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.10.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.10.0004	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	-	-	100%	150%	150%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.10.0005	Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	Persentase Keberhasilan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.10.0006	Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	-	-	100%	110%	110%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.1.2.04	Pengawasan										
2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
		Persentase Penanganan Pengaduan		100%	100%	100,00%	100,00%		-	-	
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan		100%	89,80%	83,62%	93,11%		-	-	
2.1.2.04.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0002	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0003	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0008	Penerapan Disiplin Pegawai	Persentase Keberhasilan Penerapan Disiplin Pegawai	-	-	100%	170%	170%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.04.01.0009	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.1.2.04.01.0010	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	Persentase Keberhasilan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Inspektorat
2.2	Unsur Manajemen										
2.2.2	Non Pelayanan Dasar										
2.2.2.01	Pelatihan										
2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Persentase data pada Sistem Kepegawaian yang update		100%	100%	100,00%	100,00%	-	-	-	
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		12,95%	22,11%	24,36%	110,16%	-	-	-	
		Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural		84,32%	85,84%	69,29%	80,72%	-	-	-	
2.2.2.01.01.0001	Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0003	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	-	-	100%	108%	108%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0004	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	-	-	100%	500%	500%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0005	Ujian Dinas Tingkat I	Persentase Keberhasilan Ujian Dinas Tingkat I	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0006	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Sistem Data Pegawai	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0007	Penataan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Penataan Administrasi Kepegawaian	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0008	Tes Kesehatan bagi Pegawai	Persentase Keberhasilan Tes Kesehatan bagi Pegawai	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0009	Pembinaan Kinerja Pegawai	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kinerja Pegawai	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0010	Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	Persentase Keberhasilan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	-	-	100%	469%	469%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0011	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-	100%	110%	110%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0012	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Persentase Keberhasilan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0013	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	-	-	100%	116%	116%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran										
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		N/A	70%	77,34%	110,48%	-	-	-	
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	162%	162%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	237%	237%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	58%	58%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	92%	92%	-	-	-	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	72%	72%	-	-	-	Dinas Sosial
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Dinas Pertanian
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	108%	108%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	526%	526%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	90%	90%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	70%	70%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebakaran
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	118%	118%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	167%	167%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.01.0001		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.2.02.01.0002		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	76%	76%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0002		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.2.2.02.01.0002		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	143%	143%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	86%	86%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	88%	88%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	93%	93%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Kec. Semampir
2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	77%	77%	-	-	-	Kec. Bulak
2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	111%	111%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	1,28%	1,28%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	173%	173%	-	-	-	Kec. Genteng
2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Kec. Tandes
2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Kec. Benowo
2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Inspektorat
2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	118%	118%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	107%	107%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Kec. Pakal
2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	214%	214%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	229%	229%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	89%	89%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	495%	495%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	123%	123%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	84%	84%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hukum
2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	130%	130%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	85%	85%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	90%	90%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.2.2.02.02	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur										
		Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik		68,91%	75%	76,51%	102,01%		-	-	
		Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana		86,87%	90%	96,18%	106,87%		-	-	
2.2.2.02.02.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0002	Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	Persentase Keberhasilan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	100%	129%	129%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0005	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	-	-	100%	102%	102%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur		N/A	70%	74,24%	106,06%		-	-	
		Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik		38,46%	67,95%	71,18%	104,75%		-	-	
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	114%	114%	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
2.2.2.02.03.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Benowo
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	74%	74%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	589%	589%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	94%	94%	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	127%	127%	-	-	-	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	81%	81%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Badan Lingkungan Hidup
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	149%	149%	-	-	-	Dinas Sosial
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Dinas Pertanian
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Kebakaran
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	101%	101%	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	123%	123%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	471%	471%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	103%	103%	-	-	-	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.03.0001	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	120%	120%	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	92%	92%	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Hukum
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	144%	144%	-	-	-	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	200%	200%	-	-	-	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	151%	151%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.03.0002	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	186%	186%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.03.0003	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.03.0004	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.03.0005	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Pakal
2.2.2.02.03.0006	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	131%	131%	-	-	-	Kec. Bubutan
2.2.2.02.03.0007	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.03.0008	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.03.0009	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	78%	78%	-	-	-	Kec. Wiyung
2.2.2.02.03.0010	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.03.0011	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	96%	96%	-	-	-	Bagian Kerjasama
2.2.2.02.03.0012	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	127%	127%	-	-	-	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.03.0013	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.03.0014	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gubeng
2.2.2.02.03.0015	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	Kec. Simokerto
2.2.2.02.03.0016	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	185%	185%	-	-	-	Inspektorat
2.2.2.02.03.0017	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	105%	105%	-	-	-	Kec. Jambangan
2.2.2.02.03.0018	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Gayungan
2.2.2.02.03.0019	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	90%	90%	-	-	-	Kec. Lakarsantri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.03.0020	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Rungkut
2.2.2.02.03.0021	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.2.2.02.03.0022	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	127%	127%	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.2.2.02.03.0023	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	710%	710%	-	-	-	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.03.0024	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.03.0025	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	68%	68%	-	-	-	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.03.0026	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	98%	98%	-	-	-	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.03.0027	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	289%	289%	-	-	-	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.03.0028	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	91%	91%	-	-	-	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.03.0029	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Sawahan
2.2.2.02.03.0030	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	294%	294%	-	-	-	Bagian Bina Program
2.2.2.02.03.0031	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	122%	122%	-	-	-	Kec. Bulak
2.2.2.02.03.0032	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	113%	113%	-	-	-	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.03.0033	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	104%	104%	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0034	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	251%	251%	-	-	-	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.2.2.02.03.0035	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	99%	99%	-	-	-	Kec. Tandes
2.2.2.02.03.0036	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Kec. Genteng
2.2.2.02.03.0037	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	114%	114%	-	-	-	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.03.0038	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	216%	216%	-	-	-	Kec. Krembangan
2.2.2.02.03.0039	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	87%	87%	-	-	-	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.03.0040	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	97%	97%	-	-	-	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.03.0041	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	142%	142%	-	-	-	Kec. Semampir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.03.0042	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	Bagian Perlengkapan
Tahun 2017											
1	Urusan Pemerintahan										
1.1	Wajib										
1.1.1	Pelayanan Dasar										
1.1.1.01	Pendidikan										
1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan										
		Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	75,77%	68,60%	-	-	-	70%			
		Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	86,52%	74,07%	-	-	-	75,89%			
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	81,55%	72,82%	-	-	-	74,76%			
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	81,18%	73,50%	-	-	-	75%			
		Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	79,21%	13,22%	-	-	-	25%			
		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	97,17%	-	-	-	100%			
		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	100%	97,17%	-	-	-	100%			
		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%	97,17%	-	-	-	100%			
		Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	100%	44,71%	-	-	-	55,77%			
1.1.1.01.01.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab	-	-				80 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0002	Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun	-	-				50 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah sekolah SD yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	-	-				1132 lembaga (4528 lembaga)	742 lembaga	16.39 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah Sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	-	-				412 lembaga (1648 lembaga)	412 lembaga	25.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	-	-				86730 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah jenis perlengkapan sekolah dasar yang diberikan	-	-				10 jenis (22 jenis)	3 jenis	13.64 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan	-	-				10 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0008	Pengadaan sarana prasarana PAUD	Jumlah APE yang diberikan	-	-				896 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah	-	-				418 lembaga (5016 lembaga)	1254 lembaga	25.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-				1 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum	Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,52%	78,72%	-	-	-	80,14%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,41%	77,67%	-	-	-	79,61%			
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,59%	78,40%	-	-	-	80%			
		Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	86,60%	21,05%	-	-	-	35,08%			
		Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86,59%	78,40%	-	-	-	80%			
1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan	-	-				70 lembaga (680 lembaga)	150 lembaga	22.06 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan	-	-				32 lembaga (288 lembaga)	60 lembaga	20.83 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	-	-				42197 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar	-	-				91333 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	-	-				479 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan	-	-				198 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	-	-				1825 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	-	-				13212 orang	5872 orang	44.44 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	-	-				18128 orang	2034 orang	11.22 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
		Persentase guru PAUD yang kompeten	76%	58,73%	-	-	-	62,18%			
		Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	97,92%	57,08%	-	-	-	65,66%			
		Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	98,25%	63,99%	-	-	-	71,88%			
		Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	96,53%	60,08%	-	-	-	68,49%			
		Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%	93,13%	-	-	-	95,43%			
		Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	94,78%	68%	-	-	-	74,39%			
		Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	100%	84,80%	-	-	-	86,53%			
		Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%	96,74%	-	-	-	97,93%			
		Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%	93,02%	-	-	-	95,17%			
		Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	82,23%	46,48%	-	-	-	53,63%			
		Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	63,05%	42,20%	-	-	-	46,37%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	70,60%	53,24%	-	-	-	55,56%			
		Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	67,55%	45,50%	-	-	-	49,91%			
		Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	70,07%	47,26%	-	-	-	51,82%			
1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga	-	-				12691 orang (14476 orang)	1 orang	0.01 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan	-	-				7068 orang (7141 orang)	150 orang	2.10 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta	-	-				1941 orang (3726 orang)	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu	-	-				11425 orang (45598 orang)	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04	Program Peningkatan Prestasi										
		Persentase PAUD beprestasi	3,36%	0,59%	-	-	-	1,14%			
		Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	71,88%	38,46%	-	-	-	45,16%			
		Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	81,82%	54,55%	-	-	-	63,64%			
		Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	40,38%	21,15%	-	-	-	25%			
		Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	70,59%	46,15%	-	-	-	50%			
1.1.1.01.04.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	-	-				33275 siswa (332750 siswa)	0 siswa	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	-	-				3405 orang	2124 orang	62.38 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	-	-				3120 orang	3000 orang	96.15 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah jenis Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	-	-				9 jenis	4 jenis	44.44 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	-	-				3 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan										
		Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	68,75%	18,75%	-	-	-	25%			
		Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	53,02%	36,24%	-	-	-	39,60%			
		Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	79,59%	28,57%	-	-	-	38,78%			
		Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	73,05%	52,76%	-	-	-	56,82%			
		Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	71,28%	44,68%	-	-	-	50%			
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	83,84%	54,55%	-	-	-	59,60%			
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	87,04%	47,04%	-	-	-	64,44%			
1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	-	-				1504 Lembaga	635 Lembaga	42.22 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06	Program Pendidikan Kesetaraan										
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	74,29%	68,93%	-	-	-	70%			
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89,66%	87,74%	-	-	-	88,12%			
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91,37%	90,72%	-	-	-	90,85%			
1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	-	-				641 orang	146 orang	22.78 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	6,32%	5,34%	-	-	-	5,53%			
		Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	4,17%	0%	-	-	-	0%			
1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	-	-				12000 orang (48000 orang)	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	-	-				500 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi	-	-				900 lembaga	548 lembaga	60.89 %	Dinas Pendidikan
1.1.1.02	Kesehatan										
1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin										
		Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	15%	10%	-	-	-	11%			
		Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional	-	-				291686 orang (3500232 orang)	844610 orang	24.13 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak										
		Cakupan imunisasi dasar lengkap	94%	93,79%	-	-	-	93,81%			
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,50%	98,43%	-	-	-	98,45%			
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap	95%	78%	-	-	-	81%			
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolnakes)	96,98%	96,93%	-	-	-	96,94%			
1.1.1.02.02.0001	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang mendapatkan layanan pemeriksaan	-	-				916 orang	76 orang	8.30 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02.0002	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Laporan Jaminan Persalinan	-	-				12 Laporan	3 Laporan	25.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak										
		Prevalensi Balita gizi buruk	< 1 %	< 1%	-	-	-	< 1 %			
		Persentase Penimbangan balita	81,70%	81,20%	-	-	-	81,30%			
		Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	9,50%	-	-	-	9,50%			
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,70%	94,60%	-	-	-	94,62%			
1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan	-	-				282 orang (846 orang)	0 orang	0.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)										
		Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100%	34,78%	-	-	-	52,70%			
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	80%	70%	-	-	-	74%			
1.1.1.02.04.0001	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	-				63 Lembaga (756 Lembaga)	88 Lembaga	11.64 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0003	Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	-	-				58 Item	2 Item	3.45 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0004	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya	-	-				65 Lembaga (780 Lembaga)	69 Lembaga	8.85 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab	-	-				10 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.02.04.0006	Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.04.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan	-	-				1 Jenis	0 Jenis	0.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu										
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.02.05.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	-	-				160 item	1 item	0.63 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar di Puskesmas	-	-				60 item	1 item	1.67 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
		Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	76%	71%	-	-	-	72%			
		Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	79,50%	75%	-	-	-	76%			
		Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	90%	80%	-	-	-	82%			
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	90%	80%	-	-	-	82%			
1.1.1.02.06.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	-	-				43 Lembaga	9 Lembaga	20.93 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	-	-				242 Lembaga	69 Lembaga	28.51 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang Dibina dan Dikembangkan	-	-				155 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	-	-				58392 orang	21116 orang	36.16 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0005	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	-	-				1680 orang	1806 orang	107.50 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0006	Pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	-	-				275 orang	262 orang	95.27 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	-	-				8 kali	6 kali	75.00 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0008	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	-	-				69019 orang	16162 orang	23.42 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0009	Pelayanan medik rumah sakit	Terpenuhinya Pelayanan medik rumah sakit	-	-				2723 orang	993 orang	36.47 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0010	Pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	-	-				1 aplikasi	0 aplikasi	0.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0011	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	-	-				986 orang (7410 orang)	3556 orang	47.99 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit										
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%	80%	-	-	-	85%			
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	85%	75%	-	-	-	78%			
		Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	3 hari	8 hari	-	-	-	10 hari			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	36 hari	48 hari	-	-	-	48 hari			
		Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	40 menit	49 menit	-	-	-	47 menit			
1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi	-	-				1 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0002	Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0003	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan RSUD BDH	-	-				1 jenis (12 jenis)	6 jenis	50.00 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Jumlah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	-	-				1 jenis	0 jenis	0.00 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0005	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak	-	-				1 jenis (9 jenis)	3 jenis	33.33 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0006	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-				1 jenis	0 jenis	0.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0007	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-				1 jenis	1 jenis	100.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0008	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-				1 jenis	0 jenis	0.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0009	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	-	-				1 jenis	0 jenis	0.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit										
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.02.08.0001	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	-	-				4 jenis (44 jenis)	12 jenis	27.27 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	-	-				2 jenis (24 jenis)	6 jenis	25.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
		Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	90%	80%	-	-	-	82%			
		Persentase rumah sehat	80%	73,50%	-	-	-	75%			
		Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	85%	80%	-	-	-	81%			
1.1.1.02.09.0001	Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	-	-				62 Puskesmas (620 Puskesmas)	0 Puskesmas	0.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0002	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0003	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Lokasi Kasus Penyakit Menular Yang Tertangani	-	-				1750 lokasi	374 lokasi	21.37 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0004	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu	-	-				154 Lembaga (1848 Lembaga)	423 Lembaga	22.89 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	-	-				31 Lembaga	5 Lembaga	16.13 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0006	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang Diperiksa	-	-				5897 sampel	2804 sampel	47.55 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0007	Promosi dan pemberdayaan kesehatan	Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	-	-				154 Lembaga (1848 Lembaga)	462 Lembaga	25.00 %	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.02.09.0008	Surveilans dan Imunisasi	Laporan Pelaksanaan Surveilans, Pemantauan, Pelacakan KLB	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kesehatan
1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.1.03.01	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota										
		Lama genangan (menit)	45 menit	52 menit	-	-	-	51 menit			
		Luas genangan (ha)	1094 ha	1239 ha	-	-	-	1209 ha			
		Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	80%	-	-	-	80%			
		Tinggi genangan (cm)	14 cm	16 cm	-	-	-	16 cm			
1.1.1.03.01.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-				27 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0003	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara	-	-				56 unit	6 unit	10.71 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0004	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	-	-				10000 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0005	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	-	-				2000 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara	-	-				210000 meter kubik	93555 meter kubik	44.55 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0007	Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	-	-				75 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan										
		Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	15,48%	2,58%	-	-	-	5,16%			
		Persentase jalan yang terbangun (%)	0,71%	0,12%	-	-	-	0,24%			
		Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%	80%	-	-	-	80%			
		Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	34,36%	5,73%	-	-	-	11,45%			
1.1.1.03.02.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	-	-				15 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	-	-				162 unit	32 unit	19.75 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	-	-				5000 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	-	-				27954 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	-	-				150260 meter persegi	103285 meter persegi	68.80 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0006	Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	-	-				62 dokumen	5 dokumen	8.06 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan										
		Persentase pelanggan baru PDAM (%)	16,59%	4,48%	-	-	-	9,22%			
1.1.1.03.03.0001	Pengembangan Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)	Panjang jaringan air bersih yang terbangun	-	-				1000 Meter	0 Meter	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU										
		Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2780250 m	2480250 m	-	-	-	2540250 m			
		Persentase pemasangan PJU hemat energi	85,90%	42,79%	-	-	-	64,49%			
1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	-	-				2000 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	-	-				5722 rekening (68664 rekening)	17503 rekening	25.49 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	-	-				40000 titik (480000 titik)	198666 titik	41.39 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota										
		Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.03.05.0001	Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan	-	-				10 ijin	4 ijin	40.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota										
		Persentase rencana induk sektoral yang disusun	100%	57,14%	-	-	-	64,29%			
		Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	73,33%	40%	-	-	-	46,67%			
1.1.1.03.06.0001	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.1.03.06.0002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.1.03.06.0003	Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota										
		Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60,79%	51,96%	-	-	-	53,48%			
		Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.03.07.0001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	-	-				2 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0002	Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan	-	-				6517 bangunan	2723 bangunan	41.78 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0003	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	-	-				7770 persil	3306 persil	42.55 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0004	Pengawasan Pengendalian Dan Pernerbitan Tata Bangunan	Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan diterbitkan	-	-				48 bangunan	25 bangunan	52.08 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0005	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0006	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	-	-				500 ijin	166 ijin	33.20 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.03.07.0007	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun	-	-				7 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0008	Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	-	-				100 persil	489 persil	489.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0009	Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya	-	-				5 dokumen (60 dokumen)	15 dokumen	25.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	100%	33%	-	-	-	46%			
		Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	73,80%	43,05%	-	-	-	49,20%			
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58%	3,47%	-	-	-	12%			
		Persentase rumah tinggal layak huni yang diperbaiki	100%	N/A	-	-	-	20%			
1.1.1.04.01.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	-	-				3 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0002	Penyediaan Rumah	Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan	-	-				3 lokasi	0 lokasi	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0003	Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan	-	-				394 lokasi	0 lokasi	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0004	Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	-	-				200 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0005	Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0006	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0007	Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisa dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-				2 dokumen	1 dokumen	50.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0008	Operasional Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola	-	-				69 bangunan	13 bangunan	18.84 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0009	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dikelola dan dipelihara	-	-				69 bangunan	15 bangunan	21.74 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0010	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan	-	-				1344 bangunan	22 bangunan	1.64 %	Dinas Sosial
1.1.1.05	serta Perlindungan Masyarakat										
1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah										
		Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				240 kali	64 kali	26.67 %	Kec. Asemrowo
1.1.1.05.01.0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Benowo
1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Bubutan
1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Bulak
1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Gayungan
1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				324 kali	81 kali	25.00 %	Kec. Genteng
1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Gubeng
1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				432 kali	108 kali	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Jambangan
1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Karangpilang
1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				264 kali	66 kali	25.00 %	Kec. Kenjeran
1.1.1.05.01.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				240 kali	60 kali	25.00 %	Kec. Krembangan
1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Lakarsantri
1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				336 kali	84 kali	25.00 %	Kec. Mulyorejo
1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Pakal
1.1.1.05.01.0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Rungkut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				240 kali	60 kali	25.00 %	Kec. Sambikerep
1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				336 kali	84 kali	25.00 %	Kec. Sawahan
1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				264 kali	66 kali	25.00 %	Kec. Semampir
1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Simokerto
1.1.1.05.01.0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				336 kali	84 kali	25.00 %	Kec. Sukolilo
1.1.1.05.01.0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.05.01.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				312 kali	78 kali	25.00 %	Kec. Tambaksari
1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				240 kali	60 kali	25.00 %	Kec. Tandes
1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				252 kali	63 kali	25.00 %	Kec. Tegalsari
1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				276 kali	69 kali	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				336 kali	84 kali	25.00 %	Kec. Wiyung
1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				288 kali	72 kali	25.00 %	Kec. Wonocolo
1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-				300 kali	75 kali	25.00 %	Kec. Wonokromo
1.1.1.05.01.0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	-	-				16800 Obyek	3122 Obyek	18.58 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	-	-				1330 Obyek	427 Obyek	32.11 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	-	-				15608 Obyek	6347 Obyek	40.67 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0035	Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan & Evaluasi Pelanggaran Perda	-	-				84 kali	44 kali	52.38 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	-	-				168 orang	310 orang	184.52 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	-	-				470 orang (5640 orang)	1252 orang	22.20 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan										
		Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	-	-	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.02.0001	Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	-	-				1140 orang	271 orang	23.77 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	-	-				30 laporan	0 laporan	0.00 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0003	Peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	Jumlah laporan peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	-	-				12 laporan	3 laporan	25.00 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0004	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	-	-				30 laporan	4 laporan	13.33 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0005	Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	-	-				46 laporan	10 laporan	21.74 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0006	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	-				37453 orang (69221 orang)	14615 orang	21.11 %	Dinas Sosial
1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana										
		Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	52 kejadian	55 kejadian	-	-	-	54 kejadian			
		Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	108 kejadian	111 kejadian	-	-	-	110 kejadian			
		Persentase kelurahan tangguh bencana	100%	10%	-	-	-	29%			
		Persentase waktu tanggap < 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	99%	94%	-	-	-	95%			
1.1.1.05.03.0001	Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara	-	-				380 orang (710 orang)	167 orang	23.52 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	-	-				1370 orang	0 orang	0.00 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003	Pemberian Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Jumlah laporan penyediaan permakanaan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	-	-				36 laporan	7 laporan	19.44 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	-	-				57 Jenis	0 Jenis	0.00 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0005	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-				1340 Orang	0 Orang	0.00 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0006	Penguatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	-				1130 orang	180 orang	15.93 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	12 laporan	3 laporan	25.00 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0008	Operasional Pemadaman Kebakaran	Terlaksananya Operasional Pemadaman Kebakaran secara baik	-	-	-	-	-	782 orang	194 orang	24.81 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0009	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	-	-	-	-	-	50 unit	42 unit	84.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0010	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	-	-	-	-	-	880 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0011	Pengurangan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	-	-	-	-	-	5560 bangunan	1549 bangunan	27.86 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0012	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	200 orang	40 orang	20.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	1680 orang	225 orang	13.39 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0014	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab	-	-	-	-	-	2 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05.03.0015	Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	-	-	-	-	-	10 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.06	Sosial										
1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial										
		Persentase PMKS yang ditangani	60%	70%	-	-	-	60%			
1.1.1.06.01.0001	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa	-	-	-	-	-	1114 orang (6674 orang)	1323 orang	19.82 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat permakanan	-	-	-	-	-	6000 orang (72000 orang)	17619 orang	24.47 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	-	-	-	-	-	15040 orang (180480 orang)	44536 orang	24.68 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0004	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapat permakanan	-	-	-	-	-	4804 orang (57648 orang)	14158 orang	24.56 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0005	Pemberian pelayanan bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	-	-	-	-	-	1280 orang	346 orang	27.03 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0006	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen pemutakhiran data PMKS dan PSKS	-	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	35 orang (420 orang)	105 orang	25.00 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	85 orang (950 orang)	220 orang	23.16 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	111 orang (1332 orang)	324 orang	24.32 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	150 orang (1535 orang)	280 orang	18.24 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	1600 orang (19200 orang)	4601 orang	23.96 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0012	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	-	6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0013	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0014	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	-	6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0015	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0016	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-	-	-	-	6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Bubutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.06.01.0017	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0018	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0019	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0020	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0021	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0022	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0023	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0024	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0025	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0026	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0027	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0028	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0029	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0030	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0031	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0032	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0033	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0034	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0035	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0036	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0037	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0038	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0039	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0040	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0041	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0042	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0043	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0044	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0045	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0046	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0047	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0048	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0049	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.1.06.01.0050	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0051	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0052	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0053	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0054	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0055	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0056	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0057	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0058	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0059	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	1 dokumen	8.33 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0060	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0061	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0062	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0063	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0064	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0065	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0066	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0067	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0068	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	2 dokumen	33.33 %	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0069	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0070	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0071	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0072	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	-	-				6 dokumen	1 dokumen	16.67 %	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0073	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial										
		Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	65%	40%	-	-	-	45%			
1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan program beras miskin	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0002	Pembinaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	-	-				6630 orang	485 orang	7.32 %	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0003	Pembinaan, pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi dan dibina	-	-				3500 orang	607 orang	17.34 %	Dinas Sosial
1.1.2	Non Pelayanan Dasar										
1.1.2.01	Tenaga Kerja										
1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
		Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	N/A	-	-	-	15%			
		Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	5%	-	-	-	5%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.01.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-				600 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.01.01.0002	Fasilitasi pemilihan bidang kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	-	-				1440 orang	390 orang	27.08 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0003	Fasilitasi pemilihan bidang kerja di luar negeri	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	-	-				500 orang	300 orang	60.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0004	Fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja	-	-				150 orang	60 orang	40.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0005	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	-	-				50 lembaga	50 lembaga	100.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0006	Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina	-	-				120 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0007	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan	-	-				7 kali	1 kali	14.29 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0008	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas										
		Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	70%	N/A	-	-	-	62%			
		Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	85%	N/A	-	-	-	77%			
1.1.2.01.02.0001	Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan	-	-				200 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat	jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	-	-				20 orang	9 orang	45.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003	Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	-	-				100 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	-	-				2000 orang	490 orang	24.50 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0005	Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi	-	-				920 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0006	Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	Jumlah dokumen identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0007	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	-	-				50 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0008	Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan	-	-				920 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja										
		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,76%	6,26%	-	-	-	6,67%			
1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	-	-				110 lembaga	39 lembaga	35.45 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002	Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	-	-				200 lembaga	198 lembaga	99.00 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan										
		Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan norma K3	83%	N/A	-	-	-	43%			
1.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-				2514 lembaga	213 lembaga	8.47 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang dibina	-	-				3620 lembaga	507 lembaga	14.01 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.02	Perlindungan Anak										
1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	-	-				72 Lembaga	28 Lembaga	38.89 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	-	-				33 Lembaga	30 Lembaga	90.91 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0003	Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	-	-				5 Kelurahan	0 Kelurahan	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0004	Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permasalahan perempuan dan anak yang disusun	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak										
		Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	68,10%	N/A	-	-	-	65,21%			
		Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	64%	5%	-	-	-	10%			
		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.2.02.02.0001	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	-	-				289 orang	72 orang	24.91 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	-	-				421 lembaga (431 lembaga)	80 lembaga	18.56 %	Dinas Pengendalian Penduduk,
1.1.2.02.02.0003	Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	-	-				926 Orang	463 Orang	50.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0004	Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo	-	-				154 Kelurahan	31 Kelurahan	20.13 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				16 dokumen	4 dokumen	25.00 %	
1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	5 dokumen	35.71 %	Kec. Asemrowo
1.1.2.02.02.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Benowo
1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Bubutan
											Kec. Bulak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	1 dokumen	7.14 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Gayungan
1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Genteng
1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				13 dokumen	3 dokumen	23.08 %	Kec. Gubeng
1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.02.02.0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan	-	-				14 dokumen (16 dokumen)	3 dokumen	18.75 %	Kec. Jambangan
1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	3 dokumen	21.43 %	Kec. Karangpilang
1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Kenjeran
1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	5 dokumen	35.71 %	Kec. Krembangan
1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Lakarsantri
1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Mulyorejo
1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Pakal
1.1.2.02.02.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Rungkut
1.1.2.02.02.0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				12 dokumen	2 dokumen	16.67 %	Kec. Sambikerep
1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				18 dokumen (25 dokumen)	9 dokumen	36.00 %	Kec. Sawahan
1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Semampir
1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	2 dokumen	14.29 %	Kec. Simokerto
1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Sukolilo
1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	5 dokumen	35.71 %	Kec. Tambaksari
1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				16 dokumen	3 dokumen	18.75 %	Kec. Tandes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	4 dokumen	28.57 %	Kec. Tegalsari
1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				18 dokumen	6 dokumen	33.33 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				14 dokumen	3 dokumen	21.43 %	Kec. Wiyung
1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				20 dokumen	6 dokumen	30.00 %	Kec. Wonocolo
1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Wonokromo
1.1.2.03	Pangan										
1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan										
		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	90%	80%	-	-	-	82%			
		Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	85%	80%	-	-	-	81%			
		Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	96,5	95	-	-	-	95,5			
1.1.2.03.01.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa	-	-				10401 sampel	1915 sampel	18.41 %	Dinas Kesehatan
1.1.2.03.01.0002	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	-	-				15 dokumen	3 dokumen	20.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	-	-				670 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0004	Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	-	-				150 orang	50 orang	33.33 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0005	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah masyarakat yang dibina untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengembangan pangan	-	-				200 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan produk pangan segar	-	-				1900 sampel	337 sampel	17.74 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0007	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang dilatih diversifikasi pangan	-	-				651 orang	141 orang	21.66 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.04	Pertanahan										
1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum										
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	7,4 Ha	1,4027 Ha	-	-	-	2,4 Ha			
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48,05 Ha	7,14 Ha	-	-	-	19,3 Ha			
1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur	Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	-	-				7136 meter persegi	4763 meter persegi	66.75 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.01.0002	Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah laporan Identifikasi dan Persiapan Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-				3 laporan	0 laporan	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0003	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rehabilitasi sosial/pemberdayaan ekonomi	-	-				2000 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0004	Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	-	-				29500 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0005	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pelayanan publik	-	-				100000 meter persegi	0 meter persegi	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.04.02	Program pengamanan aset										
		Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	21,18%	12,85%	-	-	-	14,52%			
		Persentase tanah aset yang tersertifikasi	14,52%	11,58%	-	-	-	12,08%			
1.1.2.04.02.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0003	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	-	-				100 bangunan	10 bangunan	10.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0004	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen arsip tanah/bangunan aset daerah yang dikelola	-	-				1 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0005	Pengendalian Dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian / penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset yang dilakukan	-	-				4 kali	2 kali	50.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0006	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	-	-				30 dokumen	5 dokumen	16.67 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03	Program pengelolaan aset										
		Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	100%	N/A	-	-	-	25,22%			
1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-				1 dokumen	1 dokumen	100.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0003	Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang dikelola	-	-				24 bangunan	6 bangunan	25.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0004	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jenis laporan pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	-	-				2 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.05	Lingkungan Hidup										
1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau										
		Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	60,73%	20,49%	-	-	-	34,01%			
		Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	10,24%	1,87%	-	-	-	3,66%			
1.1.2.05.01.0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara	-	-				390 lokasi (4680 lokasi)	1188 lokasi	25.38 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0002	Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	-	-				21 lokasi (252 lokasi)	63 lokasi	25.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0003	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah Penataan Taman dan Jalur Hijau	-	-				37 lokasi	0 lokasi	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0004	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Dekorasi Kota	-	-				55 unit	5 unit	9.09 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	-	-				53 lokasi (196 lokasi)	39 lokasi	19.90 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Sentra Pertanian Perkotaan	Jumlah sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara	-	-				8 lokasi (85 lokasi)	6 lokasi	7.06 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.01.0007	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah lokasi kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dikelola	-	-				1 lokasi (12 lokasi)	3 lokasi	25.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.02	Program pengelolaan kebersihan										
		Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46%	8,33%	-	-	-	7,69%			
		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang <= 1 hari	85,95%	80,54%	-	-	-	81,62%			
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0,11%	0% (1372 komunitas)	-	-	-	0,02%			
1.1.2.05.02.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	-				31 kali	31 kali	100.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0002	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPLT yang dioperasikan	-	-				1 bangunan (12 bangunan)	3 bangunan	25.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.02.0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah Pelaksanaan Operasional Pengangkutan Sampah	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH	-	-				2500 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	-	-				547500 ton (6570000 ton)	149557 ton	2.28 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0008	Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet yang Dipelihara	-	-				302 unit	286 unit	94.70 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0009	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara	-	-				15 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0010	Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	-	-				1 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0012	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Pelaksanaan Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Jumlah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-	-				6 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0014	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah	Jumlah Rumah Kompos/PLTSA/TPS 3R yang dikelola	-	-				25 bangunan (282 bangunan)	66 bangunan	23.40 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				120 orang	20 orang	16.67 %	Kec. Asemrowo
1.1.2.05.02.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				150 orang	30 orang	20.00 %	Kec. Benowo
1.1.2.05.02.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				400 orang	120 orang	30.00 %	Kec. Bubutan
1.1.2.05.02.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				385 orang	96 orang	24.94 %	Kec. Bulak
1.1.2.05.02.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.05.02.0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				180 orang	30 orang	16.67 %	Kec. Gayungan
1.1.2.05.02.0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	60 orang	25.00 %	Kec. Genteng
1.1.2.05.02.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				216 orang	36 orang	16.67 %	Kec. Gubeng
1.1.2.05.02.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				200 orang	40 orang	20.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.05.02.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				180 orang	30 orang	16.67 %	Kec. Jambangan
1.1.2.05.02.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				180 orang	60 orang	33.33 %	Kec. Karangpilang
1.1.2.05.02.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				120 orang	20 orang	16.67 %	Kec. Kenjeran
1.1.2.05.02.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				275 orang	69 orang	25.09 %	Kec. Krembangan
1.1.2.05.02.0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				300 orang	113 orang	37.67 %	Kec. Lakarsantri
1.1.2.05.02.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Mulyorejo
1.1.2.05.02.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	60 orang	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.05.02.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				180 orang	40 orang	22.22 %	Kec. Pakal
1.1.2.05.02.0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				340 orang	50 orang	20.00 %	Kec. Rungkut
1.1.2.05.02.0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	40 orang	16.67 %	Kec. Sambikerep
1.1.2.05.02.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				280 orang	56 orang	20.00 %	Kec. Sawahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.02.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				175 orang	35 orang	20.00 %	Kec. Semampir
1.1.2.05.02.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				300 orang	1 orang	0.33 %	Kec. Simokerto
1.1.2.05.02.0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				210 orang (420 orang)	105 orang	25.00 %	Kec. Sukolilo
1.1.2.05.02.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.05.02.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	30 orang	12.50 %	Kec. Tambaksari
1.1.2.05.02.0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				220 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Tandes
1.1.2.05.02.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				250 orang	25 orang	10.00 %	Kec. Tegalsari
1.1.2.05.02.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				420 orang	105 orang	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.05.02.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	60 orang	25.00 %	Kec. Wiyung
1.1.2.05.02.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				240 orang	40 orang	16.67 %	Kec. Wonocolo
1.1.2.05.02.0045	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	-	-				250 orang	75 orang	30.00 %	Kec. Wonokromo
1.1.2.05.03	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan										
		Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95%	40%	-	-	-	50%			
1.1.2.05.03.0001	Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0002	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah tersusunnya dokumen non fisik adipura	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah (bg DBHCHT)	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	-	-				161 kali	38 kali	23.60 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	-	-				500 orang	200 orang	40.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	-	-				20 kasus	19 kasus	95.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0007	Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disusun	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0008	Pendukung Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pendukung inventarisasi dan penataan lingkungan hidup yang disusun	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0009	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	-	-				218 sampel	52 sampel	23.85 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0010	Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	-				30 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0011	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	-	-				300 orang	100 orang	33.33 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0012	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan peningkatan kualitas lingkungan hidup	-	-				193 dokumen	48 dokumen	24.87 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0013	Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	-	-				30 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0014	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	-	-				51 kali	12 kali	23.53 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.05.05	Program Upaya Konservasi Energi										
		Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164 kegiatan dan /atau usaha	113 kegiatan dan / atau usaha	-	-	-	124 kegiatan dan /atau usaha			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.05.05.0001	Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit	-	-				120 Kegiatan usaha	0 Kegiatan usaha	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif										
		Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	14 lingkungan	4 lingkungan	-	-	-	6 lingkungan			
		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbaru	49 unit	29 unit	-	-	-	33 unit			
1.1.2.05.08.0001	Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	-	-				1 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08.0002	Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan	-	-				1 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.05.08.0003	Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.06	Pencatatan Sipil										
1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
		Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,94%	99,55%	-	-	-	99,57%			
		Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	89,51%	70%	-	-	-	86,55%			
		Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,96%	89%	-	-	-	93,92%			
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	70%	-	-	-	100%			
		Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,94%	45,54%	-	-	-	99,57%			
		Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.2.06.01.0001	Fasilitasi Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	-	-				300000 berkas	151075 berkas	50.36 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	-	-				10 kali	2 kali	20.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing	-	-				46438 berkas	11678 berkas	25.15 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0004	Pengembangan Teknologi Kependudukan	Sistem Kependudukan	-	-				1 aplikasi (12 aplikasi)	3 aplikasi	25.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0005	Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0006	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan kematian	-	-				7513 berkas (75130 berkas)	21703 berkas	28.89 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0007	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian	Jumlah permohonan layanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	-	-				6125 berkas	820 berkas	13.39 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0008	Perencanaan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perkembangan Kependudukan	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0009	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Jumlah laporan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	-	-				12 laporan	0 laporan	0.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
1.1.2.06.01.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
1.1.2.06.01.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
1.1.2.06.01.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
1.1.2.06.01.0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.06.01.0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
1.1.2.06.01.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
1.1.2.06.01.0040	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
1.1.2.08	Berencana										
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana										
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,95%	21,25%	-	-	-	20,85%			
		Persentase peserta KB aktif	80,95%	76,32%	-	-	-	77,31%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4,90%	6,10%	-	-	-	5,80%			
		Persentase peserta KB baru	84,35%	80,35%	-	-	-	81,15%			
1.1.2.08.01.0001	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	-	-				2033 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0002	Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	-	-				310 Orang	0 Orang	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0003	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	-	-				4000 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	-	-				600 orang	106 orang	17.67 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	-	-				2 unit	1 unit	50.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	100%	14,22%	-	-	-	47,90%			
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3%	3,50%	-	-	-	3,40%			
1.1.2.08.02.0001	Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	-	-				1350 orang	399 orang	29.56 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02.0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	-	-				1240 Orang	1 Orang	0.08 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	75%	-	-	-	75%			
1.1.2.08.03.0001	Dinamisasi Data Keluarga Berpendapatan Rendah	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpendapatan rendah	-	-				154 kelurahan	0 kelurahan	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0002	Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	-	-				1025 orang	36 orang	3.51 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	-	-				63 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.08.03.0004	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga	-	-				1 dokumen (5 dokumen)	3 dokumen	60.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk,
1.1.2.09	Perhubungan										
1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi										
		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	32,53 km/jam	28,9 km/jam	-	-	-	29,19 km/jam			
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	2%	-	-	-	2%			
1.1.2.09.01.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian	-	-				97000 unit	38055 unit	39.23 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	-	-				2 Bangunan	0 Bangunan	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	-	-				1 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0004	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	-	-				2510 orang	590 orang	23.51 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-				15 lokasi	0 lokasi	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0007	Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	-	-				760 kali	182 kali	23.95 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	-	-				2055 unit (2060 unit)	0 unit	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0009	Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	-	-				20 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0010	Pengelolaan Parkir	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir	-	-				12 kali (36 kali)	9 kali	25.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0011	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan	-	-				3 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0012	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	-	-				12 kali	3 kali	25.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	-	-				7 dokumen	6 dokumen	85.71 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0014	Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	-	-				12 kali	3 kali	25.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0015	Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Disusun	-	-				2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan										
		Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	40,54 menit	43,32 menit	-	-	-	43,32 menit			
		Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	23 menit	26 menit	-	-	-	26 menit			
1.1.2.09.02.0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	-	-				12 kali (36 kali)	9 kali	25.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0002	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	-	-				2 layanan	0 layanan	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Penjinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	-	-				7500 ijin	1052 ijin	14.03 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.03	Program manajemen lalu lintas angkutan barang										
		Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	90,3 menit	120,4 menit	-	-	-	112,88 menit			
1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.10	Persandian										
1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
		Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	45,74%	28,01%	-	-	-	31,56%			
		Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%	100%	-	-	-	100%			
1.1.2.10.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan layanan pengaduan Sistem Informasi Pemerintahan	-	-				12 Dokumen	3 Dokumen	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang disusun	-	-				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0003	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Persandian	-	-				20 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah database yang dihubungkan/diintegrasikan	-	-				2 Database	0 Database	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0005	Pembangunan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK Yang Diadakan	-	-				21 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0006	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	-	-				15 aplikasi	0 aplikasi	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	-	-				104 aplikasi	312 aplikasi	300.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	-	-				9 Jenis	0 Jenis	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0009	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data	-	-				12 Dokumen	3 Dokumen	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0010	Penyediaan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan Penyediaan Sistem Keamanan Informasi yang disusun	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0011	Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	-	-				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat										
		Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85%	83%	-	-	-	83%			
		Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	10254 kunjungan	8428 kunjungan	-	-	-	8765 kunjungan			
1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				828 kali	207 kali	25.00 %	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0002	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	-	-				6685 eksemplar	421 eksemplar	6.30 %	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	-	-				146 kali	35 kali	23.97 %	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0004	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	-	-				500 orang	101 orang	20.20 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0005	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	-	-				4 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0007	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Saluran Komunikasi	-	-				12 Dokumen	3 Dokumen	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0008	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Materi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	-	-				2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0009	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	-	-				81 kali	14 kali	17.28 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.10.02.0010	Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK	-	-				12 kali	3 kali	25.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro										
		Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	6%	N/A	-	-	-	4%			
1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan	-	-				25 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro										
		Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutuan	40%	N/A	-	-	-	20%			
		Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	40%	N/A	-	-	-	20%			
1.1.2.11.03.0001	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	-	-				125 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro yang disusun	-	-				4 dokumen	1 dokumen	25.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0003	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	-	-				125 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0004	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan	-	-				200 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi										
		Persentase koperasi berklasifikasi AAB	77,05%	42,61%	-	-	-	57,81%			
1.1.2.11.04.0001	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi yang disusun	-	-				4 dokumen	1 dokumen	25.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0002	Pembinaan Koperasi Siswa	Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian	-	-				150 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat	-	-				150 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0004	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT	Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya	-	-				231 lembaga	21 lembaga	9.09 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0005	Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga	-	-				60 Lembaga	0 Lembaga	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi										
		Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	88%	N/A	-	-	-	68%			
1.1.2.11.05.0001	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	-	-				7 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan	-	-				143 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	-	-				82 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0004	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	-	-				82 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0005	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah dokumen penilaian kesehatan koperasi yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0006	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	-	-				665 lembaga	77 lembaga	11.58 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.12	Penanaman Modal										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik										
		Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	42%	N/A	-	-	-	18%			
1.1.2.12.01.0001	Temu Usaha Logistik	Jumlah temu usaha logistik yang dilaksanakan	-	-				1 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi										
		Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	24%	N/A	-	-	-	8%			
		Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	36%	N/A	-	-	-	12%			
1.1.2.12.03.0001	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	-	-				2 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	-	-				60 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0003	Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan pengendalian penanaman modal	-	-				4 dokumen	1 dokumen	25.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	-	-				3 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0005	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0006	Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi	Jumlah laporan sinkronisasi dan validasi data investasi	-	-				4 dokumen	1 dokumen	25.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0007	Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi	Jumlah koordinasi promosi investasi yang dilaksanakan	-	-				1 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan										
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	70%	-	-	-	72%			
1.1.2.12.04.0001	Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	-	-				300 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0002	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	-	-				100 lembaga	50 lembaga	50.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0003	Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	-	-				31000 berkas	15046 berkas	48.54 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0004	Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dibina	-	-				130 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0005	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	-	-				500 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0006	Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	-	-				73 dokumen	9 dokumen	12.33 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0007	Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	-	-				500 berkas	321 berkas	64.20 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0008	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	-	-				26 ijin	17 ijin	65.38 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0009	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	-	-				30 berkas	7 berkas	23.33 %	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0010	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.12.04.0011	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah dokumen Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.04.0012	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan	-	-				8017 ijin	3434 ijin	42.83 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.12.04.0013	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	-	-				5357 lembaga	260 lembaga	4.85 %	Dinas Perdagangan
1.1.2.12.04.0014	Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	-	-				14714600 lembar	0 lembar	0.00 %	Dinas Perhubungan
1.1.2.12.04.0015	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	-	-				251 ijin	36 ijin	14.34 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.12.04.0016	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu	-	-				2000 berkas	332 berkas	16.60 %	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga										
1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan										
		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	80%	-	-	-	80%			
1.1.2.13.01.0001	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-				1400 orang	299 orang	21.36 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	-	-				900 orang	148 orang	16.44 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0003	Peningkatan Wawasan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan	-	-				6600 orang	1551 orang	23.50 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga										
		Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	154 kelurahan	91 kelurahan	-	-	-	103 kelurahan			
		Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	2107 orang	857 orang	-	-	-	1107 orang			
1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi	-	-				3 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0002	Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0003	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga	-	-				23 rekening (276 rekening)	69 rekening	25.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0004	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dibangun dan ditingkatkan	-	-				67 Bangunan	0 Bangunan	0.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0005	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-				465 orang	400 orang	86.02 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0006	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-				920 orang	126 orang	13.70 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0007	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	-	-				600 orang	400 orang	66.67 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0008	Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	-	-				84 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0009	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	-	-				520 Unit	0 Unit	0.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0010	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki dan Dipelihara	-	-				75 Bangunan	18 Bangunan	24.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.14	Statistika										
1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	N/A	-	-	-	5%			
1.1.2.14.01.0001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi data pendukung perencanaan	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.14.01.0002	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang valid dan aktual	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.16	Kebudayaan										
1.1.2.16.01	Program perlindungan budaya lokal										
		Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	89,01%	-	-	-	91,50%			
1.1.2.16.01.0001	Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola	-	-				2 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal										
		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	100%	47,10%	-	-	-	52,90%			
		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	49%	40%	-	-	-	44%			
1.1.2.16.02.0001	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	-	-				181 kali (183 kali)	52 kali	28.42 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0002	Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0003	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	-	-				52 kali	34 kali	65.38 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0004	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	-	-				1468 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.02.0005	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah	-	-				1368 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal										
		Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	17%	14,50%	-	-	-	15%			
1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	-	-				80 orang (640 orang)	0 orang	0.00 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
1.1.2.16.03.0002	Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	-	-				700 orang	0 orang	0.00 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0003	Fasilitasi event peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan	-	-				17600 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	-	-				1246 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	-	-				1370 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	-	-				5 kegiatan	kegiatan	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan, pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	-	-				14342 orang	1173 orang	8.18 %	Dinas Sosial
1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Asemrowo
1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Benowo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				140 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Bubutan
1.1.2.16.03.0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				100 orang	orang	0.00 %	Kec. Bulak
1.1.2.16.03.0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	30 orang	33.33 %	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.16.03.0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	30 orang	33.33 %	Kec. Gayungan
1.1.2.16.03.0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				140 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Genteng
1.1.2.16.03.0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				300 orang	150 orang	50.00 %	Kec. Gubeng
1.1.2.16.03.0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.16.03.0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				140 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Jambangan
1.1.2.16.03.0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang (100 orang)	0 orang	0.00 %	Kec. Karangpilang
1.1.2.16.03.0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Kenjeran
1.1.2.16.03.0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Krembangan
1.1.2.16.03.0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				80 orang	30 orang	37.50 %	Kec. Lakarsantri
1.1.2.16.03.0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Mulyorejo
1.1.2.16.03.0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				240 orang	60 orang	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.16.03.0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Pakal
1.1.2.16.03.0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Rungkut
1.1.2.16.03.0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	30 orang	25.00 %	Kec. Sambikerep
1.1.2.16.03.0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Sawahan
1.1.2.16.03.0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				200 orang	50 orang	25.00 %	Kec. Semampir
1.1.2.16.03.0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Simokerto
1.1.2.16.03.0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Sukolilo
1.1.2.16.03.0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.16.03.0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	1 orang	0.63 %	Kec. Tambaksari
1.1.2.16.03.0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				120 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Tandes
1.1.2.16.03.0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Tegalsari
1.1.2.16.03.0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				160 orang	40 orang	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.16.03.0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	30 orang	33.33 %	Kec. Wiyung
1.1.2.16.03.0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	45 orang	50.00 %	Kec. Wonocolo
1.1.2.16.03.0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	-				90 orang	0 orang	0.00 %	Kec. Wonokromo
1.1.2.17	Perpustakaan										
1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
		Persentase koleksi buku	100%	84,05%	-	-	-	86,18%			
		Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	33%	6,86%	-	-	-	12,90%			
		Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%	0%(141 event)	-	-	-	10%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
		Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	100%	0,69%	-	-	-	20,50%			
1.1.2.17.01.0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	-	-				59433 Orang	5000 Orang	8.41 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	-	-				3 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0003	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	-	-				100 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0004	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca	-	-				48 kali	12 kali	25.00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0005	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	-	-				56572 buku	0 buku	0.00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	-	-				1 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Pendidikan
1.1.2.18	Kearsipan										
1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah										
		Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	20%	-	-	-	20%			
		Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100%	8,20%	-	-	-	22,60%			
1.1.2.18.01.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan	-	-				8 kali	3 kali	37.50 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan Sistem Kearsipan	-	-				70 Lembaga	6 Lembaga	8.57 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0003	Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	-	-				126 lembaga	23 lembaga	18.25 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	-	-				32 jenis	3 jenis	9.38 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	Pilihan										
1.2.2	Non Pelayanan Dasar										
1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan										
1.2.2.01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan										
		Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16%	N/A	-	-	-	12%			
1.2.2.01.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang dibangun	-	-				1 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	-	-				2 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	-	-				3 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan										
		Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%	N/A	-	-	-	25%			
1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan yang didampingi	-	-				400 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02	Pariwisata										
1.2.2.02.01	Program pengembangan destinasi wisata										
		Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	55%	9%	-	-	-	18%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	-	-				3 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan	-	-				3 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0003	Peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM pada obyek wisata	-	-				600 orang	160 orang	26.67 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0004	Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	-	-				5 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0005	Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan	-	-				4 bangunan (9 bangunan)	3 bangunan	33.33 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata										
		Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100%	0%	-	-	-	20%			
1.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan	-	-				4 kali	1 kali	25.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0002	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan	-	-				6 kali	1 kali	16.67 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03	Program Pemasaran Pariwisata										
		Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27%	40,94%	-	-	-	43,21%			
1.2.2.02.03.0001	Penyelenggaraan duta wisata	pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali	-	-				1 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0002	Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	-	-				51 kali	11 kali	21.57 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0003	Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR	-	-				64 kali	14 kali	21.88 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0004	Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan	-	-				5 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah kegiatan 3 event	-	-				4 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0006	Penyelenggaraan promosi	Jumlah promosi yang diselenggarakan	-	-				3 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif										
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	9%	N/A	-	-	-	5%			
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	9%	N/A	-	-	-	5%			
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	9%	N/A	-	-	-	5%			
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan	9%	N/A	-	-	-	5%			
		Persentase rumah kreatif yang beroperasi	100%	N/A	-	-	-	43,75%			
1.2.2.02.04.0001	Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan	Jumlah Gedung yang dipelihara	-	-				1 unit (12 unit)	19 unit	158.33 %	Dinas Pengendalian Penduduk,
1.2.2.02.04.0002	Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif yang dilaksanakan	-	-				78 kali	21 kali	26.92 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.04.0003	Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.02.04.0004	Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan	-	-				100 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.2.2.02.04.0005	Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang dikelola	-	-				2 Lembaga (24 Lembaga)	6 Lembaga	25.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.02.04.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Perikanan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan perikanan di rumah kreatif yang difasilitasi	-	-				25 orang (50 orang)	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02.04.0007	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Peternakan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan peternakan di rumah kreatif yang difasilitasi	-	-				20 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02.05	Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	40%	N/A	-	-	-	20%			
1.2.2.02.05.0001	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi	-	-				25 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.02.06	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	25%	N/A	-	-	-	5%			
1.2.2.02.06.0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	-	-				25 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.03	Pertanian										
1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16%	N/A	-	-	-	12%			
1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	-	-				5 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%	N/A	-	-	-	25%			
1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang didampingi	-	-				300 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah jenis bibit dan sarana pembibitan yang disediakan	-	-				14 jenis	0 jenis	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0003	Peningkatan SDM Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang dibina	-	-				25 orang (100 orang)	20 orang	20.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.04	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	87%	80%	-	-	-	83%			
1.2.2.03.04.0001	Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan	-	-				1000 kali	500 kali	50.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.04.0002	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	-	-				558 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80%	N/A	-	-	-	25%			
1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna budidaya peternakan yang didampingi	-	-				320 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.03.05.0002	Pengadaan Sarana Pelatihan Peternakan	Jumlah sarana pelatihan peternakan yang diadakan	-	-				1 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.06	Perdagangan										
1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial										
		Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100%	5%	-	-	-	25%			
		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	100%	15%	-	-	-	30%			
1.2.2.06.01.0001	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	-	-				100 lembaga	50 lembaga	50.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.01.0002	Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan										
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85%	N/A	-	-	-	70%			
1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	-	-				17696 unit	10889 unit	61.53 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang	-	-				20 jenis (85 jenis)	20 jenis	23.53 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang diawasi	-	-				12 unit (144 unit)	36 unit	25.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0004	Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-				300 orang	0 orang	0.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04	Program perluasan jangkauan pemasaran										
		Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	7,19%	1,2% (169 unit)	-	-	-	2,40%			
		Persentase UMK yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	60%	N/A	-	-	-	40%			
		Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	80%	20%	-	-	-	35%			
1.2.2.06.04.0001	Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata	-	-				2 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0002	Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	-	-				5 kali	0 kali	0.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0003	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	-	-				8 bangunan (9 bangunan)	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0004	Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	-	-				20 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0005	Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	-	-				30 orang (330 orang)	60 orang	18.18 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	-	-				180 orang	37 orang	20.56 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0007	Pengelolaan Sentra UKM Surabaya yang dikelola	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	-	-				4 Lembaga (48 Lembaga)	12 Lembaga	25.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0008	Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0009	Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	-	-				2 Lembaga (24 Lembaga)	6 Lembaga	25.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0010	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	-	-				15 kali	2 kali	13.33 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0011	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
1.2.2.06.04.0012	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.06.04.0013	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
1.2.2.06.04.0014	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
1.2.2.06.04.0015	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
1.2.2.06.04.0016	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
1.2.2.06.04.0017	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
1.2.2.06.04.0018	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
1.2.2.06.04.0019	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
1.2.2.06.04.0020	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
1.2.2.06.04.0021	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
1.2.2.06.04.0022	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
1.2.2.06.04.0023	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
1.2.2.06.04.0024	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
1.2.2.06.04.0025	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
1.2.2.06.04.0026	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
1.2.2.06.04.0027	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
1.2.2.06.04.0028	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
1.2.2.06.04.0029	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
1.2.2.06.04.0030	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
1.2.2.06.04.0031	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
1.2.2.06.04.0032	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
1.2.2.06.04.0033	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
1.2.2.06.04.0034	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
1.2.2.06.04.0035	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
1.2.2.06.04.0036	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
1.2.2.06.04.0037	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
1.2.2.06.04.0038	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.2.2.06.04.0039	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
1.2.2.06.04.0040	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
1.2.2.06.04.0041	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
1.2.2.06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan										
		Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	8%	-	-	-	8%			
		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian	15 kali/ kejadian	-	-	-	15 kali/kejadian			
1.2.2.06.05.0001	Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah	-	-				14 dokumen	3 dokumen	21.43 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
1.2.2.06.05.0002	Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.05.0003	Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	-	-				110 kali	87 kali	79.09 %	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian										
		Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	65%	60%	-	-	-	61%			
1.2.2.06.06.0001	Promosi Pemasaran Produk Hasil Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil pertanian	-	-				14 kali	2 kali	14.29 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Penunjang Urusan Pemerintahan										
2.1	Fungsi Manajemen										
2.1.2	Non Pelayanan Dasar										
2.1.2.01	Pengembangan										
2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah										
		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	90%	-	-	-	90%			
		Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100%	96%	-	-	-	96%			
2.1.2.01.01.0001	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	-	-				4 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0002	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-				288 orang	0 orang	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0004	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	-	-				72 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0005	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah dokumen Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun	-	-				12 dokumen	2 dokumen	16.67 %	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.01.0006	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	-	-				6 aplikasi (24 aplikasi)	0 aplikasi	0.00 %	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.01.0007	Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun	-	-				40 dokumen	11 dokumen	27.50 %	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	60%	-	-	-	100%			
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85%	60%	-	-	-	65%			
		Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85%	60%	-	-	-	65%			
		Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85%	60%	-	-	-	65%			
2.1.2.01.02.0001	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.2.01.02.0002	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.01.02.0003	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0004	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.2.01.02.0005	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.2.01.02.0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1.2.01.02.0007	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0008	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan daerah	-	-				957 orang	945 orang	98.75 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0009	Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-				650 orang	0 orang	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0011	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0013	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan	-	-				72 lembaga (288 lembaga)	72 lembaga	25.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0015	Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0016	Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0018	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0019	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	-	-				7 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0021	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang	-	-				9 dokumen (11 dokumen)	2 dokumen	18.18 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0023	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	-	-				3 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0024	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0025	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0026	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0027	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0028	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Hukum
2.1.2.01.02.0029	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.02.0030	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0031	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Organisasi
2.1.2.01.02.0032	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.02.0033	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.01.02.0034	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.02.0035	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Bagian Umum dan Protokol
2.1.2.01.02.0036	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
2.1.2.01.02.0037	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.1.2.01.02.0038	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2.01.02.0039	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.01.02.0040	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Kesehatan
2.1.2.01.02.0041	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.2.01.02.0042	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.1.2.01.02.0043	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman
2.1.2.01.02.0044	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0045	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 Dokumen	3 Dokumen	33.33 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.1.2.01.02.0046	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.01.02.0047	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	5 dokumen	55.56 %	Dinas Pendidikan
2.1.2.01.02.0048	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.02.0049	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Dinas Perdagangan
2.1.2.01.02.0050	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Perhubungan
2.1.2.01.02.0051	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.1.2.01.02.0052	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Dinas Sosial
2.1.2.01.02.0053	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Dinas Tenaga Kerja
2.1.2.01.02.0054	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Inspektorat
2.1.2.01.02.0055	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0056	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0057	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0058	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0059	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0060	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0061	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	2 dokumen	16.67 %	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0062	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0063	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0064	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0065	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0066	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0067	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0068	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0069	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				13 dokumen	4 dokumen	30.77 %	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0070	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0071	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				13 dokumen	4 dokumen	30.77 %	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0072	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0073	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0074	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0075	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0076	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0077	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0078	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0079	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0080	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen (10 dokumen)	2 dokumen	20.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0081	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0082	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0083	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				13 dokumen	3 dokumen	23.08 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0084	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0085	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0086	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0087	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0088	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	5 dokumen	55.56 %	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0089	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0090	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0091	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0092	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	6 dokumen	66.67 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0093	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0094	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0095	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0096	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0097	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0098	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Kec. Simokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.01.02.0099	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0100	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	3 dokumen	33.33 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0101	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0102	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0103	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				13 dokumen	1 dokumen	7.69 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0104	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	1 dokumen	11.11 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0105	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0106	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0107	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	4 dokumen	33.33 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0108	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0109	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				13 dokumen	3 dokumen	23.08 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0110	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	2 dokumen	22.22 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0111	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0112	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0113	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0114	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0115	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0116	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0117	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	6 dokumen	66.67 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.01.02.0118	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	5 dokumen	55.56 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.01.02.0119	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	6 dokumen	66.67 %	Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.2.01.02.0120	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-				9 dokumen	4 dokumen	44.44 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.02	Keuangan										
2.1.2.02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
		Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	80%	-	-	-	80%			
2.1.2.02.01.0001	Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-				4 dokumen	1 dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0002	Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perimbangan keuangan dokumen	-	-				4 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.02.01.0003	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Laporan Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	-	-				12 Laporan	3 Laporan	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0004	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran daerah	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0005	Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	-	-				15 dokumen	1 dokumen	6.67 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0006	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	-	-				2 dokumen	1 dokumen	50.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0007	Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	-	-				19 dokumen	7 dokumen	36.84 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0008	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	-	-				4 dokumen	3 dokumen	75.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah										
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	81,70%	2,87%	-	-	-	14,19%			
2.1.2.02.02.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	-	-				36 dokumen	9 dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	-	-				48 dokumen	12 dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0004	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	-	-				24 Dokumen	6 Dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0005	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran,	-	-				12 Dokumen (24 Dokumen)	6 Dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak
2.1.2.02.02.0006	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB dan BPHTB	-	-				24 Dokumen	6 Dokumen	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.03	Koordinasi Perangkat Daerah										
2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan										
		Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	N/A	-	-	-	100%			
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	75%	N/A	-	-	-	15%			
		Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	10%	-	-	-	100%			
2.1.2.03.01.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0003	Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0004	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	-	-				274 Lembaga	0 Lembaga	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0005	Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah peningkatan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan	-	-				48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %	Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.01.0006	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	-	-				1 dokumen	1 dokumen	100.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0007	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penyusunan road map reformasi birokrasi	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Organisasi
2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan										
		Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	100%			
2.1.2.03.02.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	-	-				65 Permasalahan	12 Permasalahan	18.46 %	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	-	-				71 dokumen	12 dokumen	16.90 %	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	-	-				70 dokumen	10 dokumen	14.29 %	Bagian Hukum
2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom										
		Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100%	28,13%	-	-	-	42,51%			
2.1.2.03.03.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0003	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi di Kota Surabaya	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0004	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah dokumen pembinaan administrasi umum pemerintahan	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0005	Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kecamatan yang menerima pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	-	-				31 Kecamatan	0 Kecamatan	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0006	Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan penataan wilayah kecamatan	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Tembok Duku	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0019	Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Sukilo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11'	12
2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Gunungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0026	Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0029	Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0031	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0032	Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Karah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0059	Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Kaliwring	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Made	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Gading	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	126 dokumen	1,050.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Sidosermo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0160	Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah										
		Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	85,71%	-	-	-	100%			
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	0%	-	-	-	25%			
2.1.2.03.04.0001	Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Kesehatan	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0002	Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0003	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	-	-				2 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0004	Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0005	Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.03.04.0006	Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	-	-				8 dokumen (19 dokumen)	3 dokumen	15.79 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.03.04.0007	Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.03.05	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah										
		Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan undangan yang terfasilitasi	100%	100%	-	-	-	100%			
2.1.2.03.05.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-				96 laporan	26 laporan	27.08 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah informasi yang tersedia	-	-				138 kali	23 kali	16.67 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0003	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	-	-				3 kali	0 kali	0.00 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-				86 kali	17 kali	19.77 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0006	Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen yang dikaji atau ditelaah	-	-				10 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0007	Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0008	Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan	Dewan yang dilaksanakan	-	-				1122 kali	177 kali	15.78 %	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.03.05.0009	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	-	-				45 kali	6 kali	13.33 %	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	100%	-	-	-	100%			
2.1.2.03.06.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	-	-				11 jenis (132 jenis)	33 jenis	25.00 %	Bagian Umum dan Protokol
2.1.2.03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah										
		Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	42,86%	-	-	-	42,86%			
		Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	33,33%	-	-	-	33,33%			
		Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	100%	22,22%	-	-	-	42,10%			
2.1.2.03.07.0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	-	-				10 kegiatan	3 kegiatan	30.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0002	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan	-	-				16 lembaga	3 lembaga	18.75 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan	-	-				4 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0004	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	-	-				68 orang	0 orang	0.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0006	Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan										
		Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	85,71%	N/A	-	-	-	66,67%			
		Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	100%	N/A	-	-	-	42,86%			
2.1.2.03.08.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	-	-				2 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah										
		Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	83%	50%	-	-	-	67%			
2.1.2.03.09.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD	-	-				5 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.04	Pengawasan										
2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal										
		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%	100%	-	-	-	100%			
2.1.2.04.01.0001	Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti	-	-				48 dokumen	11 dokumen	22.92 %	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.1.2.04.01.0002	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0003	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen Inventarisasi temuan hasil pengawasan	-	-				12 dokumen	3 dokumen	25.00 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				16 dokumen	5 dokumen	31.25 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				16 dokumen	4 dokumen	25.00 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				16 dokumen	4 dokumen	25.00 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				16 Dokumen	3 Dokumen	18.75 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				85 dokumen	20 dokumen	23.53 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0009	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				85 dokumen	24 dokumen	28.24 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0010	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				85 dokumen	22 dokumen	25.88 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0011	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	-	-				85 Dokumen	21 Dokumen	24.71 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0012	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	-	-				2 dokumen	2 dokumen	100.00 %	Inspektorat
2.1.2.04.01.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	-	-				14 dokumen	3 dokumen	21.43 %	Inspektorat
2.2	Unsur Manajemen										
2.2.2	Non Pelayanan Dasar										
2.2.2.01	Pelatihan										
2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	89,47%	12,95%	-	-	-	35,58%			
		Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	97,08%	84,32%	-	-	-	88,08%			
		Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	100%	20%	-	-	-	20%			
		Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	95%	90%	-	-	-	91%			
2.2.2.01.01.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-				800 dokumen	225 dokumen	28.13 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Pembentukan Assesment Centre	Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0003	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian	-	-				10 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.01.01.0004	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	-	-				178 orang	35 orang	19.66 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0005	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	-	-				39 orang	0 orang	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0006	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	-	-				37 orang	30 orang	81.08 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0007	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	-	-				1267 orang	1120 orang	88.40 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0008	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment, evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS	-	-				169 orang	136 orang	80.47 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0009	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai	-	-				1 aplikasi (12 aplikasi)	3 aplikasi	25.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0010	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	-	-				380 orang	93 orang	24.47 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0011	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Publikasi Penerimaan IPDN	-	-				10000 CPNS	0 CPNS	0.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran										
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%	N/A	-	-	-	72%			
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (96 jenis)	24 jenis	25.00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (103 jenis)	25 jenis	24.27 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (108 jenis)	19 jenis	17.59 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (96 jenis)	24 jenis	25.00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (83 jenis)	21 jenis	25.30 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				56 jenis (158 jenis)	65 jenis	41.14 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (70 jenis)	17 jenis	24.29 %	Badan Penanggulangan
2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (120 jenis)	25 jenis	20.83 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				5 jenis (40 jenis)	12 jenis	30.00 %	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (96 jenis)	24 jenis	25.00 %	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				7 jenis (84 jenis)	21 jenis	25.00 %	Bagian Hukum
2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (75 jenis)	19 jenis	25.33 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				7 jenis (51 jenis)	13 jenis	25.49 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (96 jenis)	16 jenis	16.67 %	Bagian Organisasi
2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (58 jenis)	16 jenis	27.59 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan
2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				90 jenis	21 jenis	23.33 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				25 jenis (66 jenis)	8 jenis	12.12 %	Bagian Layanan Pengadaan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (120 jenis)	30 jenis	25.00 %	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				6 jenis	3 jenis	50.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				7 jenis	16 jenis	228.57 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (85 jenis)	19 jenis	22.35 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (108 jenis)	26 jenis	24.07 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				12 jenis (89 jenis)	21 jenis	23.60 %	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis	7 jenis	77.78 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (52 jenis)	15 jenis	28.85 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				24 jenis (133 jenis)	38 jenis	28.57 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				11 jenis (91 jenis)	17 jenis	18.68 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				7 Jenis (84 Jenis)	21 Jenis	25.00 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (67 jenis)	21 jenis	31.34 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak
2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (42 jenis)	6 jenis	14.29 %	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				7 jenis (84 jenis)	21 jenis	25.00 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 jenis (85 jenis)	23 jenis	27.06 %	Dinas Perdagangan
2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				9 Jenis (108 Jenis)	24 Jenis	22.22 %	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				21 jenis (72 jenis)	24 jenis	33.33 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				95 jenis (469 jenis)	83 jenis	17.70 %	Dinas Sosial
2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				64 jenis	24 jenis	37.50 %	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				12 jenis (67 jenis)	15 jenis	22.39 %	Inspektorat
2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (36 jenis)	9 jenis	25.00 %	Kec. Benowo
2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (36 jenis)	9 jenis	25.00 %	Kec. Bubutan
2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Bulak
2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Gayungan
2.2.2.02.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Genteng
2.2.2.02.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Gubeng
2.2.2.02.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Jambangan
2.2.2.02.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (96 jenis)	24 jenis	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Krembangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Pakal
2.2.2.02.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Rungkut
2.2.2.02.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (36 jenis)	9 jenis	25.00 %	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (36 jenis)	20 jenis	55.56 %	Kec. Sawahan
2.2.2.02.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Semampir
2.2.2.02.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Simokerto
2.2.2.02.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (36 jenis)	9 jenis	25.00 %	Kec. Tandes
2.2.2.02.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Wiyung
2.2.2.02.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				10 jenis (12 jenis)	3 jenis	25.00 %	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (81 jenis)	40 jenis	49.38 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				2 jenis (24 jenis)	6 jenis	25.00 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				8 jenis (96 jenis)	18 jenis	18.75 %	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	-	-				83 orang (104 orang)	21 orang	20.19 %	Sekretariat DPRD
2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan										
		Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	100%	67,95%	-	-	-	74,36%			
		Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	85%	75%	-	-	-	77%			
		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase pemanfaatan aset	95%	90%	-	-	-	91%			
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	100%			
		Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100%	0%	-	-	-	20%			
2.2.2.02.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				18 Unit (72 Unit)	32 Unit	44.44 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.02.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				38 unit (200 unit)	54 unit	27.00 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				32 unit (172 unit)	30 unit	17.44 %	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				144 unit	28 unit	19.44 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.02.02.0005	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				97 unit (528 unit)	111 unit	21.02 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.02.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				114 unit (1178 unit)	214 unit	18.17 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
2.2.2.02.02.0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				94 unit (740 unit)	159 unit	21.49 %	Badan Penanggulangan
2.2.2.02.02.0008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				41 Unit (249 Unit)	56 Unit	22.49 %	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.02.0010	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				49 unit (480 unit)	95 unit	19.79 %	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0011	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				8 Unit (65 Unit)	15 Unit	23.08 %	Bagian Hukum
2.2.2.02.02.0012	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				19 unit (99 unit)	21 unit	21.21 %	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.02.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				8 unit (41 unit)	10 unit	24.39 %	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				44 unit (263 unit)	25 unit	9.51 %	Bagian Organisasi
2.2.2.02.02.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				37 unit (142 unit)	30 unit	21.13 %	Bagian Administrasi Pemerintahan dan
2.2.2.02.02.0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				195 unit	45 unit	23.08 %	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
2.2.2.02.02.0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	-	-				6 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	-	-				1000 dokumen	450 dokumen	45.00 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-				550 unit	239 unit	43.45 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0020	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				30 unit (284 unit)	7 unit	2.46 %	Bagian Layanan Pengadaan dan
2.2.2.02.02.0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	-	-				6435 setel	105 setel	1.63 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0022	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	-	-				1158 unit	492 unit	42.49 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0023	Pengembangan Manajemen Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun	-	-				1 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0024	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				74 unit (888 unit)	222 unit	25.00 %	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.02.0025	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				36 unit	9 unit	25.00 %	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.02.0026	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				110 unit	117 unit	106.36 %	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.02.0027	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				24 unit (267 unit)	60 unit	22.47 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.02.0028	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				31 unit (372 unit)	91 unit	24.46 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.02.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				461 unit (5532 unit)	1125 unit	20.34 %	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.02.0030	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				117 unit	27 unit	23.08 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.02.0031	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				18 unit (211 unit)	47 unit	22.27 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.02.0032	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				2 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.02.0033	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab	-	-				34 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0034	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi	-	-				2 bangunan	0 bangunan	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0035	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				101 unit	0 unit	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0036	Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	-	-				60 dokumen	0 dokumen	0.00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0037	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				11 Unit (132 Unit)	30 Unit	22.73 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.02.0038	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				99 unit (1188 unit)	297 unit	25.00 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak
2.2.2.02.02.0039	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				288 unit (2169 unit)	354 unit	16.32 %	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.02.0040	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				3 unit	1 unit	33.33 %	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.02.0041	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				207 unit	74 unit	35.75 %	Dinas Perdagangan
2.2.2.02.02.0042	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				101 unit	16 unit	15.84 %	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.02.0043	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				102 unit (1224 unit)	333 unit	27.21 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.02.0044	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				41 unit (440 unit)	98 unit	22.27 %	Dinas Sosial
2.2.2.02.02.0045	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				792 unit	198 unit	25.00 %	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.02.0046	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				27 unit	8 unit	29.63 %	Inspektorat
2.2.2.02.02.0047	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				15 unit	3 unit	20.00 %	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.02.0048	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				15 unit (71 unit)	14 unit	19.72 %	Kec. Benowo
2.2.2.02.02.0049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				19 unit	5 unit	26.32 %	Kec. Bubutan
2.2.2.02.02.0050	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				16 unit (24 unit)	6 unit	25.00 %	Kec. Bulak
2.2.2.02.02.0051	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				52 unit	13 unit	25.00 %	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.02.0052	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				27 unit	7 unit	25.93 %	Kec. Gayungan
2.2.2.02.02.0053	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				35 unit	9 unit	25.71 %	Kec. Genteng
2.2.2.02.02.0054	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				19 unit	4 unit	21.05 %	Kec. Gubeng
2.2.2.02.02.0055	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				26 unit	3 unit	11.54 %	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.02.0056	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				31 unit	7 unit	22.58 %	Kec. Jambangan
2.2.2.02.02.0057	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				24 unit	6 unit	25.00 %	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.02.0058	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				25 unit (48 unit)	12 unit	25.00 %	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.02.0059	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				24 unit	6 unit	25.00 %	Kec. Krembangan
2.2.2.02.02.0060	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				12 unit	3 unit	25.00 %	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.02.0061	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				18 unit	3 unit	16.67 %	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2015 / 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*	12
2.2.2.02.02.0062	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				25 unit	6 unit	24.00 %	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.02.0063	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				23 unit (52 unit)	6 unit	11.54 %	Kec. Pakal
2.2.2.02.02.0064	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				12 unit	3 unit	25.00 %	Kec. Rungkut
2.2.2.02.02.0065	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				16 unit (89 unit)	22 unit	24.72 %	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.02.0066	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				25 unit	11 unit	44.00 %	Kec. Sawahan
2.2.2.02.02.0067	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				28 unit (45 unit)	11 unit	24.44 %	Kec. Semampir
2.2.2.02.02.0068	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				35 unit	7 unit	20.00 %	Kec. Simokerto
2.2.2.02.02.0069	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				23 unit	16 unit	69.57 %	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.02.0070	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				15 unit (48 unit)	12 unit	25.00 %	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.02.0071	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				21 unit	5 unit	23.81 %	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.02.0072	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				26 unit (68 unit)	10 unit	14.71 %	Kec. Tandes
2.2.2.02.02.0073	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				33 unit (36 unit)	9 unit	25.00 %	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.02.0074	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				20 unit	5 unit	25.00 %	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.02.0075	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				37 unit	9 unit	24.32 %	Kec. Wiyung
2.2.2.02.02.0076	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				53 unit	15 unit	28.30 %	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.02.0077	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				25 unit	6 unit	24.00 %	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.02.0078	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				917 unit	182 unit	19.85 %	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.02.0079	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				3467 unit	866 unit	24.98 %	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.02.0080	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				59 Unit	33 Unit	55.93 %	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.02.0081	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-				47 unit	15 unit	31.91 %	Sekretariat DPRD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan sepanjang tahun 2016, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan. Beberapa bidang permasalahan utama yang masih perlu menjadi perhatian di tahun 2018 adalah:

- Aparatur dan pengendalian internal
- Daya saing ekonomi lokal
- Mitigasi dan penanggulangan bencana
- Kualitas lingkungan hidup
- Pelestarian budaya lokal
- Minat dan budaya membaca
- Pembinaan kepemudaan
- Pengembangan prestasi olahraga
- Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi
- Pemberdayaan PMKS usia produktif
- Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan formal
- Pengelolaan sumber penerimaan daerah
- Penyediaan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
- Distribusi komoditas pangan
- Efektivitas dan efisiensi sistem drainase kota terpadu
- Pelayanan utilitas kota
- Penyediaan dan sertifikasi aset tanah
- Kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- Aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan
- Pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
- Pengembangan pariwisata
- Pengembangan perdagangan/city logistic
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan wawasan kebangsaan
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Adapun proses perumusan permasalahan pembangunan di Kota Surabaya untuk RKPD Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan permasalahan yang timbul dalam pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja utama (IKU) pembangunan menurut RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Adapun capaian sasaran pembangunan dan IKU dengan capaian kurang dari 100% pada Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.171
Evaluasi Capaian Sasaran Pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016
yang Kurang dari 100%

Sasaran Pembangunan	IKU Kota	Capaian
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Angka pelanggaran disiplin aparatur per 1.000 pegawai	60,06%
	Persentase aparatur (struktural dan non struktural) yang kompeten	72,62%
Meningkatkan produktivitas koperasi	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	64,86%
Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	71,42%
Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text levelling	72,97%
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Persentase atlet yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional	74,43%
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Load factor kendaraan umum (Angkot)	82,95%
	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	91,07%
Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya \geq 1 juta rupiah per bulan	82,97%
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	89,75%
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90,37%

Sasaran Pembangunan	IKU Kota	Capaian
kualitas pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,03%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	96,48%
Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	91,17%
	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	99,91%
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	93,28%
Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	96,58%
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	98,46%
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks genangan	99,82%

Ketidaktercapaian IKU Kota pada Tabel II.171 tersebut dievaluasi lebih lanjut untuk diketahui permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor yang menjadi penentu keberhasilan ke depannya. Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian sasaran pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016, disebutkan pada tabel berikut.

Tabel II.172
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Capaian Sasaran
Pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih relatif tingginya angka pelanggaran disiplin aparatur Kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing Adanya pengawasan melekat (waskat) terkait pelanggaran disiplin kepada PNS di lingkungan PD masing-masing Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman PD terhadap peraturan tentang disiplin aparatur Kurang efektifnya mekanisme pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi aparatur yang sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2.	Meningkatkan produktivitas koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya ketidakselarasan dalam penetapan target program dan target sasaran pertumbuhan produktivitas koperasi Produktivitas dari banyaknya koperasi yang direvitalisasi tidak masuk dalam perhitungan di 2016 karena belum ber-RAT lagi 	Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan omzet koperasi baik yang telah aktif, maupun yang baru direvitalisasi	Kurang optimalnya penetapan kinerja perencanaan untuk mendorong tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi
3.	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya kendala dalam penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan lapangan olahraga sebagai RTH Penambahan panjang dan lebar jalur hijau 	Adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau
4.	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Masih kurangnya kemampuan membaca siswa	Adanya pemetaan untuk pelaksanaan pendampingan di sekolah, khususnya pada sekolah yang hasil <i>reading text level</i> (RTL) siswanya masih kurang	Kurang berimbang jumlah petugas dengan jumlah perpustakaan sehingga tidak tersedia cukup tenaga dan waktu dalam melaksanakan pendampingan

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
5.	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Kurangnya atlit yang berprestasi di kejuaraan skala nasional dan internasional	Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat regional	Minimnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga skala nasional dan internasional
6.	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Rendahnya penggunaan angkutan umum (<i>load factor</i>) Bus Kota dan Angkot	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses realisasi sistem <i>buy the service pilot project</i> rute MERR (<i>Middle East Ring-Road</i>) • Dilakukan restrukturisasi angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan • Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau, seperti kendaraan pribadi dan angkutan berbasis <i>online</i> • Belum tersedianya transportasi massal yang terintegrasi dengan rute angkutan umum sehingga lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi
7.	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Kurangnya minat masyarakat dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk terlibat aktif dalam kelompok-kelompok usaha mandiri	Adanya <i>assessment</i> untuk menilai kesiapan peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik/di toko • Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi) • Peserta kembali bekerja sebagai guru/bunda PAUD • Peserta dilarang oleh suaminya • Lebih memilih untuk mengasuh anak/cucu • Peserta sakit/hamil • Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
8.	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Kurangnya jumlah pemuda kader anti kenakalan remaja untuk mendorong peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan pemuda dan organisasi pemuda	Pelaksanaan kegiatan pembentukan kader yang lebih variatif dan dilaksanakan di Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pembentukan kader berlokasi di luar Kota Surabaya Kegiatan yang akan dilakukan bersifat non-profit
9.	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SD/MI atau mengakses pendidikan tingkat SD/MI di luar Kota Surabaya Masih adanya yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs atau mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs di luar Kota Surabaya Masih ada sebagian siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, utamanya di kecamatan/kelurahan yang masih kekurangan Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah, yang lebih tinggi dari angka proyeksi Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
10.	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya kontribusi bagi hasil BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Perlunya peningkatan kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong PD. Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mengoptimalkan utilisasi aset produksi dan menekan <i>fixed cost</i> atas penyusutan aset tidak lancar, mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan baru, serta menekan piutang macet Penerapan sistem pajak secara <i>online</i> sebagai upaya intensifikasi pajak daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja BUMD RPH (Rumah Potong Hewan) yang di bawah ekspektasi Perolehan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sedikit di atas target menyebabkan kontribusi pajak terhadap PAD di bawah target

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
11.	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Belum optimalnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Melakukan percepatan proses serah terima fasilitas umum/ fasilitas sosial perumahan oleh pengembang	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat masalah pada status lahan pada kawasan permukiman pengembang yang akan diintervensi • Kurangnya partisipasi aktif pengembang untuk proses serah terima fasus/fasos perumahan sehingga menghambat upaya peningkatan layanan sarana prasarana permukiman
12.	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan yang relatif rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>city logistic</i> melalui Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial • Penyediaan bahan pangan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan bahan pangan sangat tergantung terhadap pasokan dari daerah yang rantai distribusinya terlalu panjang • Efektifitas dan efisiensi sistem distribusi barang perlu diperbaiki • Gagal panen karena kendala cuaca • Kenaikan harga BBM
13.	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, utamanya terkait pelestarian kesenian dan cagar budaya	Penyelenggaraan pentas seni budaya lokal pada berbagai even secara konsisten	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman pengaruh budaya luar terhadap pelestarian budaya lokal karena globalisasi • Pemeliharaan bangunan/situs cagar budaya yang belum konsisten
14.	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Masih relatif tingginya indeks genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm • Pembangunan pompa masih berproses • Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan • Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dirumuskan dengan mengevaluasi pencapaian program pembangunan serta data-data pembangunan daerah. Adapun capaian indikator program Tahun 2016 yang kurang dari 100% disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.173
Capaian Penyelenggaraan Urusan melalui Program Pembangunan Tahun 2016 yang Kurang dari 100%

Urusan	Program	Indikator	Capaian
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	0,00%
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	0,00%
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produktivitas Usaha Garam	1,96%
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	49,89%
Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	50,65%
		Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,56%
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Tingkat Genangan	63,34%
Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	68,70%
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	80,72%
Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	84,39%
Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Rasio aset pemkot yang tersertifikat	85,21%

Urusan	Program	Indikator	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	85,61%
		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	89,19%
Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	87,10%
Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	87,12%
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder	91,70%
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer	94,77%
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota)	96,89%
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Angkot)	97,72%
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	87,76%
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	89,63%
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90,37%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,03%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	96,48%
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	93,11%
Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	97,77%

Ketidaktercapaian indikator program pembangunan sebagai tolak ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tabel di atas dievaluasi lebih lanjut untuk diketahui permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor yang menjadi penentu keberhasilan ke depannya. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pencapaian program pembangunan daerah tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.174
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan melalui
Program Pembangunan Daerah Tahun 2016

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Penyelenggaraan diklat sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Masih rendahnya jumlah tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahun berikutnya	Penambahan jumlah auditor dan peningkatan kompetensi auditor	Tidak berimbangnya jumlah auditor dengan kebutuhan pemeriksaan yang ada (354 temuan)
2.	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan
3.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu diptimalkan serta prioritisasi lokasi berdasarkan analisa kebutuhan 2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya	1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota 2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
				dioptimalkan namun belum tercapai	
	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	<p>1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar</p> <p>2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah</p> <p>3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA</p>	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga
5.	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
6.	Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	<p>1. Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari <i>headway</i> maupun <i>load factor</i>-nya</p> <p>2. Kurang seimbangnya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan</p>	<p>1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum</p> <p>2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan <i>traffic demand management</i></p>	<p>1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan</p> <p>2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau (taksi <i>online</i>)</p> <p>3. Pertumbuhan kendaraan pribadi kurang sebanding dengan pembangunan jaringan jalan sehingga terjadi penurunan kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer dan sekunder</p>
7	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan	-	Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur
	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI 2. Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah 2. Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD 2. Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota
8	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan 3. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi 4. Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan 2. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016) 3. Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja 4. Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
9	Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	1. Pendampingan lebih intensif 2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.
10	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Masih relatif tingginya tingkat genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm 2. Pembangunan pompa masih berproses 3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun
11	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu
12	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait	1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang 2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
13	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi 2. Koordinasi dengan instansi terkait	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)
14	Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.
15	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian

Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilaksanakan berdasarkan data-data penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dengan hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.175
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Data-Data
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2016

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
1.	Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Terdapat 6 lokasi sentra usaha mikro produksi barang dan jasa mengalami penurunan omzet dari tahun 2015	Masih ada sebagian sentra usaha mikro produksi barang dan jasa yang mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya	Adanya usaha yang kontinyu dari pemerintah kota untuk membuka lokasi sentra baru	Kurangnya akomodasi dan akses bagi konsumen untuk menjangkau sentra-sentra tersebut
2.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Sebesar 74,7% (251) lembaga pendidikan non formal belum terakreditasi	Masih ada sebagian lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi	Kontinuitas pembinaan dan fasilitasi terhadap PKBM dan LKP	Terbatasnya anggaran sedangkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi cukup banyak
3.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih ada 146.905 (4,49%) warga Surabaya belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Masih ada sebagian warga Surabaya yang belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif sehingga dapat terbangun jaringan air bersih sebanyak 125.066 m	Penambahan jaringan air bersih tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui mekanisme penyertaan modal ke BUMD PDAM
4.	Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingginya jumlah kasus KDRT (77 kasus) dibandingkan tahun 2014 (70 kasus) dan 2015 (41 kasus)	Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan	Adanya PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian KDRT

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
5.	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata	Kurang memadainya fasilitas bagi wisatawan di tempat wisata ketika <i>peak season</i>	Belum optimalnya pengembangan fasilitas di ODTW	Pengembangan dan peningkatan manajemen obyek wisata unggulan untuk menanggulangi over-kapasitas tempat wisata	Keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas daya tampung obyek wisata
6.	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	Tingginya potensi permasalahan angkutan jalan disebabkan tingginya aktivitas perdagangan	Meningkatnya potensi permasalahan angkutan jalan karena adanya peningkatan aktivitas perdagangan	Adanya perhatian pemerintah kota dalam pengembangan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Banyaknya pihak yang terlibat di luar pemerintah kota sehingga menimbulkan potensi permasalahan dalam koordinasi, komunikasi serta kerjasama dengan seluruh stakeholder
7.	Urusan Wajib Tenaga Kerja	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang mencapai 7,01% di akhir tahun 2015 dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,47% dan nasional sebesar 6,18%	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya	<p>1. Adanya kegiatan yang lebih intensif dan inovatif untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja</p> <p>2. Dilakukan <i>upgrading</i> kemampuan dan keterampilan, serta mental para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan</p>	Banyaknya penganggur yang berasal dari lulusan SMA dan SMK

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
8.	Urusan Wajib Kebudayaan	Berdasarkan hasil survey, kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya masih relatif rendah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya	1. Dilakukan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat agar ikut berperan dalam mengawal sistem keamanan lingkungan. 2. Diadakan kegiatan yang dapat menyadarkan dan mengingatkan masyarakat (anak-anak maupun dewasa) atas jasa tokoh pejuang asli Surabaya	Tingginya pengaruh budaya luar dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan minimnya interaksi antar tetangga kampung
9.	Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingginya jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya (165 kejadian) dibandingkan tahun 2015 (129 kejadian)	Adanya peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya dibandingkan tahun sebelumnya	1. Adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait 2. Tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban kota	Adanya kelompok warga pendatang yang kurang memahami norma masyarakat yang sudah lebih dahulu ada

2.3.3 Identifikasi kebijakan nasional/provinsi dan dinamika lingkungan eksternal lainnya

Identifikasi permasalahan pembangunan juga diperoleh dari kebijakan nasional, provinsi dan sumber lainnya yang relevan sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel II.176

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Sumber Lainnya

Isu Penting dan Masalah Mendesak	
Tingkat Nasional	
Rancangan Tema RKP 2018: Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, yang menekankan pada 10 Prioritas Nasional	
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Perumahan dan Permukiman
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5	Ketahanan Energi
6	Ketahanan Pangan
7	Penanggulangan Kemiskinan
8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9	Pembangunan Wilayah
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Tingkat Provinsi (Jawa Timur)	
Rancangan Tema RKPD Jawa Timur 2018 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur, dengan strategi pembangunan SDM dan pembangunan fisik untuk peningkatan industri dan perdagangan melalui sektor:	
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Energi
4	Transportasi dan Jalan
5	Sumber daya Air
Lingkungan Eksternal Lainnya	
INDEF (Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017): Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia	
1	Pertumbuhan ekonomi
2	Inflasi
3	Nilai Tukar
4	Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Tingkat Kemiskinan

Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme /WFP(Food Security dan Vulnerability Atlas of Indonesia 2015) :	
1	Meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan melalui investasi infrastruktur berkelanjutan
2	Percepatan pencegahan dan penurunan malnutrisi
3	Penanganan terhadap peningkatan kerawanan pangan akibat bahaya perubahan cuaca
Nielsen (2017) : Indonesia Market - Waiting for The Wave	
1	Ketidakmerataan pendapatan
2	Inflasi
3	Penurunan Nilai Tukar mata uang
4	Korupsi

Hasil identifikasi permasalahan yang bersumber dari evaluasi capaian pelaksanaan sasaran pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan serta isu strategis yang dijelaskan sebagaimana di atas, menghasilkan faktor penghambat dan faktor penentu keberhasilan sebagai bahan dalam penentuan prioritas pembangunan 2018 pada bab berikutnya.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2016 tetap menunjukkan perkembangan yang positif, dimana produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp452.345.242,07 juta. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya masih tumbuh menggeliat ditengah kondisi ekonomi global yang mengalami pertumbuhan moderat.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kota Surabaya dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp124.801.368,44 juta. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu industri pengolahan sebesar Rp85.527.271,00 juta dan penyedia makanan dan minuman sebesar Rp70.922.863,27 juta. Selaras dengan karakteristik Kota Surabaya sebagai kota besar dengan segala aktivitas ekonomi yang padat, lapangan usaha tersier seperti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan makan minum menjadi kategori lapangan usaha yang mendominasi diantara kategori lainnya.

Besarnya produktivitas ketiga kategori lapangan usaha tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik seperti gedung perkantoran maupun perumahan di Kota Surabaya. Kategori lapangan usaha penunjang lainnya yang mengalami produktivitas tinggi selama tahun 2016 yaitu

kategori informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa pendidikan.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, maka nilai PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp504.369.488,95 juta. Sama seperti tahun 2016, kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi penopang utama perekonomian Kota Surabaya di tahun 2017. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kota Surabaya terangkum dalam Tabel III.1 berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	820.350,49	912.908,78
B	Pertambangan dan Penggalian	29.713,21	31.262,17
C	Industri Pengolahan	85.527.271,00	98.372.487,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.094.419,86	2.098.536,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678.586,67	769.554,23
F	Konstruksi	45.133.943,92	51.502.242,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.801.368,44	137.491.996,59
H	Transportasi dan Pergudangan	23.634.681,26	26.479.398,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.922.863,27	77.269.405,71
J	Informasi dan Komunikasi	24.457.105,38	27.518.137,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.105.835,15	26.681.145,97
L	Real Estate	11.889.141,32	12.361.421,97
M,N	Jasa Perusahaan	10.926.169,75	12.193.741,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.221.289,53	6.859.425,05
P	Jasa Pendidikan	11.036.182,83	12.962.295,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.389.778,02	3.782.771,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.676.541,93	7.082.758,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		452.345.242,07	504.369.488,95

Sumber data: Bappeko Surabaya, diolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK kota Surabaya menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar Rp343.922.256,47juta, yang diperkirakan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp365.520.600,22 juta. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2016 sebesar Rp97.586.534,54 juta. Kategori selanjutnya yaitu lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp66.657.284,99 juta serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp49.931.297,69 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570.894,08	620.532,95
B	Pertambangan dan Penggalian	20.183,42	21.189,37
C	Industri Pengolahan	66.657.284,99	72.045.401,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.508.608,17	1.693.212,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	528.322,40	577.553,71
F	Konstruksi	33.887.787,14	35.836.873,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97.586.534,54	104.119.428,13
H	Transportasi dan Pergudangan	16.554.190,88	18.067.358,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.931.297,69	52.416.782,96
J	Informasi dan Komunikasi	22.421.127,22	23.543.750,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.184.785,53	16.790.891,48
L	Real Estate	9.145.630,78	9.892.025,20
M,N	Jasa Perusahaan	7.761.412,08	8.395.445,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.384.611,62	4.563.254,75
P	Jasa Pendidikan	8.052.649,03	8.504.951,55

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan \Sosial	2.649.121,77	2.847.151,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.077.815,13	5.584.796,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		343.922.256,47	365.520.600,22

Sumber data: Bappeko Surabaya, diaolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

b. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kota Surabaya. Tabel III.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2016 didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 28,38 persen. Adapun sektor kedua dengan kontribusi tertinggi yaitu industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar 19,38 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi PerKategoriTerhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,38	19,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,44	0,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16
F	Konstruksi	9,85	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,38	28,49
H	Transportasi dan Pergudangan	4,81	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,52	14,34
J	Informasi dan Komunikasi	6,52	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,00	4,59
L	Real Estate	2,66	2,71

Kategori	Uraian	2016*	2017**
		(%)	(%)
M,N	Jasa Perusahaan	2,26	2,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	1,25
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	1,53

Sumber data: Bappeko Surabaya, diolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,07 persen lebih tinggi dibanding 2015 sebesar 5,97 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2015. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 8,71 persen serta jasa keuangan sebesar 7,65 persen.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2017 diperkirakan sedikit membaik secara keseluruhan, tetapi masih ada tantangan yang akan dihadapi pemerintah seperti ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, masih melambatnya perekonomian China serta dinamika harga komoditas internasional menjadi tantangan eksternal. Meskipun demikian, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang berfluktuatif namun kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan optimis tumbuh pada kisaran 5,9-6,3 persen. Penepatan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat Kota Surabaya masih diperkirakan memberikan kontribusi terbesar yang didukung oleh daya beli masyarakat yang tinggi, program pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga untuk menahan

laju inflasi serta tingginya investasi yang ditunjang oleh program program pembangunan pemerintah Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2016*	6,07
2017**	5,9-6,3

Sumber data: Bappeko Surabaya, diaolah 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

d. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2016 capaian inflasi Kota Surabaya tercatat sebesar 3,22 turun dibanding inflasi pada tahun 2015 yang sebesar 3,43 namun lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa Timur sebesar 2,74 persen dan Nasional sebesar 3,02 persen. Berdasarkan kelompoknya,tingginya capaian inflasi Kota Surabaya dibanding Jawa Timur dan Nasional dipicu oleh inflasi pada kelompok *volatile food* khususnya pada sub kelompok bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, bawangmerah, bawang putih. Faktor tidak seimbangnya permintaan dan ketersediaan ditambah lagi intensitas curah hujan yang tinggi juga turut menjadi faktor yang menyebabkan terbatasnya pasokan bahan makanan dipasaran sehingga memicu terjadinya inflasi di Kota Surabaya. Jika dilihat secara historis, Kota Surabaya selama tahun 2016 mengalami inflasi 9 kali dan mengalami deflasi sebanyak 3 kali. Komoditi yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi Kota Surabaya selama tahun 2016, antara lain bawang merah, rokok kretek filter, bawang putih, cabai rawit. Komoditi lainnya antara lain biaya pendidikan, sewa rumah dan tukang bukan mandor.

Capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sudah dikatakan cukup baik, yakni sesuai sasaran inflasi Jawa Timur dan Nasional $4\% \pm 1\%$. Meskipun inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding inflasi nasional namun capaian inflasi Kota Surabaya patut diapresiasi mengingat karakteristik Kota Surabaya cukup berbeda dibanding dengan karakteristik kab/kota lain di Jawa Timur, seperti faktor padatnya jumlah penduduk, komposisi

penggunaan listrik, ketergantungan Kota Surabaya dengan daerah penghasil akan produk pertanian serta Kota Surabaya sebagai pusat pendidikan. Berdasarkan perkembangan tersebut maka inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar $4\% \pm 1\%$ sebagaimana pada Tabel III.5 berikut.

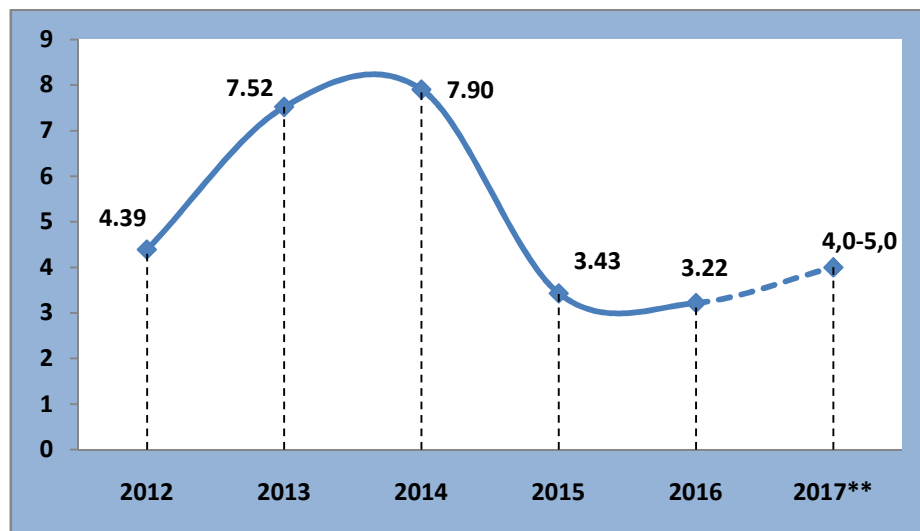
Tabel III.5
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)

Tahun	Inflasi(%)
2016	3,22
2017**	$4\% \pm 1\%$

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

**) Proyeksi Bappeko Surabaya

Grafik III.1
Grafik Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2017

**) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

e. Tingkat Investasi (PMA & PMD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menunjukkan kinerja positif ditengah kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan, investasi menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara

otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Sehingga dalam upaya menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya Pemerintah Daerah Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Seperti nampak pada Tabel 3,6 perkembangan investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir berfluktuatif namun memiliki kecenderungan yang meningkat. Artinya, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kota Surabaya ke depan tetap menjanjikan. Pada tahun 2016 realisasi investasi Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1.071.690.000.000. Sementara realisasi penanaman modal luar negeri pada tahun 2016 sebesar USD74.470.000. Mencermati perkembangan tersebut maka investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar ± Rp850.000.000.000 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan sebesar ± USD45.000.000 berasal dari penanaman modal asing. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel III.6 berikut.

Tabel III.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2012-2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2012	Rp4.396.363.620.332	USD12.176.402
		Rp298.717.956.292
2013	Rp490.271.432.498	USD23.815.769
		Rp91.883.698.021
2014	Rp639.625.900.000	USD45.294.933
		Rp-
2015	Rp828.416.500.000	USD14.675.100
		Rp-
2016*	Rp1.071.690.000.000	USD74.470.000
		Rp-
2017**	Rp850.000.000.000	USD45.000.000
		Rp-

Sumber data: BKPPM dan Bappeko Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

Semakin meningkatnya jumlah investasi yang ditamankan di Kota Surabaya mencerminkan semakin berkembangnya perekonomian Kota Surabaya. Meskipun kondisi tersebut dinilai baik, namun perlu dilakukan evaluasi terkait produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan.

Nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2015 secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel III.7. Seperti yang nampak pada tabel tersebut nilai ICOR Kota Surabaya secara rata-rata selama tahun 2011-2015 berada pada kisaran angka 3. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Harrod dan Domar bahwa angka ICOR yang dianggap memiliki investasi yang baik antara 3 – 4.

Tabel III.7
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2011-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
ICOR	4,06	3,83	3,61	3,79	4,30	3,0-4,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka proyeksi Bappeko Surabaya

f. Ekspor dan Impor

Aktivitas perdagangan di Kota Surabaya baik perdagangan antar daerah maupun antara negara yang tercermin dari nilai ekspor impor terbilang masih cukup pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, selama tahun 2016 realisasi ekspor Kota Surabaya sebesar US\$17.901.405.669. Negara tujuan ekspor Kota Surabaya selama tahun 2016 tertinggi ke negara Singapura sebesar US\$3.154.145.373,21. Selanjutnya ke negara Jepang

dan Cina dengan total ekspor masing-masing sebesar US\$2.550.177.376,66 dan US\$1.880.737.637,64.

Sementara pada sisi impor, kinerja impor non migas Kota Surabayasebesar US\$14.849.559.537. Berdasarkan asal negara yang menjadi pengimpor kebutuhan Kota Surabaya dan wilayah Indonesia bagian timur mayoritas dipenuhi oleh negara Cina sebesar US\$4.305.957.690,33 dan selanjutnya berasal dari yaitu negara-negara dikawasan ASEAN sebesar US\$2.379.698.175 serta negara kawasan Amerika sebesar US\$2.694.070.650,24.

Kinerja aktivitas perdagangan Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi global yang masih berfluktuatif, adanya rencana kebijakan baru yang akan diterapkan oleh salah satu negara mitra dagang Kota Surabaya, stabilitas nilai rupiah diperkirakan akan mampu mempengaruhi kinerja ekspor impor Kota Surabaya ke depan sehingga pada tahun 2017 kinerja perdagangan Kota Surabaya diperkirakan sebesar US\$19.585.497.986 untuk ekspor dan sebesar US\$17.030.104.405 untuk impor.

Tabel III.8
Ekspor Kota Surabaya Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017

Tahun		2016*	2017**
Ekspor	Nilai (US \$)	17.901.405.669	19.585.497.986,00
Impor	Nilai (US \$)	14.849.559.537	17.030.104.405,00

Sumber data: Bank Indonesia, 2017**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

g. Tingkat pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Nasional. Kondisi ini dapat diindikasikan bila Kota Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi pencari kerja di daerah Jawa Timur, sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, maupun Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun perbandingan TPT di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tabel berikut.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Kota Surabaya	Jawa Timur	Nasional
2016	8,4**	4,21	5,61
2017**	6,73-8,4	4,02-3,93	5,0-5,3

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, RPJMD Jawa Timur 2014-2019, RPJMN 2014-2019

h. Incremental *Labour Output Ratio* (ILOR)

Kinerja ekonomi Kota Surabaya yang tinggi tentunya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dengan seberapa besar kemampuan peningkatan ekonomi tersebut mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, instrumen *Incremental Labour Output Ratio* menjadi indikator yang tepat untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan

Berdasarkan Data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada 2012 sebesar 0,04. Sementara ILOR terendah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 0,01. Kondisi ini memberikan arti bila kenaikan output pada tahun 2014 tidak dibarengi dengan penambahan penyerapan jumlah tenaga kerja. Melihat kondisi perekonomian terkini nilai ILOR Kota Surabaya pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan besarnya sama yaitu kisaran 0,01-0,02.

Tabel III.10
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
 Tahun 2010-2014 dan Perkiraan Tahun 2015-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
ILOR	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01	0.01

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

*) Data Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Surabaya hingga tahun 2016 serta proyeksi perekonomian tahun 2017, maka berikut ini tantangan dan prospek perekonomian kota Surabaya yang akan dihadapi dan berpengaruh pada tahun 2018 dan 2019:

a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

a.1. Kekuatan

Pertama: Perekonomian Kota Surabaya yang relatif stabil dan terjaga dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Mengingat Kota Surabaya menganut sistem *small open economy* maka tidak stabilnya ekonomi dunia tentunya berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Surabaya. Namun besarnya konsumsi masyarakat disertai meningkatnya daya beli masih menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kedua: Pesatnya pertumbuhan ekonomi dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum masih menjadi salah satu kekuatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti jumlah penduduk Kota Surabaya banyak, kondisi ekonomi yang aman dan kondusif, tingkat konsumsi yang tinggi, infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku usaha baik ritel maupun eceran untuk berbisnis di Kota Surabaya.

Ketiga: Berdasarkan lokasinya yang strategis, Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan dan kota penghubung sehingga Kota Surabaya berperan penting terhadap perekonomian nasional dan wilayah-wilayah lainnya khususnya Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Kota Surabaya memiliki keuntungan sebagai kota pelabuhan karena dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di Kota Surabaya berkembang pesat sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

Keempat: Kota Surabaya memiliki potensi yang besar khususnya berupa sumber daya manusia. Adanya pembangunan smelter di Gresik dan Teluk Lamong di wilayah Surabaya barat memberikan berdampak besar terhadap meningkatnya perekonomian kota Surabaya dilihat dari tumbuhnya lapangan usaha kategori transportasi dan pergudagangan; perdagangan; industri pengolahan dan kategori jasa.

Kelima: Sesuai kebijakan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan untuk intensifikasi produk pertanian di Jawa Timur yang berdampak terhadap pasokan dan ketersediaan komoditas pertanian bagi Kota Surabaya.

Keenam: Dukungan infrastruktur semakin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kota Surabaya agar terus berkembang baik melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya, antara lain pembangunan jalan raya dan gorong-gorong. Pembangunan jalan raya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di Kota Surabaya. Tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan investasi. Pembukaan jalan baru semacam jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan frontage Ahmad Yani, diharap dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Sementara pembangunan gorong-gorong ditujukan untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Surabaya. Selain itu, rencana pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) sebagai modal transportasi modern yang akan direalisasikan pada tahun 2018, diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi kemacetan.

Keenam: Sebagai pusat dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri,

perbankan dan jasa-jasa yang dapat menunjang perkembangan perekonomian kota. Selain itu, situasi keamanan yang sangat kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik) menjadi insentif bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

Ketujuh: Kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya lebih baik. Hal ini terlihat dari APBD Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7,9 triliun dan Rp8,2 triliun. Ditargetkan, di tahun 2017 dan 2018 APBD Kota Surabaya dapat mencapai Rp8,5 triliun dan Rp8,7 triliun dan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan perekonomian Kota yang semakin stabil. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

Kedelapan: Struktur belanja pemerintah yang produktif, di mana Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar dalam menyerap belanja daerah. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

a.2. Kelemahan

Pertama: Jumlah penduduk Kota Surabaya yang sekitar 2,9 juta jiwa, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Mekanisme pengendalian dan penataan jumlah penduduk ini perlu dilakukan agar sumberdaya manusianya semakin berkualitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dan memunculkan masalah-masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, kriminalitas dan sebagainya.

Kedua: Kota Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi setiap tahunnya namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh

tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang diperkirakan meningkat di tahun 2018, yaitu sebesar 6,0-7,0%. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* serta masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill*. Ditargetkan angka ini semakin menurun pada tahun 2019 dan tahun-tahun yang akan datang.

Ketiga: Meski pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi belum cukup baik karena masih menghadapi permasalahan yakni pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan antar wilayah serta belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan.

Keempat: Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok Kota Surabaya yang masih rendah, mengingat Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil melainkan pengguna sehingga kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya seperti sayur-sayuran, beras dan komoditas pertanian lainnya dipenuhi oleh daerah lain. Kondisi tersebut yang mendorong Kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi daerah penghasil sehingga jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

Kelima: inflasi Kota Surabaya diperkirakan sama seperti sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4%-5%. Berdasarkan pemicunya, inflasi Kota Surabaya mayoritas dipicu oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*). Namun demikian inflasi kelompok *administered price* juga memiliki potensi besar dalam menyumbang inflasi Kota Surabaya seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga mengingat jumlah dan komposisi masyarakat Kota Surabaya yang sebagian besar dalam golongan tarif penyesuaian. Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat).

Keenam: Belum terealisasinya transportasi massal dalam kota yang murah dan cepat di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk Kota Surabaya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, konsumsi bahan bakar kendaraan dan volume kendaraan di Kota Surabaya semakin meningkat. Hal ini memicu kemacetan di Kota Surabaya.

Ketujuh: Beban dan belanja infrastruktur Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Disadari bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada suatu daerah dan selanjutnya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang mampu menopang pembiayaan infrastruktur Kota Surabaya kedepannya, baik dalam format kerjasama dengan pihak swasta maupun mekanisme inovatif lain yang tersedia misalnya melalui surat berharga daerah maupun pinjaman atau pendanaan oleh pemerintah pusat.

Kedelapan: Kemudahan berbisnis di Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang masih rendah dibanding negara-negara kompetitor. Berdasarkan data *Ease of Doing Business* tahun 2015, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik dari sisi biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dan izin untuk mendirikan bangunan yang dianggap masih kurang tepat.

a. Analisis Kondisi Eksternal

b.1. Peluang

Pertama: Kota Surabaya sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur akan memberikan andil besar dalam momen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Surabaya untuk membuka jaringan yang lebih mudah dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek

Kedua: adanya arus barang dan jasa dalam MEA berpotensi pada melimpahnya barang dan jasa. Disatu sisi menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Surabaya, yakni masyarakat Kota Surabaya mendapatkan barang dan

saja dengan mudah dari banyak aneka jenis baik dari sisi kualitas maupun harga. Sisi lainnya, diharapkan Kota Surabaya tidak hanya menjadi tujuan pasar melainkan juga memproduksi sendiri yang mampu bersaing baik dari produk barang dan jasa serta tenaga kerja yang terampil. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah produk-produk Usaha mikro kecil sehingga Kota Surabaya perlu memperkuat daya saing dari industri Usaha mikro kecil.

Ketiga: Potensi perekonomian Kota Surabaya yang cukup besar dan menjanjikan dengan berbagai daya dukung infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai sasaran target investasi dari luar negeri. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses kredit perbankan turut mendukung kinerja investasi di Kota Surabaya.

Keempat: Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan yang berperan sebagai pintu aktivitas perdagangan barang dan jasa di wilayah Indonesia bagian timur. Disamping itu, adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya sehingga adanya pengembangan infrastruktur yang semakin lengkap memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan barang dan jasa baik antara pulau, regional maupun perdagangan internasional.

b.2. Ancaman

Pertama: Proses perbaikan ekonomi negara-negara maju masih berjalan lambat berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Disamping itu, rencana kebijakan baru yang akan diterapkan oleh mitra dagang Kota Surabaya diperkirakan juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

Kedua: Masih tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berdampak pada peningkatan biaya impor yang lebih tinggi. Meningkatnya barang impor tersebut secara otomatis meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya memicu inflasi.

Ketiga: Semakin bebasnya arus perdagangan setelah diterapkannya MEA, maka semakin besar pula arus barang dan jasa yang akan masuk memenuhi pasar Kota Surabaya, mengingat Kota Surabaya memiliki potensi jumlah penduduk yang besar yang disertai tingkat daya beli yang tinggi tentunya menjadi sasaran pasar yang menguntungkan produsen luar, oleh karena itu diperlukan peningkatan daya saing untuk produk lokal bersaing dengan produk luar. Disamping itu, selain masuknya barang-baran produk luar, masuknya tenaga kerja asing menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal Surabaya sehingga perlu membuat solusi melalui perencanaan program maupun kebijakan untuk melindungi tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 Dan 2019

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2015 dan tahun 2016, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp388.610.266,10 juta. Melihat Kota Surabaya yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2019 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp412.993.000,72 juta. Peningkatan ini tentunya terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp110.676.192,40 juta. Sektor ini setiap tahunnya diperkirakan masih memberikan kontribusi tertinggi hingga menjadi sebesar Rp117.914.950,62 juta pada tahun 2019. Sektor terbesar kedua yang menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor industri pengolahan, dimana pada tahun 2018 menghasilkan PDRB sebesar Rp76.517.353,52 juta menjadi sebesar Rp81.459.076,59 juta di tahun 2019.

Tabel III.11
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2018**	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	641.206,87	671.877,46
B	Pertambangan dan Penggalian	23.166,14	24.719,72
C	Industri Pengolahan	76.517.353,52	81.459.076,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.787.607,04	1.922.421,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	621.776,36	683.071,79
F	Konstruksi	38.083.802,16	40.449.014,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.676.192,40	117.914.950,62
H	Transportasi dan Pergudangan	19.119.623,12	20.417.571,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.648.984,38	59.433.007,35
J	Informasi dan Komunikasi	24.987.637,54	26.533.118,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.070.375,51	18.790.786,84
L	Real Estate	10.531.337,13	11.200.095,64
M,N	Jasa Perusahaan	8.976.896,22	9.466.366,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.818.766,80	5.044.281,05
P	Jasa Pendidikan	9.093.479,29	9.630.371,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.945.665,51	3.108.761,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.856.356,11	6.243.508,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		388.610.266,10	412.993.000,72

Sumber data:**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

2) Peranan Sektoral

Hingga tahun 2018 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat, dimana struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Sehingga sektor yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut setiap tahunnya diperkirakan memberikan kontribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Surabaya dengan

kontribusi sebesar 27,70 persen dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 28,55 persen. Mengingat tingginya aktivitas ekonomi perdagangan di Kota Surabaya secara otomatis berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sektor Industri Pengolahan. Hal Tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tentunya akan mendorong meningkatnya produksi sehingga mendorong lapangan usaha industri pengolahan juga tumbuh tinggi. Pada tahun 2018 industri pengolahan diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 19,21 persen dan meningkat menjadi 19,72 pada tahun 2019. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 terangkum dalam Tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel III.12

Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2018 dan 2019 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2018**	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,01
C	Industri Pengolahan	19,21	19,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17
F	Konstruksi	9,93	9,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,70	28,55
H	Transportasi dan Pergudangan	5,34	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,47	14,39
J	Informasi dan Komunikasi	5,33	6,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,96	4,55
L	Real Estate	2,68	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,47	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	1,22
P	Jasa Pendidikan	2,44	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,51	1,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan pada kisaran 6,0-6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi dibanding capaian pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Meskipun kondisi ekonomi global masih berfluktuatif, namun pondasi utama makro Kota Surabaya yaitu tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang disertai tingkat daya beli yang tinggi diperkirakan masih mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Disamping itu, adanya rencana program-program pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi faktor dasar perkiraan ekonomi ke depan tetap tumbuh positif.

Tabel III.13
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019(dalam Persen)

Uraian	2018**	2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0-6,5	6,1-6,7

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

4) Tingkat Inflasi

Berdasarkan perkembangan inflasi terkini dan mencermati perkembangan indikator harga, realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 3,22 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya tersebut lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur (2,74 persen) dan Nasional (3,02 persen), namun inflasi Kota Surabaya tersebut tergolong masih rendah dan memenuhi target sasaran inflasi nasional yaitu $4\% \pm 1\%$. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dan 2019 inflasi Kota Surabaya diperkirakan masih dalam sasaran ekonomi nasional yaitu $4\% \pm 1\%$. Pemicu inflasi Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) mengingat kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya masih dipenuhi oleh daerah-daerah penghasil disekitar wilayah Kota Surabaya.

Tabel III.14
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019(dalam Persen)

Uraian	2018**	2019**
Inflasi (%)	4,0-5,0	4,0-5,0

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu *soft* infrastruktur maupun *hard* infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi target investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, investasi Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan meningkat baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2018 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar Rp765,42milyar yang berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar USD 33,18 juta. Performa positif ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2019 dengan capaian investasi sebesar Rp811,32 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD38,22 juta.

Tabel III.15
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN (dalam Milyar Rp)	PMA (JutaUSD)
2018**	765,42	33,18
2019**	811,32	38,22

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya makapada tahun 2018 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$22.583.990.048, sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$19.591.246.281. Kemudian kinerja perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan masing-masing mencapai US\$25.294.068.854 untuk ekspor dan US\$21.550.370.909 untuk impor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.16

Tabel III.16
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam US\$)

Tahun	2018**	2019**
Ekspor	22.583.990.048	25.294.068.854
Impor	19.591.246.281	21.550.370.909

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya pada tahun 2017-2018 diestimasikan mengalami sedikit penurunan, dengan asumsi kondisi perekonomian berjalan sesuai dengan estimasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel III.17.

Tabel III.17
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018**	6,0 - 7,0
2019**	6,0 - 7,0

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

A. Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar 55,56% dan pada tahun 2018 sebesar 57,46% atau mengalami peningkatan sebesar 1,90% sebagaimana tersaji dalam Tabel III.18 berikut :

Tabel III.18
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	4.035.649.478.398	60,97%
2	Realisasi 2016	6.825.754.275.892	4.090.206.769.388	59,92%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	4.212.569.176.921	55,56%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	4.559.906.482.546	57,46%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 74,24% dan pada tahun 2018 sebesar 74,73% atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% (Tabel III.19).

Tabel III.19
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	2.738.899.424.558	67,87%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	3.000.152.510.888	73,35%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	3.127.522.197.439	74,24%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	3.407.812.453.581	74,73%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 7,55% dan 7,73% pada tahun 2018, atau mengalami penurunan 0,18% (Tabel III.20)

Tabel III.20
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	537.319.752.463	13,31%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	339.453.230.306	8,30%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	318.061.505.925	7,55%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	352.278.666.039	7,73%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2017 sebesar 3,95% dan pada tahun 2018 sebesar 3,23% atau mengalami pengurangan 0,72% hal ini dikarenakan ada

penyesuaian pada rencana PAK tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan laba rugi audit tahun 2016 (Tabel III.21).

Tabel III.21
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
terhadap PAD
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	135.324.221.731	3,35%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	131.847.096.407	3,22%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	166.311.576.799	3,95%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	147.368.580.989	3,23%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2017 sebesar 14,26% sedangkan Tahun 2018 diproyeksikan 14,31% atau mengalami peningkatan sebesar 0,05% hal ini dikarenakan untuk penentuan target murni denda tahun 2018 tidak diperhitungkan. (Tabel III.22).

Tabel III.22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	624.106.079.645	15,46%
2	Realisasi 2016	4.090.206.769.388	618.754.058.188	15,13%
3	Target 2017	4.212.569.176.921	600.673.896.758	14,26%
4	Proyeksi 2018	4.559.906.482.546	652.446.781.937	14,31%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2017 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 29,91% sedangkan proyeksi Tahun 2018 sebesar 29,80% atau penurunan sebesar 0,11% sebagaimana tersaji pada Tabel III.23.

Tabel III.23
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.384.772.424.683	20,92%
2	Realisasi 2016	6.825.754.275.892	1.941.019.526.654	28,44%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	2.267.796.097.195	29,91%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	2.364.949.471.866	29,80%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap Dana Perimbangan pada Tahun 2017 sebesar 19,24% sedangkan Tahun 2018 sebesar 22,25% atau mengalami peningkatan 3,02% sebagaimana tersaji pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	206.314.915.900	14,90%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	393.908.771.611	20,29%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	436.222.686.000	19,24%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	526.305.837.327	22,25%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan Tahun 2017 sebesar 1,21% sedangkan Tahun 2018 sebesar 1,46% atau mengalami peningkatan 0,25% sebagaimana tersaji pada Tabel III.25.

Tabel III.25
Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Bukan Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	23.946.332.783	1,73%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	18.880.139.043	0,97%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	27.543.339.103	1,21%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	34.613.562.447	1,46%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2017 sebesar 59,31% sedangkan Tahun 2018 sebesar 56,87% atau mengalami penurunan 2,44% sebagaimana tersaji pada Tabel III.26.

Tabel III.26
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	1.147.385.486.000	82,86%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	1.233.380.404.000	63,54%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	1.345.040.944.092	59,31%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	1.345.040.944.092	56,87%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2017 sebesar 20,24% sedangkan Tahun 2018 sebesar 19,41% atau mengalami penurunan sebesar 0,83% hal ini dikarenakan penentuan target tahun 2018 disamakan dengan tahun 2017 sebagaimana tersaji pada Tabel III.27.

Tabel III.27
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Khusus	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	7.125.690.000	0,51%
2	Realisasi 2016	1.941.019.526.654	294.850.212.000	15,19%
3	Target 2017	2.267.796.097.195	458.989.128.000	20,24%
4	Proyeksi 2018	2.364.949.471.866	458.989.128.000	19,41%

Sumber data : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2017 kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,53% sedangkan proyeksi Tahun 2018 sebesar 12,74% atau mengalami penurunan sebesar 1,79% sebagaimana tersaji pada Tabel III.28.

Tabel III.28
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tehadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.198.609.257.856	18,11%
2	Realisasi 2016	6.827.414.522.004	794.527.979.850	11,64%
3	Target 2017	7.582.087.098.432	1.101.721.824.316	14,53%
4	Proyeksi 2018	7.936.256.667.299	1.011.400.712.887	12,74%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi proyeksi dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2017 sebesar 95,46% sedangkan Tahun 2018 sebesar 95,05% maka kontribusinya mengalami penurunan sebesar 0,41% penurunan pada tahun 2018 dikarenakan pada rencana PAK 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan target pendapatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.29
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
tehadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	707.673.658.856	59,04%
2	Realisasi 2016	794.527.979.850	786.702.579.850	99,02%
3	Target 2017	1.101.721.824.316	1.051.700.059.316	95,46%
4	Proyeksi 2018	1.011.400.712.887	961.378.947.887	95,05%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

2. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Dana Insentif Daerah terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2017 sebesar 4,54% sedangkan Tahun 2018 sebesar 4,95% maka kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 0,41% Alokasi Dana

Insentif Daerah (DID) Tahun 2018 dengan asumsi opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Kota Surabaya WTP (sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA. 2017 Lampiran XVIII Rincian DID, untuk alokasi APBD 2017). sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.30
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	24.802.882.000	2,07%
2	Realisasi 2016	794.527.979.850	5.000.000.000	0,63%
3	Target 2017	1.101.721.824.316	50.021.765.000	4,54%
4	Proyeksi 2018	1.011.400.712.887	50.021.765.000	4,95%

Sumber data: BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam Tabel III.31.

Tabel III.31
Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Realisasi 2015-2016, Target 2017, Proyeksi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Pendapatan Asli Daerah	4.035.649.478.398	4.090.206.769.388	4.212.569.176.921	4.559.906.482.546
	a. Pajak Daerah	2.738.899.424.558	3.000.152.384.487	3.127.522.197.439	3.407.812.453.581
	b. Retribusi Daerah	537.319.752.463	339.453.230.306	318.061.505.925	352.278.666.039
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	135.324.221.731	131.847.096.407	166.311.576.799	147.368.580.989
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	624.106.079.645	618.754.058.188	600.673.896.758	652.446.781.937
2	Dana Perimbangan	1.384.772.424.683	1.941.019.526.654	2.267.796.097.195	2.364.949.471.866
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	206.314.915.900	393.908.771.611	436.222.686.000	526.305.837.327
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	23.946.332.783	18.880.139.043	27.543.339.103	34.613.562.447
	c. Dana Alokasi Umum	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000	1.345.040.944.092	1.345.040.944.092
	d. Dana Alokasi Khusus	7.125.690.000	294.850.212.000	458.989.128.000	458.989.128.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.198.609.257.856	794.527.979.850	1.101.721.824.316	1.011.400.712.887
	a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	707.673.658.856	786.702.579.850	1.051.700.059.316	961.378.947.887
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	463.025.317.000	-	-	-
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	3.107.400.000	2.825.400.000	-	-
	d. Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.802.882.000	5.000.000.000	50.021.765.000	50.021.765.000
	JUMLAH PENDAPATAN	6.619.031.160.937	6.825.754.275.892	7.582.087.098.432	7.936.256.667.299

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp6.825.754.275.892,- dan target tahun 2017 sebesar Rp7.582.087.098.432,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp7.936.256.667.299,- atau meningkat sebesar Rp354.169.568.867,- (4,67%) dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp4.090.206.769.388,- dan target tahun 2017 sebesar Rp4.212.569.176.921,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

diperkirakan sebesar Rp4.559.906.482.546,- meningkat sebesar Rp347.337.305.625,- atau 8,25%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp3.000.152.384.487,- dan target tahun 2017 sebesar Rp3.127.522.197.439,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp3.407.812.453.581,-

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp339.453.230.306,- dan target tahun 2017 sebesar Rp318.061.505.925,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp352.278.666.039,-

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- dan target tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp147.368.580.989,- penurunan proyeksi di tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian rencana PAK di tahun 2017 sebesar Rp143.751.180.492,- atau berkurang sebesar Rp22.460.396.307,-

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp618.754.058.188,- dan target tahun 2017 sebesar Rp600.673.896.758,- maka proyeksi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah tahun 2018 sebesar Rp652.446.781.937,-

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.941.019.526.654,- dan target tahun 2017 sebesar Rp2.267.796.097.195,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp2.364.949.471.866,- terjadi peningkatan sebesar Rp97.153.374.671,- atau 4,28% dari tahun 2017.

Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,- dan target tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp526.305.837.327,-.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp18.880.139.043,- dan target tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp34.613.562.447,-.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp1.345.040.944.092,-

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,- dan target tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar Rp458.989.128.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.101.721.824.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.011.400.712.887,- atau mengalami penurunan sebesar Rp90.321.111.429,- (8,20%).

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp786.702.579.820,- dan target tahun 2017 sebesar Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan turun yaitu sebesar Rp961.378.947.887,- .
- 2) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah realisasi tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- target tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp50.021.765.000,- karena Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2018 :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat ;

3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Strategi pencapaian Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi:

1. Updating data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak online;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan update data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”**, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2017 diarahkan untuk :

1. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
4. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) non Guru;
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
8. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

9. Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp7.153.948.694.043,- , target tahun 2017 sebesar Rp8.561.848.147.400,- maka perkiraan belanja tahun 2018 sebesar Rp8.862.420.984.171,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.230.032.838.927,- (25,16%) dari total belanja)
2. Belanja Langsung sebesar Rp6.632.388.145244,- (78,84%) dari total belanja)

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp2.329.197.160.133,- dan target APBD 2017 sebesar Rp.2.274.681.651.124,- maka perkiraan belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar Rp2.230.032.838.927,- dengan rincian :

1. Belanja Pegawai Rp2.145.977.430.927,-
2. Belanja Subsidi Rp19.005.408.000,-
3. Belanja Hibah Rp52.000.000.000,-
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp750.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp2.300.000.000,-
6. Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,-

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016 serta target belanja daerah tahun 2017 dan proyeksi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.32
Belanja Daerah Kota Surabaya
Realisasi Tahun 2015-2016, Target 2017, Proyeksi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Belanja Tidak Langsung	2.202.272.347.768	2.326.910.015.520	2.274.681.651.124	2.238.879.931.522
	a. Belanja Pegawai	1.949.428.530.122	2.092.288.193.728	2.065.242.895.087	2.154.824.523.522
	b. Belanja Subsidi		19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000
	c. Belanja Hibah	252.111.246.646	214.488.143.792	177.606.478.734	52.000.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-			
	e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-		750.000.000	750.000.000
	f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	732.571.000	1.128.270.000	2.076.869.303	2.300.000.000
	g. Belanja Tidak Terduga	-		10.000.000.000	10.000.000.000
2	Belanja Langsung	4.288.087.411.764	4.824.751.533.910	6.287.166.496.276	6.623.541.052.648
	a. Belanja Pegawai	376.989.023.238	448.667.099.371	470.316.573.929	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.125.973.133.026	2.586.690.389.712	3.153.463.390.147	
	c. Belanja Modal	1.785.125.255.500	1.789.394.044.827	2.663.386.532.200	
	TOTAL BELANJA DAERAH	6.490.359.759.532	7.151.661.549.430	8.561.848.147.400	8.862.420.984.170

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2017.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2016 serta target pembiayaan daerah tahun 2017 dan proyeksi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.33
Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Realisasi 2015-2016, Target 2017, Estimasi 2018

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Proyeksi 2018
1	Penerimaan Pembiayaan				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.311.544.540.067	1.414.929.806.905	998.767.926.303	934.989.831.871
	b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.865.433	13.183.336,00		
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.311.550.405.500	1.414.942.990.241	998.767.926.303	934.989.831.871
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	25.292.000.000	20.000.000.000	19.006.877.335	8.825.515.000
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.292.000.000	20.000.000.000	19.006.877.335	8.825.515.000

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah 2016.

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp934.989.831.871,- mengalami penurunan sebesar Rp63.778.094.432,- (6,39%) dari tahun 2017.

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pada tahun 2018 sebesar Rp14.000.000.000,- yang rencananya akan diberikan kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp8.825.515.000,-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyusunan RKPD Kota Surabaya berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, serta mengacu pada RKP Tahun 2018 untuk keselarasan program pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah:

**“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan
Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM
Berkarakter Pancasila”**

Dengan berpedoman pada Tema Pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
			Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
			Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
		Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
			Meningkatkan distribusi pangan
		Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
			Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
	2. Memberdayakan masyarakat dan	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
	3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
			Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Meningkatkan kualitas udara dan air
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
		Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
		Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
	6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
		Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
	7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik
			Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
	8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
		Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
			Meningkatkan produktivitas koperasi
			Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
			Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
			Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
	10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
		Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
		Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
			Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
			Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
		Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU
			Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut (sesuai dengan urutan prioritas) :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan;
2. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda;
3. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata;
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan;
7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif;
8. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
9. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja;
10. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian;
11. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila;
13. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak;
14. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Tabel IV.2
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1	Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SD/MI atau mengakses pendidikan tingkat SD/MI di luar Kota Surabaya	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, utamanya di kecamatan/kelurahan yang masih kekurangan	Tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah, yang lebih tinggi dari angka proyeksi	1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan
2	Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs atau mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs di luar Kota Surabaya	Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis	Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs		
3	Masih ada sebagian siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs				
4	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini		

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
5	Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah	Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD		
6	Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs	Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis	Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota		
7	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan		Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur		
8	Masih ada sebagian lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi	Kontinuitas pembinaan dan fasilitasi terhadap PKBM dan LKP	Terbatasnya anggaran sedangkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi cukup banyak		2 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
9	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.		3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
						4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
						5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
						6	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
						7	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
10	Rendahnya penggunaan angkutan umum (load factor) Bus Kota dan Angkot	1. Percepatan proses realisasi sistem buy the service pilot project rute MERR (Middle East Ring-Road) 2. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum	1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan 2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau, seperti kendaraan pribadi dan angkutan berbasis online 3. Belum tersedianya transportasi massal yang terintegrasi dengan rute angkutan umum sehingga lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi	2	Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda	1	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
						2	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
11	Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari headway maupun load factor-nya	Kurang seimbangnya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan	1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum 2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan traffic demand management			3	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
12	Masih ada sebagian warga Surabaya yang belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif sehingga dapat terbangun jaringan air bersih sebanyak 125.066 m	Penambahan jaringan air bersih tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui mekanisme penyertaan modal ke BUMD PDAM	3	Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata	1	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
13	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu			2	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU
						3	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
14	Masih relatif tingginya indeks genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm 2. Pembangunan pompa masih berproses			4	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
			3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun				
15	Masih relatif tingginya angka pelanggaran disiplin aparatur	Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing	Kurangnya pemahaman PD terhadap peraturan tentang disiplin aparatur	4	Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
16	Kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural	1. Adanya pengawasan melekat (waskat) terkait pelanggaran disiplin kepada PNS di lingkungan PD masing-masing 2. Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kurang efektifnya mekanisme pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi aparatur yang sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur			2	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
						3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
17	Masih belum optimalnya kontribusi bagi hasil BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	Mendorong PD. Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mengoptimalkan utilisasi aset produksi dan menekan fixed cost atas penyusutan aset tidak lancar, mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan baru, serta menekan piutang macet	Kinerja BUMD RPH (Rumah Potong Hewan) yang di bawah ekspektasi			4	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
18	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian				
19	Perlunya peningkatan kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penerapan sistem pajak secara online sebagai upaya intensifikasi pajak daerah	Perolehan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sedikit di atas target menyebabkan kontribusi pajak terhadap PAD di bawah target				
20	Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan	Perbaikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan	Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya				
21	Rendahnya realisasi dana perimbangan	Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016)				
22	Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi		Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja				

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
23	Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah		Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur				
24	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait	1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang 2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia	5	Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi	1	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
25	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi 2. Koordinasi dengan instansi terkait	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)			2	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
						3	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
						4	Pengembangan penanggulangan sistem bencana yang antisipatif dan tanggap

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
26	Adanya kendala dalam penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Pembangunan lapangan olahraga sebagai RTH 2. Penambahan panjang dan lebar jalur hijau	Adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau	6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan	1	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu diptimalkan serta prioritas lokasi berdasarkan analisa kebutuhan 2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai	1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota 2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir			2	Meningkatkan kualitas udara dan air
28	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar 2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga			3	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
		3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA					
29	Belum optimalnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Melakukan percepatan proses serah terima fasilitas umum/fasilitas sosial perumahan oleh pengembang	<p>1. Terdapat masalah pada status lahan pada kawasan permukiman pengembang yang akan diintervensi</p> <p>2. Kurangnya partisipasi aktif pengembang untuk proses serah terima fasus/fasos perumahan sehingga menghambat upaya peningkatan layanan sarana prasarana permukiman</p>	7	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif	<p>1 Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni</p> <p>2 Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif</p> <p>3 Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi</p>	

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
30	Kurangnya minat masyarakat dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk terlibat aktif dalam kelompok-kelompok usaha mandiri	Adanya assessment untuk menilai kesiapan peserta	1. Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik/di toko 2. Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi) 3. Peserta kembali bekerja sebagai guru/bunda PAUD 4. Peserta dilarang oleh suaminya 5. Lebih memilih untuk mengasuh anak/cucu 6. Peserta sakit/hamil 7. Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)	8	Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	1	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
						2	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
31	Belum efektifnya pemuda kader anti kenakalan remaja untuk mendorong peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan pemuda dan organisasi pemuda	Pelaksanaan kegiatan pembentukan kader yang lebih variatif dan dilaksanakan di Kota Surabaya	1. Kegiatan pembentukan kader berlokasi di luar Kota Surabaya 2. Kegiatan yang akan dilakukan bersifat non-profit	9	Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja	1	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
32	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan				

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
33	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya	1. Adanya kegiatan yang lebih intensif dan inovatif untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja 2. Dilakukan upgrading kemampuan dan keterampilan, serta mental para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Banyaknya penganggur yang berasal dari lulusan SMA dan SMK		2 Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
					3 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
34	Masih ada sebagian sentra usaha mikro produksi barang dan jasa yang mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya	Adanya usaha yang kontinyu dari pemerintah kota untuk membuka lokasi sentra baru	Kurangnya akomodasi dan akses bagi konsumen untuk menjangkau sentra-sentra tersebut	10	Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian
35	Adanya ketidakselarasan dalam penetapan target program dan target sasaran pertumbuhan produktivitas koperasi	Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan omzet koperasi baik yang telah aktif, maupun yang baru direvitalisasi	Kurang optimalnya penetapan kinerja perencanaan untuk mendorong tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi		1 Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
36	Data Produktivitas tahun 2016 tidak termasuk koperasi yang direvitalisasi karena belum ber-RAT lagi				2 Meningkatkan produktivitas koperasi
37	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	1. Pendampingan lebih intensif	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.		3 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
		2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan					
38	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan			4	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
39	Belum optimalnya pengembangan fasilitas di ODTW	Pengembangan dan peningkatan manajemen obyek wisata unggulan untuk menanggulangi over-kapasitas tempat wisata	Keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas daya tampung obyek wisata			5	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
						6	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
						7	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
40	Adanya peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya dibandingkan tahun sebelumnya	1. Adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait	Adanya kelompok warga pendatang yang kurang memahami norma masyarakat yang sudah lebih dahulu ada	11	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
		2. Tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota				2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
41	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, utamanya terkait pelestarian kesenian dan cagar budaya	Penyelenggaraan pentas seni budaya lokal pada berbagai even secara konsisten	1. Ancaman pengaruh budaya luar terhadap pelestarian budaya lokal karena globalisasi 2. Pemeliharaan bangunan/situs cagar budaya yang belum konsisten	12	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila	1	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
42	Kurangnya atlit yang berprestasi di kejuaraan skala nasional dan internasional	Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat regional	Minimnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga skala nasional dan internasional			2	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
43	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya	1. Dilakukan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat agar ikut berperan dalam mengawal sistem keamanan lingkungan. 2. Diadakan kegiatan yang dapat menyadarkan dan mengingatkan masyarakat (anak-anak maupun dewasa) atas jasa tokoh pejuang asli Surabaya	Tingginya pengaruh budaya luar dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan minimnya interaksi antar tetangga kampung			3	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
44	Masih kurangnya kemampuan membaca siswa	Adanya pemetaan untuk pelaksanaan pendampingan di sekolah, khususnya pada sekolah yang hasil reading text level (RTL) siswanya masih kurang	Kurang berimbang jumlah petugas dengan jumlah perpustakaan sehingga tidak tersedia cukup tenaga dan waktu dalam melaksanakan pendampingan			4	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
45	Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan	Adanya PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian KDRT	13	Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan
						2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
46	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan yang relatif rendah	1. Pengembangan city logistic melalui Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial 2. Penyediaan bahan pangan mandiri	1. Pemenuhan kebutuhan bahan pangan sangat tergantung terhadap pasokan dari daerah yang rantai distribusinya terlalu panjang 2. Efektifitas dan efisiensi sistem distribusi barang perlu diperbaiki 3. Gagal panen karena kendala cuaca 4. Kenaikan harga BBM	14	Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan	1	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
						2	Meningkatkan distribusi pangan
47	Meningkatnya potensi permasalahan angkutan jalan karena adanya peningkatan aktivitas perdagangan	Adanya perhatian pemerintah kota dalam pengembangan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Banyaknya pihak yang terlibat di luar pemerintah kota sehingga menimbulkan potensi permasalahan dalam koordinasi, komunikasi serta kerjasama dengan seluruh stakeholder	15	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau	1	Peningkatan sistem manajemen city logistik

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
						2	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

Tabel IV.3.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
1	Pendidikan							
	a	Urusan Pendidikan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	759.357.992.510	-	759.357.992.510
			Program Penerapan Kurikulum	-	-	32.253.264.427	-	32.253.264.427
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru	-	203.056.304.645	-	203.056.304.645
			Program Peningkatan Prestasi	-	-	16.639.415.195	-	16.639.415.195
			Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	-	-	676.873.885	-	676.873.885
			Program Pendidikan Kesetaraan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	2.566.895.564	-	2.566.895.564
			Program Pendidikan Masyarakat Serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Program Prioritas Pendidikan Vokasi	-	45.899.935.599	-	45.899.935.599

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	b	Urusan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	-	28.696.640.060	-	28.696.640.060
2	Kesehatan							
	a	Urusan Kesehatan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	-	172.102.248.850	-	172.102.248.850
				Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	-	32.575.928.850	-	32.575.928.850
			Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak		-	6.743.194.500	-	6.743.194.500
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu	-	-	89.558.291.105	-	89.558.291.105
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/puskesmas Pembantu	-	-	33.105.024.423	-	33.105.024.423

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	63.474.010.931	-	63.474.010.931
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	77.691.398.575	-	77.691.398.575
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	-	-	82.618.181.818	-	82.618.181.818
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Prioritas Penguatan Preventif dan Promotif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	-	95.268.407.964	-	95.268.407.964
				Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
	b	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	2.696.333.200	-	2.696.333.200
			Program Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	11.406.361.550	-	11.406.361.550

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD							
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)					
3	Perumahan dan Permukiman											
	a	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak	-	406.324.174.473	-	406.324.174.473				
				Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi								
				Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar								
	b	Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)	-	550.593.997.280	-	550.593.997.280				
			Program Pengamanan Aset	Program Prioritas Reforma Agraria					-	10.931.429.444	-	10.931.429.444
			Program Pengelolaan Aset	-					21.873.037.553	-	21.873.037.553	
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata											
	a	Urusan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Prioritas Perbaikan Iklim	-	4.827.531.970	-	4.827.531.970				
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	14.261.160.161	-	14.261.160.161				

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		-	2.649.206.863	-	2.649.206.863
			Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	-	-	895.390.444	-	895.390.444
	b	Urusan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	6.935.268.219	-	6.935.268.219
			Program Pemasaran Pariwisata		-	11.072.764.900	-	11.072.764.900
			Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif		-	3.920.106.860	-	3.920.106.860
			Program Legalisasi Usaha Kreatif		-	163.518.125	-	163.518.125
			Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif		-	191.350.150	-	191.350.150
			Program Pengembangan Kerjasama Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	-	-	1.068.201.035	-	1.068.201.035
	c	Urusan Kebudayaan	Program Perlindungan Budaya Lokal	-	-	1.709.008.125	-	1.709.008.125
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	-	-	7.854.259.813	-	7.854.259.813

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal	-	-	19.226.183.221	-	19.226.183.221
	d	Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	222.056.175	-	222.056.175
			Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		-	6.266.810.680	-	6.266.810.680
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	22.412.741.757	-	22.412.741.757
				Program Prioritas Reformasi Birokrasi				
	e	Urusan Perdagangan	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa	-	1.086.610.014	-	1.086.610.014
			Program Perluasan Jangkauan Pemasaran		-	43.779.185.546	-	43.779.185.546
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-	3.352.411.395	-	3.352.411.395

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	-	-	2.349.787.070	-	2.349.787.070
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	-	-	1.059.409.904	-	1.059.409.904
5	Ketahanan Energi							
	a	Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	-	-	116.671.171.519	-	116.671.171.519
			Program Pengelolaan Kebersihan	-	-	377.308.746.498	-	377.308.746.498
			Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	-	-	13.558.217.200	-	13.558.217.200
			Program Upaya Konservasi Energi	Program Prioritas Energi Baru	-	504.293.725	-	504.293.725
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	-	1.786.639.175	-	1.786.639.175
6	Ketahanan Pangan							
	a	Urusan Pangan	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan	-	7.881.776.372	-	7.881.776.372
				Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-		-	

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	b	Urusan Pertanian	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	-	1.711.820.686	-	1.711.820.686
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan	-	3.197.587.680	-	3.197.587.680
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak		-	1.201.219.374	-	1.201.219.374
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Peternakan		-	1.672.126.980	-	1.672.126.980
	c	Urusan Kelautan dan Perikanan	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan	-	4.834.725.264	-	4.834.725.264
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan		-	668.804.212	-	668.804.212

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
7	Penanggulangan Kemiskinan						
a	Urusan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	-	193.728.164.356	-	193.728.164.356
			Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	3.270.335.217	-	3.270.335.217
b	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	21.745.636.315	-	21.745.636.315
c	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	-	-	6.475.538.432	-	6.475.538.432
		Program Bina Keluarga	-	-	2.175.070.814	-	2.175.070.814
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	-	9.421.262.229	-	9.421.262.229
d	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	3.385.777.453	-	3.385.777.453

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	-	163.840.554.642	-	163.840.554.642
	e	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	-	234.561.425	-	234.561.425
			Program Standarisasi Produk Usaha Mikro		-	1.788.827.363	-	1.788.827.363
		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	-		2.291.363.704	-	2.291.363.704	
		Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	-		2.481.739.475	-	2.481.739.475	
8	Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman							
	a	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	495.060.915.773	-	495.060.915.773
			Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-modat)	-	292.813.029.495	-	292.813.029.495

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi	-	7.155.430.373	-	7.155.430.373
			Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	-	-	209.596.996.556	-	209.596.996.556
			Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	-	-	863.261.284	-	863.261.284
			Program Perencanaan Ruang Kota	-	-	6.363.961.500	-	6.363.961.500
			Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	-	-	12.419.878.861	-	12.419.878.861
	b	Urusan Perhubungan	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)	-	326.978.597.434	-	326.978.597.434
			Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan		-	50.610.142.027	-	50.610.142.027
			Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang		-	782.334.250	-	782.334.250
	c	Urusan Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	-	41.774.934.756	-	41.774.934.756

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	21.628.407.580	-	21.628.407.580
	d	Statistik	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	-	-	1.156.275.660	-	1.156.275.660
9	Pembangunan Wilayah							
			Program Penanggulangan Bencana	Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	72.210.566.143	-	72.210.566.143
10	Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan							
	a	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penegakan Peraturan Daerah	Program Prioritas Kepastian Hukum	-	46.586.066.829	-	46.586.066.829
			Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan	-	40.592.342.833	-	40.592.342.833
	b	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	3.321.888.385	-	3.321.888.385

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Prioritas Kepastian Hukum	-	6.094.368.260	-	6.094.368.260
			Program Penataan Daerah Otonom	-	-	146.551.018.926	-	146.551.018.926
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	-	-	2.012.367.909	-	2.012.367.909
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	96.300.023.523	-	96.300.023.523
			Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	9.376.909.840	-	9.376.909.840
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	-	11.848.554.816	-	11.848.554.816
			Program Kerjasama Bidang Perdagangan	-	-	217.799.500	-	217.799.500
			Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	-	-	1.231.333.225	-	1.231.333.225

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
11	Penunjang Urusan							
	a	Penunjang Urusan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	6.013.642.789	-	6.013.642.789
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	-	-	28.317.698.703	-	28.317.698.703
	b	Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	5.551.660.413	-	5.551.660.413
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-	30.080.067.724	-	30.080.067.724
	c	Penunjang Urusan Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		-	6.636.744.736	-	6.636.744.736
	d	Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	14.354.605.108	-	14.354.605.108
	e	Penunjang Urusan Kearsipan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	-	5.766.453.894	-	5.766.453.894

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	f	Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	419.393.850.855	-	419.393.850.855
			Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	-	-	360.630.657.749	-	360.630.657.749

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana Tabel IV.4 tentang Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan			
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	36,78%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		3. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%	
		4. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	71,40%	
		5. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	76,50%	
		6. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	66,83%	
	Program Penerapan Kurikulum	1. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	49,11%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%	
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru PAUD yang kompeten	65,63%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	74,23%	
		3. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	80,77%	
		4. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,73%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		5. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	94,79%	
		6. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	60,78%	
		7. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	50,54%	
		8. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	56,39%	
	Program Peningkatan Prestasi	1. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	46,15%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%	
		3. Persentase PAUD beprestasi	1,70%	
	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	60,88%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	42,95%	
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	81,85%	
		4. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	48,98%	
	Program Pendidikan Kesetaraan	1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	71,07%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88,51%	
		3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,98%	
	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,73%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	1,04%	
	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	12%	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,47%	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,95%	
		3. Cakupan kunjungan neonatal	85%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		lengkap		
		4. Cakupan imunisasi dasar lengkap	93,83%	
	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	Dinas Kesehatan
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%	
		3. Persentase Penimbangan balita	81,40%	
		4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,64%	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	76%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	64,52%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	84%	UPT Dinas Kesehatan (RSUD Bhakti Dharma Husada)
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	84%	UPT Dinas Kesehatan (RSUD dr. Mohamad Soewandhie)
		3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	73%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	77%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	80%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	45 menit	
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	48 hari	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase rumah sehat	76,50%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	82%	
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	84%	
	Program Keluarga Berencana	1. Persentase peserta KB baru	81,95%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase peserta KB aktif	78,40%	
		3. Persentase peserta KB aktif yang <i>drop out</i> kontrasepsi	5,40%	
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	20,50%	
	Program Bina Keluarga	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	70,39%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,30%	
2	Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda			
	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jalan yang terbangun (%)	0,36%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	17,18%	
		3. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	7,74%	
		4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%	
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	30,06 km/jam	Dinas Perhubungan
		2. Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	1. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	25 menit	Dinas Perhubungan
		2. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	42,57 menit	
		3. Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	
3	Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	1. Lama genangan (menit)	50 menit	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2. Luas genangan (ha)	1179 ha	
		3. Tinggi genangan (cm)	15 cm	
		4. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	
	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	1. Persentase pelanggan baru PDAM (%)	14,32%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2600250 m	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Persentase pemasangan PJU hemat energi	74,26%	
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	1. Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
4	Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan			
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	Inspektorat Badan Kepegawaian dan Diklat
		2. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%	
		3. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%	
		4. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%	
		5. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	
		6. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	90,33%	Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Daya Aparatur	2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	49,05%	
		3. Persentase terbentuknya dan berfungsinya <i>assessment centre</i>	40%	
		4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	92%	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	Bagian Organisasi
		2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	30%	
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	
	Program Penataan Daerah Otonom	1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 31 Kecamatan
		2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	56,89%	
	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	41,70%	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2. Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	Sekretariat DPRD
		2. Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	1. Persentase pemanfaatan aset	92%	Seluruh Perangkat Daerah
		2. Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	40%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	79%	
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80,77%	
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
		6. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	Bagian Umum dan Protokol
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	Bagian Administrasi Kerjasama
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	60%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	Seluruh Perangkat Daerah
		2. Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	
		3. Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	
		4. Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%	
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	Badan Perencanaan Pembangunan
		2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek <i>output</i>	97%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	Bagian Hukum
		2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74%	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	1. Rata-rata toleransi (<i>margin of error</i>) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	Badan Perencanaan Pembangunan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,65%	Perangkat Daerah yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & 31 Kecamatan
		2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,60%	
		3. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	87,50%	
		5. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,93%	
		6. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	
		7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	
		8. Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	74%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	35,11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%	
	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	9116 kunjungan	Bagian Hubungan Masyarakat
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	75%	Dinas Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	22,70%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	1. Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
5	Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi			
	Program Perencanaan Ruang Kota	1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun	78,57%	Badan Perencanaan Pembangunan
		2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	53,33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	55.13%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	
	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1. Akumulasi luas Pertanahan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	3,503 Ha	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Akumulasi luas Pertanahan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	38,59 Ha	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pengamanan Aset	1. Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	16,18%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Persentase tanah aset yang tersertifikasi	12,62%	
		3. Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengelolaan Aset	1. Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	43,92%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Program Penanggulangan Bencana	1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian	Dinas Pemadam Kebakaran
		3. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	96%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		4. Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	
		5. Persentase kelurahan tangguh bencana	49%	
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan			
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	1. Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	5,40%	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	43,60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengelolaan Kebersihan	1. Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	15,38%	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	4,37%	31 Kecamatan
		3. Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	82,70%	
	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	1. Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	60%	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan
7	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	55,35%	Dinas Sosial
		2. Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	59%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	23%	
		4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	40%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	1. Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	8 lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	37 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Upaya Konservasi Energi	1. Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	134 kegiatan dan / atau usaha	Dinas Lingkungan Hidup
8	Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PMKS yang ditangani	60%	Dinas Sosial dan 31 Kecamatan
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	50%	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1. Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja			
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1. Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1357 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2. Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	115 kelurahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	64%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	79%	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1. Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,01%	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3	52%	Dinas Tenaga Kerja
10	Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian			
	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	50%	Dinas Perdagangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 31 Kecamatan
		2. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	50%	
		3. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	3,59%	
	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	1. Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Standarisasi Produk Usaha Mikro	1. Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	25%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	25%	
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1. Persentase koperasi berklasifikasi AAB	62,21%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	1. Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	73%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	1. Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	62%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	1. Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	84%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	1. Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	1. Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	1. Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	6%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	6%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	6%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		4. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		5. Persentase rumah kreatif yang beroperasi	62,50%	Dinas Perdagangan
	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif	1. Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	10%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Legalisasi Usaha Kreatif	1. Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	25%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	1. Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	27%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	1. Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	40%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	45,48%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	12%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	18%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
11	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
	Program Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	Satuan Polisi Pamong Praja 31 Kecamatan
		2. Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
		3. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
		4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	
	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan	1. Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial
		2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	
12	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila			
	Program Perlindungan Budaya Lokal	1. Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	45%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	64,70%	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase pertumbuhan <i>event</i> literasi yang diselenggarakan	10%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pendidikan
		2. Persentase koleksi buku	88,63%	
		3. Persentase siswa yang terlibat dalam tes <i>reading text levelling</i>	40,40%	
4. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina		17,85%		

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal	1. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15,50%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan Dinas Sosial
		2. Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	31 Kecamatan
13	Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak			
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 Kecamatan
		2. Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66,35%	
		3. Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	21%	
		4. Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	
14	Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan			
	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Persentase <i>sample</i> yang memenuhi syarat keamanan makanan	84%	Dinas Kesehatan
		3. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,5	
	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/ kejadian	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2. Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	Dinas Perdagangan

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
15	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau			
	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	75%	Dinas Perdagangan
		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	50%	
	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	1. Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	106,24 menit	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	1. Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	24%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	57,14%	Bagian Administrasi Kerjasama
		2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	75%	

BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2018, rencana program prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III serta telah melakukan manajemen risiko.

Manajemen risiko yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya merupakan suatu rangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun rencana program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, diuraikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018 sebagaimana berikut.

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan				
1.1	Urusan Wajib				
1.1.1	Pelayanan Dasar				
1.1.1.01	Pendidikan			1.060.450.681.825	
1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	759.357.992.510	
		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	100%		
		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%		
		Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	66,83%		
		Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	71,40%		
		Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	77,70%		
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	76,70%		
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	76,50%		
		Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	36,78%		
1.1.1.01.01.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	80 bangunan	210.344.109.190	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun	50 dokumen	2.138.661.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah SD sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	692 lembaga	168.901.692.087	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah Sekolah SMP sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	348 lembaga	170.054.909.850	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	86,730 orang	2.055.376.713	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah jenis perlengkapan sekolah SD Negeri yang diberikan	10 jenis	65.342.833.950	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah	jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan	10 jenis	59.564.446.500	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0008	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah APE yang diberikan	789 unit	3.857.363.780	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional	370 lembaga	76.741.444.740	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2 lembaga	357.154.500	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum	Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%	32.253.264.427	
		Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,56%		
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,55%		
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%		
		Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	49,11%		

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar	70 lembaga	13.297.745.880	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah	Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	32 lembaga	7.474.366.368	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	42,197 orang	1.078.022.997	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar	91,333 orang	3.000.500.837	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	479 lembaga	2.366.307.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan	198 lembaga	1.225.481.225	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	950 orang	681.572.483	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	13,946 orang	1.471.364.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	18,128 orang	1.657.903.638	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	65,63%	203.056.304.645	
		Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	94,79%		
		Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	74,23%		
		Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	99,13%		
		Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	79,77%		
		Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,31%		
		Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	76,91%		
		Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,73%		
		Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	80,77%		
		Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	60,78%		
		Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	50,54%		
		Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	57,87%		
		Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	54,32%		
		Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	56,39%		
1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan	6,150 orang	82.051.637.810	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,068 orang	78.199.161.470	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	1,941 orang	3.930.820.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu	11,446 orang	38.874.685.365	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04	Program Peningkatan Prestasi	Persentase PAUD berprestasi	1,70%	16.639.415.195	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	46,15%		
		Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	63,64%		
		Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	28,85%		
		Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%		
1.1.1.01.04.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan	33,737 orang	5.249.513.680	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar	3,405 orang	3.153.674.490	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah	3,120 Orang	1.113.794.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	jumlah jenis kegiatan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan	9 jenis	4.496.641.365	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan	5 Kali	2.625.791.660	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	31,25%	676.873.885	
		Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	42,95%		
		Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	48,98%		
		Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	60,88%		
		Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	55,32%		
		Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	64,65%		
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	81,85%		
1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah sekolah yang mengikuti pengelolaan manajemen sekolah	1,504 lembaga	676.873.885	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06	Program Pendidikan Kesenjangan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	71,07%	2.566.895.564	
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88,51%		
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,98%		
1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesenjangan	Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesenjangan	450 orang	2.566.895.564	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,73%	45.899.935.599	
		Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	1,04%		
1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	12,000 orang	43.657.349.089	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2,745 orang	792.701.025	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	jumlah lembaga kursus, pelatihan dan PKBM yang dibina	400 lembaga	1.449.885.485	Dinas Pendidikan
1.1.1.02	Kesehatan			653.136.687.016	
1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	172.102.248.850	
		Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	12%		
1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan jaminan kesehatan	327,573 orang	172.102.248.850	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Imunisasi dasar lengkap	93,83%	32.575.928.850	
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,47%		
		Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	85%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinkes)	96,95%		

Kode	Ururan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.02.0001	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Ibu, Anak, Remaja, Pra Lansia dan Lansia yang mendapatkan layanan pemeriksaan	58,803 orang	31.108.048.850	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02.0002	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Ibu dan Anak yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan	16 orang	1.467.880.000	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,64%	6.743.194.500	
		Persentase Penimbangan balita	81,40%		
		Prevalensi Balita gizi buruk	<1 %		
		Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%		
1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu hamil/menyusui, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	1,300 orang	6.743.194.500	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	64,52%	89.558.291.105	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	76%		
1.1.1.02.04.0001	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas	2,518 orang	18.871.001.501	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 aplikasi	509.098.240	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0003	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	83 Item	19.410.205.674	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0004	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	65 lembaga	13.803.543.673	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	10 bangunan	25.410.833.277	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.04.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	5 dokumen	499.903.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.04.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	2 jenis	10.818.099.671	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0008	Analisa Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah dokumen Analisa Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	5 dokumen	235.606.070	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	33.105.024.423	
1.1.1.02.05.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	4 Paket	27.537.056.798	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	2 Paket	5.567.967.625	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	73%	63.474.010.931	
		Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	77%		
		Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	84%		
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	84%		
1.1.1.02.06.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	14 lembaga	3.368.365.900	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan Yang Dibina dan Diawasi	129 lembaga	522.945.300	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	SDM Kesehatan Yang Dilatih dan Dikembangkan	2,100 Orang	3.187.261.644	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	87,588 orang	4.962.804.831	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0005	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	2,352 orang	3.447.316.935	RSUD Bhakti Dharma Husada

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.06.0006	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	415 orang	17.189.520.779	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	8 kali	827.444.765	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0008	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	23,965 orang	6.011.576.398	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0009	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	127 kali	920.374.400	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0010	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi Rumah Sakit	1 sistem	588.030.918	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0011	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan RS yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM kesehatan	760 orang	22.145.276.942	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0012	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen hasil evaluasi Penyelenggaraan layanan Rumah Sakit yang disusun	19 dokumen	303.092.120	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	77.691.398.575	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	80%		
		Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari		
		Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	48 hari		
		Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	45 menit		
1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhab	1 bangunan	5.794.188.082	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya	Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun	1 dokumen	262.328.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah item alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	8 item	5.112.870.100	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0005	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	2 jenis	9.868.702.000	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah item alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	8 item	36.541.702.859	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	jumlah item sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	4 item	8.130.000.000	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0009	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	2 jenis	11.981.607.534	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	82.618.181.818	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%		
1.1.1.02.08.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	2 paket	22.618.181.818	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit	2 paket	60.000.000.000	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	84%	95.268.407.964	
		Persentase rumah sehat	76,50%		
		Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	82%		
1.1.1.02.09.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan	63 lembaga	25.434.421.950	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.09.0002	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah kejadian kegawatdaruratan yang dilayani dalam satu tahun	600 Kejadian	1.269.290.500	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0003	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Lokasi Penyakit Menular Langsung yang dilayani	1,750 lokasi	14.809.948.511	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0004	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1,200 orang	4.071.482.950	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	34 lembaga	848.660.270	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0006	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Lingkungan Yang Diperiksa	7,050 sampel	4.159.304.214	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0007	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah baita yang mendapatkan PMT Penyuluhan	63 lembaga	9.324.200.949	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0008	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Lembaga Surveilans Terpadu dan Pelaksanaan Imunisasi	63 lembaga	1.262.203.500	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0009	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah balita yang mendapatkan penyuluhan Anak Balita di UKBM	162,132 orang	34.088.895.120	Dinas Kesehatan
1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.024.273.473.842	
1.1.1.03.01	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Lama genangan (menit)	50 menit	495.060.915.773	
		Luas genangan (ha)	1179 ha		
		Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%		
		Tinggi genangan (cm)	15 cm		
1.1.1.03.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Luasan obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi	24,500 m2	9.940.430.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)	Luasan obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi	15,120 m2	3.199.620.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0003	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah rumah pompa yang dioperasikan dan dipelihara	56 unit	29.664.750.677	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0004	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun	10,000 m2	171.559.576.187	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0005	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)	Luasan Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	15,120 m2	151.639.590.393	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara	210,000 M3	119.710.852.965	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	77 dokumen	9.346.095.550	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	7,74%	292.813.029.495	
		Persentase jalan yang terbangun (%)	0,36%		
		Persentase pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang selesai tepat waktu	80%		
		Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	17,18%		
1.1.1.03.02.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan	35,290 m2	8.491.362.700	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara	162 unit	16.007.164.500	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	5,000 m2	14.182.615.778	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Luasan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	29,260 m2	192.861.986.049	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi	150,130 m2	52.752.395.464	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.03.02.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun	66 dokumen	8.517.505.005	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	14,32%	7.155.430.373	
1.1.1.03.03.0001	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)	Panjang jaringan air bersih yang terbangun	1,000 m	7.155.430.373	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2600250 m	209.596.996.556	
		Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi	74,26%		
1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	2,818 titik	51.242.187.851	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	5,849 rekening	146.907.724.000	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	40,000 titik	11.447.084.706	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	863.261.284	
1.1.1.03.05.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 ijin	863.261.284	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	78,57%	6.363.961.500	
		Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	53,33%		
1.1.1.03.06.0001	Penunjang Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	761.155.300	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.1.03.06.0002	Pendukung Penataan Ruang Kota	Jumlah dokumen Penataan Ruang yang disusun	3 dokumen	1.316.399.400	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.1.03.06.0003	Penyusunan dan Pengajuan Pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun dan diajukan	1 dokumen	4.286.406.800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	55,13%	12.419.878.861	
		Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		
1.1.1.03.07.0001	Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan yang dipelihara	2 Item	413.382.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0002	Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah penyelenggaraan bangunan yang didata dan ditata	6,517 bangunan	1.358.251.335	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0003	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	7,770 persil	1.787.573.910	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0004	Pengawasan dan Penertiban Tata Bangunan	Jumlah pengawasan dan penertiban bangunan yang dilaksanakan	240 kali	1.269.150.499	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0005	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah obyek pemanfaatan ruang yang dikendalikan	7,333 obyek	1.913.762.947	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0006	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 ijin	221.469.960	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0007	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	7 dokumen	1.744.533.025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0008	Survey Dan Pemetaan Infrastruktur Kota	Jumlah persil infrastruktur kota yang disurvei dan dipetakan	500 persil	1.812.191.025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0009	Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah wilayah Surabaya yang telah terupdate dalam peta digital	5 wilayah	1.899.564.110	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman			406.324.174.473	
1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	59%	406.324.174.473	
		Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	55,35%		
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	23%		
		Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	40%		
1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	3 bangunan	5.571.756.023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0002	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi	5 lokasi	39.873.213.703	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0003	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	394 lokasi	300.404.966.937	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	200 dokumen	16.147.782.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0005	Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang difasilitasi	2 lembaga	1.350.521.280	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	2 dokumen	1.006.613.650	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0007	Pengelolaan Rumah Ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3,500 persil	1.369.974.542	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0008	Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok Rumah Rusun Sederhana Sewa yang beroperasi	81 blok	1.468.977.960	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0009	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah blok rumah susun sederhana sewa yang dikelola	81 blok	20.259.258.701	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0010	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	638 unit	18.871.109.678	Dinas Sosial
1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			159.388.975.806	
1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	46.586.066.829	
		Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, kebersihan, parkir umum, dan Perda lain yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		
		Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		
		Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%		
1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	240 objek	412.158.335	Kec. Asemrowo
1.1.1.05.01.0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	367.616.905	Kec. Benowo
1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	498.192.375	Kec. Bubutan
1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	676.518.335	Kec. Bulak
1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	471.397.666	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	254.591.405	Kec. Gayungan
1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	324 objek	371.898.352	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	652.814.992	Kec. Gubeng
1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	432 objek	321.308.800	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	139.717.455	Kec. Jambangan
1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	487.772.360	Kec. Karangpilang
1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	264 objek	360.657.755	Kec. Kenjeran
1.1.1.05.01.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	240 objek	510.733.480	Kec. Krembangan
1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	395.139.980	Kec. Lakarsantri
1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	336 Objek	475.843.645	Kec. Mulyorejo
1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 Objek	499.546.297	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 Objek	393.821.020	Kec. Pakal
1.1.1.05.01.0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	512.002.625	Kec. Rungkut
1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	240 objek	339.226.850	Kec. Sambikerep
1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	336 objek	778.706.505	Kec. Sawahan
1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	264 objek	583.205.925	Kec. Semampir
1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	303.780.870	Kec. Simokerto
1.1.1.05.01.0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	336 Objek	500.508.265	Kec. Sukolilo
1.1.1.05.01.0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	314.379.055	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.05.01.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	312 objek	697.909.690	Kec. Tambaksari
1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	240 objek	418.692.380	Kec. Tandes
1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	252 objek	523.857.993	Kec. Tegalsari
1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	276 objek	250.182.599	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	336 objek	477.067.865	Kec. Wiyung
1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	288 objek	404.705.035	Kec. Wonocolo
1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	300 objek	892.755.365	Kec. Wonokromo
1.1.1.05.01.0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah objek pelanggaran Perda terkait reklame yang diterbitkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi	16,800 objek	2.762.521.165	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah objek pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, dan lainnya yang diterbitkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi	1,210 objek	1.342.768.660	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah objek pelanggaran insidentil dan pelanggaran Perda terkait anjal/gepeng, hiburan malam, PKL, dan PSK yang diterbitkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi	15,608 objek	5.857.278.988	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Ururan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.01.0035	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak dan dievaluasi	84 objek	771.168.965	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa	1,140 orang	1.620.303.273	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah tenaga penanggulangan keamanan kota yang disediakan	500 orang	19.945.315.600	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	40.592.342.833	
		Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%		
1.1.1.05.02.0001	Orientasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah peserta Orientasi Kewaspadaan Nasional	1,070 orang	1.189.509.345	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002	Kerjasama pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota	Jumlah laporan Kerjasama pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota	66 dokumen	580.764.220	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0003	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah laporan Kerjasama pengendalian keamanan kota	12 dokumen	4.232.573.700	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0004	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	1.400.522.045	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0005	Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	429 orang	16.893.365.389	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	37,378 orang	14.807.073.348	Dinas Sosial
1.1.1.05.02.0007	Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan Potensi Masyarakat	280 orang	1.488.534.786	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	72.210.566.143	
		Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian		
		Persentase kelurahan tangguh bencana	49%		
		Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%		
		Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	96%		
1.1.1.05.03.0001	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan kader perlindungan masyarakat (Kursus kader pelaksana Linmas)	100 orang	627.167.700	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1,000 orang	2.366.484.949	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003	Pemberian Kebutuhan Pokok bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan kebutuhan pokok	6,026 orang	2.450.296.940	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0004	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah item sarana penanggulangan bencana yang diadakan	69 item	2.817.100.550	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0005	Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	1,340 orang	2.090.653.750	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0006	Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah peserta Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana	995 orang	1.006.371.453	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana	1,470 orang	1.037.807.340	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0008	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah orang pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	782 orang	7.844.129.200	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0009	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	50 unit	4.721.701.491	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0010	Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	880 unit	31.361.291.249	Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.03.0011	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	5,560 bangunan	1.759.174.759	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0012	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kompetensinya	200 orang	960.081.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0013	Pelatihan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah masyarakat yang diberi pelatihan SATLAKAR	1,680 orang	1.443.125.300	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0014	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi	2 bangunan	11.392.567.464	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05.03.0015	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	10 dokumen	332.613.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.06	Sosial			196.998.499.573	
1.1.1.06.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	193.728.164.356	
1.1.1.06.01.0001	Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapat beasiswa	1,114 orang	17.882.498.000	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat permakanan	6,000 orang	30.127.600.937	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	15,040 orang	77.459.807.140	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	4,804 orang	23.531.422.116	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0005	Pembinaan dan pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1,280 orang	1.671.966.800	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0006	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah kegiatan pemutakhiran data PMKS dan PSKS	1 kali	583.760.880	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	35 orang	2.242.523.318	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2.797.633.240	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	111 orang	1.437.693.697	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	4.933.510.311	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1,600 orang	21.297.070.455	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0012	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,049 lembaga/oran g/barang	105.998.322	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0013	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,677 lembaga/oran g/barang	76.702.850	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0014	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,940 lembaga/oran g/barang	163.299.975	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0015	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,399 lembaga/oran g/barang	76.976.850	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0016	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,455 lembaga/oran g/barang	116.205.005	Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0017	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	3,271 lembaga/oran g/barang	104.590.950	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.01.0018	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,303 lembaga/oran g/barang	106.586.135	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0019	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,128 lembaga/oran g/barang	86.094.950	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0020	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	811 lembaga/oran g/barang	192.873.155	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0021	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,094 lembaga/oran g/barang	82.769.420	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0022	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	223 lembaga/oran g/barang	135.408.430	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0023	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	739 lembaga/oran g/barang	72.483.730	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0024	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,841 lembaga/oran g/barang	147.029.235	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0025	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,381 lembaga/oran g/barang	119.460.265	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0026	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,558 lembaga/oran g/barang	104.494.150	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0027	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	4,556 lembaga/oran g/barang	99.316.627	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0028	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	1,500 lembaga/oran g/barang	73.329.920	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0029	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	933 lembaga/oran g/barang	91.402.165	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0030	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	520 lembaga/oran g/barang	126.151.225	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0031	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,136 lembaga/oran g/barang	48.037.360	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0032	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,144 lembaga/oran g/barang	89.623.305	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0033	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,338 lembaga/oran g/barang	69.656.350	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0034	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	843 lembaga/oran g/barang	144.073.440	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0035	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	4,099 lembaga/oran g/barang	66.251.010	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0036	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	3,221 lembaga/oran g/barang	96.879.000	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0037	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	3,945 lembaga/oran g/barang	104.820.085	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0038	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,327 lembaga/oran g/barang	139.343.295	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0039	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,454 lembaga/oran g/barang	85.340.275	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0040	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,931 lembaga/oran g/barang	101.116.395	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0041	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,453 lembaga/oran g/barang	124.346.450	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0042	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,519 lembaga/oran g/barang	172.346.447	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0043	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	2,476 lembaga/oran g/barang	170.631.937	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0044	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,019 lembaga/oran g/barang	111.806.905	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0045	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,086 lembaga/oran g/barang	121.660.925	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0046	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,101 lembaga/oran g/barang	154.184.595	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.01.0047	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,698 lembaga/oran g/barang	221.186.850	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0048	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	762 lembaga/oran g/barang	124.047.355	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0049	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	899 lembaga/oran g/barang	107.465.925	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0050	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	4,355 lembaga/oran g/barang	143.745.050	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0051	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	5,795 lembaga/oran g/barang	183.398.571	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0052	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,808 lembaga/oran g/barang	111.836.065	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0053	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	8,121 lembaga/oran g/barang	110.210.725	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0054	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	2,396 lembaga/oran g/barang	101.017.660	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0055	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	4,226 lembaga/oran g/barang	138.965.840	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0056	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,720 lembaga/oran g/barang	93.083.305	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0057	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,861 lembaga/oran g/barang	84.339.565	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0058	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,963 lembaga/oran g/barang	177.703.595	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0059	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	2,037 lembaga/oran g/barang	63.963.330	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0060	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,066 lembaga/oran g/barang	68.945.650	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0061	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	7,820 lembaga/oran g/barang	93.459.260	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0062	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,768 lembaga/oran g/barang	120.948.545	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0063	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,889 lembaga/oran g/barang	124.138.450	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0064	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,960 lembaga/oran g/barang	137.569.270	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0065	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	3,173 lembaga/oran g/barang	132.837.925	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0066	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,726 lembaga/oran g/barang	168.516.395	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0067	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	709 lembaga/oran g/barang	62.874.450	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0068	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	1,654 lembaga/oran g/barang	108.796.405	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0069	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,308 lembaga/oran g/barang	63.794.850	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0070	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	3,688 lembaga/oran g/barang	118.367.445	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0071	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	1,979 lembaga/oran g/barang	95.471.925	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0072	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data	2,617 lembaga/oran g/barang	133.425.375	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0073	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi	4,082 lembaga/oran g/barang	91.047.925	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0074	Penertiban PMKS dan penyelenggaraan layanan ambulance gratis	Jumlah frekuensi penertiban PMKS dan layanan ambulance	4,745 kali	2.700.228.624	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	50%	3.270.335.217	
1.1.1.06.02.0001	Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	jumlah kegiatan yang difasilitasi	24 kali	933.073.630	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0002	Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	6,630 orang	988.167.830	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0003	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina dan diberdayakan	2,890 orang	1.349.093.757	Dinas Sosial
1.1.2	Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.01	Tenaga Kerja			22.633.289.439	
1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	4.827.531.970	
		Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%		
1.1.2.01.01.0001	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	600 Orang	1.502.672.010	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.01.01.0002	Fasilitasi Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk Pengembangan Softskill Kerja	2,050 orang	761.982.326	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0003	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	500 orang	176.525.250	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0004	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	641.022.364	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0005	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	60 lembaga	151.705.080	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0006	Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	120 Perusahaan	127.227.050	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0007	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilaksanakan	7 kali	1.186.904.790	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0008	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	279.493.100	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	64%	14.261.160.161	
		Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	79%		
1.1.2.01.02.0001	Pembinaan peningkatan produktivitas perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimtek untuk meningkatkan produktivitas	100 Perusahaan	139.455.214	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat	jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	20 orang	157.663.280	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003	Fasilitasi magang bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang	100 orang	279.435.850	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004	Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja	jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi	2,920 orang	4.971.883.430	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0006	Penyusunan dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota	Jumlah Dokumen indentifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota	1 dokumen	109.302.200	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0007	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50 lembaga	108.504.607	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0008	Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi pelatihan berbasis kompetensi	920 orang	8.494.915.580	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,01%	2.649.206.863	
1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	514.403.490	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002	Pembinaan Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	250 Perusahaan	408.185.880	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0003	Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	jumlah kegiatan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	12 kali	589.286.100	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0004	Penyusunan dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	863.959.900	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0005	Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mendapatkan pembinaan	300 orang	273.371.493	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma k3	52%	895.390.444	
1.1.2.01.04.0001	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti norma ketenagakerjaan	1,000 Perusahaan	277.962.025	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002	Pembinaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang mengikuti pembinaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,500 Perusahaan	617.428.419	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			14.102.694.750	
1.1.2.02.01	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	2.696.333.200	
1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	72 lembaga	948.672.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0002	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	33 lembaga	1.080.728.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0004	Penyusunan Profil Gender	Jumlah Profil Gender dan mapping data permasalahan perempuan yang disusun	3 dokumen	666.931.600	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	11.406.361.550	
		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66,35%		
		Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	21%		
		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%		
1.1.2.02.02.0001	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	300 orang	2.991.319.925	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	431 lembaga	1.111.209.840	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak. PPTP2A	Jumlah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	926 Orang	856.754.318	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0004	Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang membentuk Kampunge Arek Suroboyo	154 lembaga	852.018.591	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,070 orang	175.341.493	Kec. Asemrowo
1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,155 orang	196.173.923	Kec. Benowo
1.1.2.02.02.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	715 orang	162.483.190	Kec. Bubutan
1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,190 orang	153.533.385	Kec. Bulak
1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	722 orang	180.489.309	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	797 orang	224.832.213	Kec. Gayungan
1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	977 orang	198.237.107	Kec. Genteng
1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,535 orang	178.167.399	Kec. Gubeng
1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	532 orang	100.633.960	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.02.02.0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	635 orang	143.467.400	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	650 orang	132.956.425	Kec. Karangpilang
1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	959 orang	207.479.745	Kec. Kenjeran
1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	745 orang	131.579.050	Kec. Krembangan
1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	857 orang	206.937.867	Kec. Lakarsantri
1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	618 Orang	160.524.921	Kec. Mulyorejo
1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	740 Orang	153.101.945	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	510 orang	263.048.760	Kec. Pakal
1.1.2.02.02.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,560 orang	196.941.610	Kec. Rungkut
1.1.2.02.02.0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	760 orang	163.090.950	Kec. Sambikerep
1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,400 orang	207.368.750	Kec. Sawahan
1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,230 orang	190.420.320	Kec. Semampir
1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	835 orang	155.279.660	Kec. Simokerto
1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	938 Orang	174.603.740	Kec. Sukolilo
1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	875 orang	184.044.680	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,760 orang	189.985.355	Kec. Tambaksari
1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	984 orang	189.864.068	Kec. Tandes
1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	800 orang	155.315.600	Kec. Tegalsari
1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	890 orang	198.413.080	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	478 orang	164.559.741	Kec. Wiyung
1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	894 orang	190.021.643	Kec. Wonocolo
1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	1,717 orang	266.161.590	Kec. Wonokromo
1.1.2.03	Pangan			7.881.776.372	
1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	84%	7.881.776.372	
		Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	82%		
		Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,5		
1.1.2.03.01.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	8,160 sampel	2.837.027.040	Dinas Kesehatan
1.1.2.03.01.0002	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah pasar yang dimonitor ketersediaan bahan pangannya	14 lokasi	649.156.440	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Pembinaan Keamanan Pangan Yang Beredar	820 orang	185.284.515	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0005	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok penerima bantuan tanaman untuk pemanfaatan lahan pekarangan	78 kelompok	3.008.443.517	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah Sampel Produk Pangan Segar yang diawasi dan diperiksa	1,900 sampel	733.338.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0007	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Pangan	957 orang	468.526.760	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.04	Pertanahan			583.398.464.277	
1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	3.503 Ha	550.593.997.280	
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	38.59 Ha		
1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	11,000 m2	124.332.588.500	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.01.0002	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Luasan tanah dan/atau bangunan yang didata dan disiapkan	192,900 m2	4.191.235.580	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0006	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Luas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	192,900 m2	422.070.173.200	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02	Program Pengamanan Aset	Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	10.931.429.444	
		Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	16,18%		
		Persentase tanah aset yang tersertifikasi	12,62%		
1.1.2.04.02.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	100%	1.091.633.020	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	100%	1.130.559.559	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0003	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	4.079.760.070	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0004	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola	47,348 berkas	1.028.701.785	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0005	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peserta penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	800 orang	1.156.340.240	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0006	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	30 dokumen	2.444.434.770	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03	Program Pengelolaan Aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	43,92%	21.873.037.553	
1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan dan penataan tanah aset Pemerintah Kota yang disusun	2 dokumen	2.359.963.022	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0002	Pelayanan Ijin Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah permohonan ijin pemanfaatan tanah aset yang dilayani	7,000 ijin	1.695.814.236	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0003	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 bangunan	16.577.754.670	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0004	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8,000 lokasi	1.239.505.625	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.05	Lingkungan Hidup			509.829.068.117	
1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	43,60%	116.671.171.519	
		Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	5,40%		
1.1.2.05.01.0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang Dipelihara	390 Lokasi	34.334.213.260	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0002	Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	21 Lokasi	16.070.510.686	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0003	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang Ditata	70 Lokasi	20.242.155.518	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0004	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Dilaksanakan	55 unit	8.263.756.400	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	79 Lokasi	30.378.973.124	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Sentra Pertanian Perkotaan	Jumlah prasarana sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara	9 lokasi	2.743.770.109	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Ururan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dibangun dan dipelihara	2 lokasi	4.637.792.422	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.02	Program Pengelolaan Kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	15,38%	377.308.746.498	
		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	82,70%		
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	4,37%		
1.1.2.05.02.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Jumlah Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan yang Dilaksanakan	31 Kecamatan	1.003.128.165	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0002	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPLT yang dioperasikan	1 Unit	1.843.912.366	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0003	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	580 Lokasi	80.575.364.035	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pembersihan sampah di saluran	79 Lokasi	15.761.316.430	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	230 Lokasi	39.457.642.530	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH yang Disediakan	5,883 unit	49.314.288.598	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Tonase Pengolahan Sampah yang Dibayar	549,000 ton	106.655.675.000	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0008	Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah, Toilet dan Alat Berat yang Dipelihara	315 unit	51.565.728.000	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0009	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah prasarana kebersihan yang dipelihara	187 Lokasi	8.529.045.375	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0010	Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Disediakan	1 Paket	1.587.566.452	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH yang disusun	2 dokumen	1.205.867.640	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0012	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan yang Dilaksanakan	12,480 orang hari	3.853.564.280	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0013	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Kebersihan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	5 Kegiatan	868.952.010	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0014	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	25 Titik	11.822.146.100	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	86.280.716	Kec. Asemrowo
1.1.2.05.02.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	150 orang	144.517.780	Kec. Benowo
1.1.2.05.02.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	400 orang	96.110.025	Kec. Bubutan
1.1.2.05.02.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	385 orang	102.224.025	Kec. Bulak
1.1.2.05.02.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	84.992.716	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.05.02.0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	91.249.771	Kec. Gayungan
1.1.2.05.02.0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	169.996.860	Kec. Genteng
1.1.2.05.02.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	216 orang	79.542.000	Kec. Gubeng
1.1.2.05.02.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	200 orang	105.930.700	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.05.02.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	56.063.150	Kec. Jambangan
1.1.2.05.02.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	100.038.316	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.02.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	81.300.716	Kec. Kenjeran
1.1.2.05.02.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	83.624.040	Kec. Krembangan
1.1.2.05.02.0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	112.715.057	Kec. Lakarsantri
1.1.2.05.02.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	127.611.916	Kec. Mulyorejo
1.1.2.05.02.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	69.930.000	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.05.02.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	94.539.844	Kec. Pakal
1.1.2.05.02.0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	132.025.516	Kec. Rungkut
1.1.2.05.02.0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	100.294.000	Kec. Sambikerep
1.1.2.05.02.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	280 orang	112.549.671	Kec. Sawahan
1.1.2.05.02.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	175 orang	102.790.719	Kec. Semampir
1.1.2.05.02.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	184.549.340	Kec. Simokerto
1.1.2.05.02.0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	420 orang	94.618.000	Kec. Sukolilo
1.1.2.05.02.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	79.602.550	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.05.02.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	106.257.080	Kec. Tambaksari
1.1.2.05.02.0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	131.502.353	Kec. Tandes
1.1.2.05.02.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	105.325.516	Kec. Tegalsari
1.1.2.05.02.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	420 orang	108.054.025	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.05.02.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	108.017.200	Kec. Wiyung
1.1.2.05.02.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	115.643.916	Kec. Wonocolo
1.1.2.05.02.0045	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	96.652.000	Kec. Wonokromo
1.1.2.05.03	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	60%	13.558.217.200	
1.1.2.05.03.0001	Kajian dan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	485.577.100	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0002	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Lokasi Monitoring Penilaian Adipura	100 lokasi	292.004.281	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sampel Kegiatan Monitoring Pengelolaan Limbah	250 kali/sampel	550.142.200	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	2.863.859.218	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	500 orang	285.907.927	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	20 kasus	293.463.435	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0007	Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	244.304.900	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0008	Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	380.429.560	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0009	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah kegiatan/ usaha yang diawasi dan dipantau pengelolaan lingkungannya	48 kegiatan/usaha	851.595.955	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.03.0010	Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	30 kegiatan/usaha	152.671.525	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0011	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	jumlah peserta yang mengikuti edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	600 orang	647.758.335	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0012	Pemantauan Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	216 sampel	3.140.731.794	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0013	Sosialisasi dan Pemantauan Pengguna Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	30 kegiatan/usaha	223.794.335	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0014	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak	51 kali	2.760.716.800	Dinas Perhubungan
1.1.2.05.03.0015	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	32 kali/sampel	385.259.835	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	134 kegiatan dan / atau usaha	504.293.725	
1.1.2.05.05.0001	Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit	120 kegiatan/usaha	504.293.725	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	8 lingkungan	1.786.639.175	
		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	37 unit		
1.1.2.05.08.0001	Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Lokasi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	4 lokasi	674.830.747	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08.0002	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	2 unit	785.237.328	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.05.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	2 dokumen	326.571.100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			21.745.636.315	
1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,60%	21.745.636.315	
		Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	87,50%		
		Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%		
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,93%		
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		
		Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,65%		
		Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%		
		Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%		
1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	300,000 berkas	1.066.003.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan berkas mutasi WNI dan orang asing yang dilayani	46,438 berkas	611.080.763	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	5 aplikasi	1.378.539.240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0005	Pelaporan Pemberian Pelayanan Data Kependudukan di 12 Layanan	Jumlah laporan pemberian pelayanan data kependudukan di 12 Layanan	12 Dokumen	542.540.609	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0006	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	75,130 berkas	1.054.020.403	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.06.01.0007	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3,250 berkas	1.041.284.831	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0008	Evaluasi dan Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen evaluasi dan penerapan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1 dokumen	652.734.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0009	Dana Alokasi Khusus Administrasi Kependudukan	Jumlah Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk yang disediakan	401,121 lembar	5.338.870.221	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14,412 berkas	183.200.513	Kec. Asemrowo
1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22,340 berkas	205.317.444	Kec. Benowo
1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15,057 berkas	376.093.186	Kec. Bubutan
1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11,186 berkas	216.207.575	Kec. Bulak
1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12,616 berkas	318.478.524	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5,326 berkas	232.876.223	Kec. Gayungan
1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14,463 berkas	505.687.055	Kec. Genteng
1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	25,177 berkas	309.763.757	Kec. Gubeng
1.1.2.06.01.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11,226 berkas	250.411.040	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12,785 berkas	184.997.500	Kec. Jambangan
1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7,397 berkas	201.742.958	Kec. Karangpilang
1.1.2.06.01.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	38,751 berkas	391.838.598	Kec. Kenjeran
1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	13,728 berkas	270.172.765	Kec. Krembangan
1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5,336 berkas	235.979.962	Kec. Lakarsantri
1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	16,551 Berkas	289.788.148	Kec. Mulyorejo
1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	18,209 Berkas	248.565.044	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15,500 berkas	244.179.798	Kec. Pakal
1.1.2.06.01.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15,963 berkas	320.001.516	Kec. Rungkut
1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	9,318 Berkas	216.540.733	Kec. Sambikerep
1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	40,320 berkas	486.051.973	Kec. Sawahan
1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24,931 berkas	373.554.377	Kec. Semampir
1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24,589 berkas	340.518.158	Kec. Simokerto
1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22,442 Berkas	385.334.244	Kec. Sukolilo
1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	26,312 berkas	312.922.331	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	51,490 berkas	469.885.368	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20,944 berkas	405.307.005	Kec. Tandes
1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14,557 berkas	296.207.947	Kec. Tegalsari
1.1.2.06.01.0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	17,850 berkas	284.844.696	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.06.01.0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7,253 berkas	270.066.263	Kec. Wiyung
1.1.2.06.01.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	19,913 berkas	251.808.090	Kec. Wonocolo
1.1.2.06.01.0040	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	32,522 berkas	353.579.356	Kec. Wonokromo
1.1.2.06.01.0041	Penyusunan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang disusun	3 dokumen	232.815.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0042	Publikasi Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	10 kali	395.824.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			18.071.871.476	
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	20,50%	6.475.538.432	
		Persentase peserta KB aktif	78,40%		
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5,40%		
		Persentase peserta KB baru	81,95%		
1.1.2.08.01.0001	Pembinaan Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	2,033 orang	1.608.301.765	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0002	Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	310 orang	639.467.979	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0003	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	4,000 orang	661.094.648	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	800 orang	1.537.206.400	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	2 jenis	2.029.467.640	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	70,39%	2.175.070.814	
		Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3,30%		
1.1.2.08.02.0001	Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	1,350 orang	790.780.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02.0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1,240 orang	1.384.290.314	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	9.421.262.229	
1.1.2.08.03.0001	Updating data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan	jumlah kelurahan yang mendapatkan dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah	1 dokumen	3.188.969.465	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0002	Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta inkubasi usaha mandiri	866 orang	3.139.206.130	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	2.656.412.835	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0004	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang difasilitasi program kesejahteraan keluarga	866 orang	436.673.800	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.09	Perhubungan			378.371.073.711	
1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	30.06 km/jam	326.978.597.434	
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%		
1.1.2.09.01.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian	99,000 unit	10.699.450.763	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	13.218.094.017	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	166.948.733.601	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0004	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	2,510 Orang	1.406.766.523	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	7,035 unit	45.951.975.234	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi yang Dipelihara	30 Lokasi	15.175.198.114	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0007	Penertiban Parkir, Terminal Dan LLAJ	Jumlah Objek Kendaraan yang Diterbitkan	760 Objek	4.298.789.811	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Didirikan	2,050 Unit	22.793.171.522	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0009	Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang Dibiayai dari DAK Transportasi	20 Unit	2.914.787.359	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0010	Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	Jumlah Parkir Tepi Jalan Umum yang Dikelola	1,600 Titik	11.636.721.415	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0011	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi yang Dikembangkan	3 bangunan	17.647.856.808	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0012	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Dijaga	3 Titik	2.069.964.658	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	7 dokumen	3.875.107.250	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0014	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Jumlah Sarana Transportasi bagi Pelajar yang Diselenggarakan	8 Unit	2.478.837.600	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0016	Pengelolaan Parkir Tempat Khusus	Jumlah Parkir Tempat Khusus yang Dikelola	155 Lokasi	5.863.142.760	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	50.610.142.027	
		Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	25 menit		
		Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	42.57 menit		
1.1.2.09.02.0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola	13 Lokasi	16.299.326.608	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0002	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	2 Koridor	31.128.071.569	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	6,000 ijin	3.182.743.850	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.03	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	106.24 menit	782.334.250	
1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	2 dokumen	782.334.250	Dinas Perhubungan
1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika			63.403.342.336	
1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	35,11%	41.774.934.756	
		Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%		
1.1.2.10.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan yang disusun	12 Dokumen	309.712.785	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah lembaga pelaksana pemanfaatan teknologi informasi yang dimonitor dan dievaluasi	72 lembaga	335.435.025	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0003	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah sistem persandian perkotaan yang dilaksanakan	50 Unit	5.853.955.762	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah integrasi sistem yang dibangun	2 database	413.080.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0005	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	4 Item	6.686.961.786	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0006	Pembangunan Aplikasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dibangun	15 aplikasi	1.429.966.300	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	119 aplikasi	620.806.312	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0008	Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	11 Item	14.783.438.940	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0009	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	5 lembaga	9.868.074.506	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0010	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	1.199.903.160	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0011	Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	1 dokumen	273.599.280	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	84%	21.628.407.580	
		Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	9116 kunjungan		
1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pelaksanaan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	1,096 kali	6.165.224.160	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0002	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang disusun	4,193 eksemplar	714.868.154	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah komunikasi kehumasan yang diselenggarakan	127 kali	759.064.900	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0004	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi	Jumlah Peserta Pengembangan KIM	500 Orang	1.167.495.206	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0005	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	807.180.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0006	Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun	12 Dokumen	801.309.663	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0007	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 saluran	1.315.707.746	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0008	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan	11 kali	1.651.760.598	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0009	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	69 kali	3.669.037.570	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0010	Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Jumlah lembaga Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK	2 lembaga	4.576.759.084	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			6.796.491.967	
1.1.2.11.02	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	234.561.425	
1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	125 orang	234.561.425	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03	Program Standarisasi Produk Usaha Mikro	Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	25%	1.788.827.363	
		Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	25%		
1.1.2.11.03.0001	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha	25 orang	163.518.125	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	250 orang	310.517.025	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0003	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek peningkatan dan pengembangan usaha bisnis	125 orang	1.019.539.963	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0004	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk	200 orang	295.252.250	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	62,21%	2.291.363.704	
1.1.2.11.04.0001	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	300 Lembaga	755.923.025	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0002	Pembinaan Perkoperasian	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	450 orang	257.186.737	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya	150 lembaga	286.407.155	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.11.04.0004	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT	Jumlah lembaga koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya	231 Lembaga	646.451.503	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0005	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga	60 Lembaga	154.943.704	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0006	Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media	Jumlah publikasi RK/RAPB dan RAT melalui media yang dilakukan	7 kali	190.451.580	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	73%	2.481.739.475	
1.1.2.11.05.0001	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	5 kali	644.756.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	143 lembaga	142.387.222	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKN-KJK)	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	60 lembaga	281.525.880	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0004	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi	60 Lembaga	406.117.775	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0005	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya	150 lembaga	254.335.771	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0006	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	144 Lembaga	752.616.828	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.12	Penanaman Modal			28.901.608.612	
1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	24%	222.056.175	
1.1.2.12.01.0001	Temu Usaha Logistik	Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha logistik	100 orang	222.056.175	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	12%	6.266.810.680	
		Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	18%		
1.1.2.12.03.0001	Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi perencanaan penanaman modal	100 orang	370.425.705	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	500 perusahaan	283.005.625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0003	Monitoring Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dimonitor	5,350 perusahaan	1.716.510.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	1.092.343.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0005	Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	1 dokumen	286.720.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0006	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah pengelolaan data investasi yang dilaksanakan	12 kali	604.581.485	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0008	Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan penanaman modal	270 perusahaan	655.888.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0009	Pendampingan Perusahaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman modal yang didampingi	400 lembaga	858.956.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0010	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	10 lembaga	398.380.465	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	74%	22.412.741.757	
1.1.2.12.04.0001	Bimtek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek Informasi Industri	200 orang	206.614.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0002	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinan penanaman modal	100 perusahaan	709.693.855	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0003	Pelayanan PTSP	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	41,850 ijin	6.160.215.762	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.12.04.0004	Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan yang dibina	130 orang	405.800.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0005	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang memperoleh pembinaan	500 orang	572.771.450	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0006	Pengawasan Perijinan	Jumlah perijinan usaha yang diawasi	10,300 perusahaan	736.432.075	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0007	Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	700 berkas	1.492.837.354	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0008	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	40 ijin	449.096.351	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0009	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	35 ijin	486.290.675	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0010	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan Sarana pariwisata yang diterbitkan	450 ijin	456.125.570	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.04.0011	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diterbitkan	250 ijin	415.615.866	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.04.0012	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	8,017 berkas	3.613.319.054	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.12.04.0013	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1,491 perusahaan	843.495.025	Dinas Perdagangan
1.1.2.12.04.0014	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Tercetak	12,025,000 Lembar	5.476.533.793	Dinas Perhubungan
1.1.2.12.04.0015	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	261 berkas	185.893.009	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.12.04.0016	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang dilayani	2,000 berkas	202.007.870	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga			167.226.332.095	
1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	3.385.777.453	
1.1.2.13.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Anggota Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dibina dan dikembangkan	600 orang	770.056.100	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	13 kali	1.547.543.320	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0003	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Pemuda yang menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	400 Orang	1.068.178.033	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1357 orang	163.840.554.642	
		Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	115 kelurahan		
1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi	3 bangunan	70.798.936.490	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	5 dokumen	388.163.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0003	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga selama 12 bulan	276 rekening	7.831.332.040	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0004	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	85 Unit	62.583.691.421	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus yang diselenggarakan	14 kali	1.217.142.200	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0006	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	19 kali	3.786.500.710	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0007	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan	17 kali	1.544.508.170	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0008	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	84 Kali	2.910.633.200	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.13.02.0009	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	685 Unit	3.403.218.226	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0010	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	75 Bangunan	9.376.429.185	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.14	Statistik			1.156.275.660	
1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	1.156.275.660	
1.1.2.14.01.0001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan	Jumlah sistem aplikasi data pendukung perencanaan yang dikembangkan dan dipelihara	2 sistem	436.809.800	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.14.01.0002	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data indikator RPJMD yang dilakukan validasi	409 data	719.465.860	Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.16	Kebudayaan			28.789.451.159	
1.1.2.16.01	Program Perlindungan Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	1.709.008.125	
1.1.2.16.01.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan di evaluasi	250 cagar budaya	1.709.008.125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	64,70%	7.854.259.813	
		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	45%		
1.1.2.16.02.0001	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti	7 kali	2.592.135.760	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0002	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata selama 12 bulan	108 kali	401.978.413	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0003	Penyelenggaraan event dan festival kesenian daerah	Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan	404 kali	2.749.618.920	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0004	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	1,468 orang	1.267.058.720	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.02.0005	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah	1,368 orang	843.468.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03	Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	19.226.183.221	
		Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15,50%		
1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	320 orang	326.805.470	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0002	Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	600 orang	759.740.225	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0003	Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan	17,050 orang	1.479.768.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1,246 orang	757.326.125	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	1,370 orang	1.784.556.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	jumlah peserta kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	15 kali	1.190.147.139	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	14,342 orang	7.820.565.826	Dinas Sosial
1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	100.330.045	Kec. Asemrowo
1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	83.644.140	Kec. Benowo
1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	96.138.000	Kec. Bubutan
1.1.2.16.03.0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100 orang	93.745.210	Kec. Bulak
1.1.2.16.03.0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	123.314.550	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.16.03.0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	152.453.105	Kec. Gayungan
1.1.2.16.03.0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	102.237.650	Kec. Genteng
1.1.2.16.03.0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	300 orang	112.853.970	Kec. Gubeng

Kode	Ururan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.16.03.0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	122.144.520	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.16.03.0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	108.313.700	Kec. Jambangan
1.1.2.16.03.0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	110 orang	93.210.550	Kec. Karangpilang
1.1.2.16.03.0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	153.747.505	Kec. Kenjeran
1.1.2.16.03.0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	99.504.346	Kec. Krembangan
1.1.2.16.03.0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 orang	106.782.760	Kec. Lakarsantri
1.1.2.16.03.0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	130.659.695	Kec. Mulyorejo
1.1.2.16.03.0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	240 orang	91.768.280	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.16.03.0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	60 orang	131.792.860	Kec. Pakal
1.1.2.16.03.0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	116.799.380	Kec. Rungkut
1.1.2.16.03.0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	91.999.180	Kec. Sambikerep
1.1.2.16.03.0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	170.555.665	Kec. Sawahan
1.1.2.16.03.0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	200 orang	108.024.485	Kec. Semampir
1.1.2.16.03.0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	163.386.800	Kec. Simokerto
1.1.2.16.03.0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	132.285.520	Kec. Sukolilo
1.1.2.16.03.0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	134.686.400	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.16.03.0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	131.622.600	Kec. Tambaksari
1.1.2.16.03.0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	163.932.165	Kec. Tandes
1.1.2.16.03.0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	107.241.105	Kec. Tegalsari
1.1.2.16.03.0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	111.615.920	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.16.03.0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	132.001.705	Kec. Wiyung
1.1.2.16.03.0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	90.765.183	Kec. Wonocolo
1.1.2.16.03.0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	90 orang	125.953.183	Kec. Wonokromo
1.1.2.16.03.0039	Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	6 Lokasi	1.423.763.360	Dinas Sosial
1.1.2.17	Perpustakaan			28.696.640.060	
1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase koleksi buku	88,63%	28.696.640.060	
		Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	17,85%		
		Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%		
		Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	40,40%		
1.1.2.17.01.0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	57,433 orang	840.556.357	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	171 kali	460.545.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0003	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	600 lembaga	612.645.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0004	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah kunjungan layanan baca di 557 lokasi	3,244,791 kunjungan	20.622.395.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0005	Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat	65,058 buku	5.214.458.054	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	3 kali	343.755.550	Dinas Pendidikan
1.1.2.17.01.0007	Akse Literasi	Jumlah kegiatan akse literasi	1 kali	602.283.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18	Kearsipan			5.766.453.894	
1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	5.766.453.894	
		Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan	41,70%		
1.1.2.18.01.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah kegiatan layanan informasi kearsipan	40 kali	204.776.960	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.18.01.0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD yang dibina sistem kearsipannya	190 lembaga	381.190.265	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0003	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/Unit Kerja yang didata dan ditata sistem kearsipannya	48 lembaga	2.229.903.460	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah item sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	32 item	2.950.583.209	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	Urusan Pilihan				
1.2.2	Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan			5.503.529.476	
1.2.2.01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	13%	4.834.725.264	
1.2.2.01.01.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan	30 unit	1.741.733.980	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disediakan	365 paket	1.479.770.592	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang disediakan	264 Paket	1.613.220.692	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	668.804.212	
1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	380 orang	668.804.212	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02	Pariwisata			23.351.209.290	
1.2.2.02.01	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	27%	6.935.268.219	
1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	2 lokasi	1.137.002.730	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	3 lokasi	1.663.864.839	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0003	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada obyek wisata	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata	600 orang	264.876.050	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0004	Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun	15 unit	2.351.925.927	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0005	Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun	4 unit	1.517.598.673	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	40%	1.068.201.035	
1.2.2.02.02.0001	Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	400 lembaga	647.794.545	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0002	Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum	Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum	250 lembaga	420.406.490	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	45,48%	11.072.764.900	
1.2.2.02.03.0001	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	20 kali	984.267.530	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0002	Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	jumlah even diUPTD Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang diselenggarakan	91 kali	1.720.341.820	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0003	Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	jumlah even di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR yang diselenggarakan	65 kali	1.577.757.860	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0004	Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang diselenggarakan	5 kali	1.668.713.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan	4 kali	1.748.426.150	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0006	Penyediaan Sarana Promosi Wisata	Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan	18 jenis	3.373.258.540	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	6%	3.920.106.860	
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	6%		
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	6%		
		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan	6%		
		Persentase rumah kreatif yang beroperasi	62,50%		
1.2.2.02.04.0001	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	1 lokasi	824.565.260	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2.02.04.0002	Fasilitasi Pengembangan seni budaya di rumah kreatif	Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif	74 kali	765.222.765	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.04.0003	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	1 bangunan	318.990.550	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.02.04.0004	Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	100 Orang	395.026.790	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.2.2.02.04.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	2 bangunan	893.626.595	Dinas Perdagangan
1.2.2.02.04.0006	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	2 bangunan	492.675.260	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02.04.0007	Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran Rumah Kreatif	Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi	412 orang	229.999.640	Dinas Perdagangan
1.2.2.02.05	Program Legalisasi Usaha Kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	25%	163.518.125	
1.2.2.02.05.0001	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi legalitas usaha	25 orang	163.518.125	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.02.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	10%	191.350.150	
1.2.2.02.06.0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	50 orang	191.350.150	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.03	Pertanian			7.782.754.719	
1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	13%	1.711.820.686	
1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan	5 jenis	1.711.820.686	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	3.197.587.680	
1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	1,359 orang	654.492.359	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah jenis dan sarana pembibitan yang disediakan	14 jenis	1.715.476.870	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0003	Peningkatan SDM Pertanian	Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	25 orang	827.618.450	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.04	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	84%	1.201.219.374	
1.2.2.03.04.0002	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan	1,558 kali	1.201.219.374	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	1.672.126.980	
1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	320 orang	486.336.988	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.05.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah sarana budidaya peternakan yang disediakan	4 jenis	1.185.789.992	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.06	Perdagangan			51.627.403.929	
1.2.2.06.01	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	75%	1.086.610.014	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	50%		
1.2.2.06.01.0001	Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang dibina	254 lembaga	587.104.214	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.01.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Implementasi Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik	Jumlah dokumen kajian pendukung implementasi rencana pengembangan hub dan simpul logistik yang disusun	2 dokumen	499.505.800	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Penguamanan Perdagangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	75%	3.352.411.395	
1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	22,484 unit	596.786.875	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0002	Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	100 Item	2.006.961.184	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	1,800 unit	443.070.025	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0004	Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300 orang	305.593.310	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	3,59%	43.779.185.546	
		Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	50%		
		Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	50%		
1.2.2.06.04.0001	Penataan Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi tempat usaha skala mikro yang ditata	5 lokasi	1.604.282.555	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0002	Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	25 kali	874.814.710	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0003	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	8 bangunan	26.309.478.118	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0004	Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	20 dokumen	744.868.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0005	Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pengelolaan usaha	80 orang	585.743.388	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	200 lembaga	547.939.000	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0007	Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	3 lokasi	3.386.993.251	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0009	Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah lokasi yang disediakan untuk stand UKM	2 lokasi	2.041.071.689	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0010	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	15 kali	4.382.395.125	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0011	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	7 Lembaga/Perusahaan	75.368.883	Kec. Asemrowo
1.2.2.06.04.0012	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	8 Lembaga/Perusahaan	89.495.601	Kec. Benowo
1.2.2.06.04.0013	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	12 Lembaga/Perusahaan	81.245.756	Kec. Bubutan
1.2.2.06.04.0014	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	6 Lembaga/Perusahaan	85.758.246	Kec. Bulak
1.2.2.06.04.0015	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	4 Lembaga/Perusahaan	94.871.113	Kec. Dukuh Pakis
1.2.2.06.04.0016	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	6 Lembaga/Perusahaan	66.332.286	Kec. Gayungan
1.2.2.06.04.0017	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	10 Lembaga/Perusahaan	113.785.340	Kec. Genteng
1.2.2.06.04.0018	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	12 Lembaga/Perusahaan	67.555.457	Kec. Gubeng
1.2.2.06.04.0019	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	8 Lembaga/Perusahaan	124.951.390	Kec. Gunung Anyar
1.2.2.06.04.0020	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	7 Lembaga/Perusahaan	57.776.920	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.06.04.0021	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	7 Lembaga/Perusahaan	79.879.875	Kec. Karangpilang
1.2.2.06.04.0022	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	11 Lembaga/Perusahaan	62.978.937	Kec. Kenjeran
1.2.2.06.04.0023	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	10 Lembaga/Perusahaan	68.007.911	Kec. Krembangan
1.2.2.06.04.0024	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	7 Lembaga/Perusahaan	81.952.846	Kec. Lakarsantri
1.2.2.06.04.0025	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	9 Lembaga/Perusahaan	139.811.333	Kec. Mulyorejo
1.2.2.06.04.0026	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	14 Lembaga/Perusahaan	97.872.033	Kec. Pabean Cantian
1.2.2.06.04.0027	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	5 Lembaga/Perusahaan	110.826.397	Kec. Pakal
1.2.2.06.04.0028	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	11 Lembaga/Perusahaan	137.742.589	Kec. Rungkut
1.2.2.06.04.0029	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	6 Lembaga/Perusahaan	117.247.025	Kec. Sambikerep
1.2.2.06.04.0030	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	12 Lembaga/Perusahaan	150.975.276	Kec. Sawahan
1.2.2.06.04.0031	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	11 Lembaga/Perusahaan	100.713.275	Kec. Semampir
1.2.2.06.04.0032	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	9 Lembaga/Perusahaan	128.143.097	Kec. Simokerto
1.2.2.06.04.0033	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	15 Lembaga/Perusahaan	75.567.889	Kec. Sukolilo
1.2.2.06.04.0034	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	11 Lembaga/Perusahaan	60.091.977	Kec. Sukomanunggal
1.2.2.06.04.0035	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	14 Lembaga/Perusahaan	73.125.460	Kec. Tambaksari
1.2.2.06.04.0036	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	13 Lembaga/Perusahaan	107.774.548	Kec. Tandes
1.2.2.06.04.0037	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	14 Lembaga/Perusahaan	105.528.537	Kec. Tegalsari
1.2.2.06.04.0038	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	8 Lembaga/Perusahaan	50.893.154	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.2.2.06.04.0039	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	5 Lembaga/Perusahaan	63.547.133	Kec. Wiyung
1.2.2.06.04.0040	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	8 Lembaga/Perusahaan	65.646.283	Kec. Wonocolo
1.2.2.06.04.0041	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata	13 Lembaga/Perusahaan	79.814.319	Kec. Wonokromo
1.2.2.06.04.0042	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner	Jumlah Lokasi Sentra Wisata Kuliner yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usaha nya	44 Sentra	486.318.825	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	2.349.787.070	
		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian		
1.2.2.06.05.0001	Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Pasar yang dipantau harga dan ketersediaan Bahan Pangan	5 Pasar	194.277.150	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
1.2.2.06.05.0002	Penyusunan Informasi Distribusi Perdagangan Kota	Jumlah dokumen informasi distribusi perdagangan yang disusun	1 dokumen	371.446.200	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.05.0003	Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	164 kali	1.784.063.720	Dinas Perdagangan
1.2.2.06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	62%	1.059.409.904	
1.2.2.06.06.0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	12 kali	1.059.409.904	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1	Fungsi Manajemen				
2.1.2	Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			35.631.728.138	
2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	5.551.660.413	
		Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	97%		
2.1.2.01.01.0001	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang dievaluasi	365 Indikator	502.003.768	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah sistem informasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 sistem	479.804.900	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0004	Pendampingan Penyusunan Substansi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan substansi laporan kinerjanya	72 lembaga	378.712.880	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0005	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 Lembaga	1.097.905.165	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.01.0006	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dipelihara	8 sistem	1.979.332.000	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.01.0007	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja APBD perangkat daerah yang disusun	16 dokumen	1.113.901.700	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	30.080.067.724	
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%		
		Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%		
		Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	70%		
2.1.2.01.02.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	194.547.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.2.01.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	172.349.900	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.01.02.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	181.825.900	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	167.147.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.2.01.02.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	160.727.500	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.2.01.02.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	211.443.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1.2.01.02.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	160.905.900	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0008	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan	2,140 Lembaga	366.327.653	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0011	Perencanaan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Transportasi Berkelanjutan	2 Dokumen	1.457.167.800	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah sistem informasi perencanaan yang dipelihara dan dikembangkan	5 sistem	704.740.500	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0013	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah	72 lembaga	428.388.880	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	6 dokumen	942.148.410	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0015	Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	2 Dokumen	514.573.400	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0016	Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	1 Dokumen	1.499.939.800	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3 dokumen	856.668.580	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0018	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	133.181.900	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0019	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Indikator Ekonomi yang disusun	7 dokumen	1.105.374.900	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen perencanaan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	3 dokumen	998.585.500	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0021	Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur yang disusun	10 dokumen	399.588.116	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	1.398.419.300	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0023	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	12 lembaga	335.233.200	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0024	Koordinasi Penyusunan Pendapatan Daerah dan DAK	Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus	13 lembaga	814.618.560	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0025	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1.457.280.800	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0026	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	46.707.500	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0027	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	126.303.500	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0028	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	103.703.500	Bagian Hukum
2.1.2.01.02.0029	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	83.391.500	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.02.0030	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	140.671.500	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0031	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	72.715.500	Bagian Organisasi
2.1.2.01.02.0032	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	101.643.500	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.02.0033	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	101.643.500	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.02.0034	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	212.543.500	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.02.0035	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	753.755.500	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.01.02.0036	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	310.655.500	Dinas Pemadam Kebakaran
2.1.2.01.02.0037	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	280.723.500	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0038	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	231.619.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2.01.02.0039	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	151.743.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.01.02.0040	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	353.423.500	Dinas Kesehatan
2.1.2.01.02.0041	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	193.227.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.2.01.02.0042	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	167.147.500	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.1.2.01.02.0043	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	286.187.500	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.1.2.01.02.0044	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	245.319.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.2.01.02.0045	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	168.679.500	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.1.2.01.02.0046	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	72.457.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.01.02.0047	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	223.211.500	Dinas Pendidikan
2.1.2.01.02.0048	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	160.955.500	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.02.0049	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	192.363.500	Dinas Perdagangan
2.1.2.01.02.0050	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	3.367.383.500	Dinas Perhubungan
2.1.2.01.02.0051	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	209.910.290	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.1.2.01.02.0052	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	158.163.500	Dinas Sosial
2.1.2.01.02.0053	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	160.667.500	Dinas Tenaga Kerja
2.1.2.01.02.0054	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	167.147.500	Inspektorat
2.1.2.01.02.0055	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD	3 kelurahan	87.381.000	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0056	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	103.879.500	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0057	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD	4 kelurahan	81.876.010	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0058	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	114.299.500	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0059	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 kelurahan	71.189.225	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0060	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	90.531.500	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0061	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	79.191.540	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0062	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	137.871.500	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0063	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	81.604.620	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0064	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	82.283.500	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0065	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	66.548.210	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0066	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	99.871.500	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0067	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	140.344.050	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0068	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	92.091.500	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0069	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	70.869.600	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0070	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	106.647.500	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0071	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	147.386.400	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0072	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	102.107.500	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0073	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	280.608.950	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0074	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	106.211.500	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0075	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	71.165.650	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0076	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	92.475.500	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0077	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	81.708.400	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0078	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	89.059.500	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0079	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	64.441.680	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0080	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	89.095.500	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0081	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	112.231.000	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0082	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	98.427.500	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0083	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	88.087.250	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0084	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	91.243.500	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0085	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	63.241.440	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0086	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	92.699.500	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0087	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	76.865.800	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0088	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	130.283.500	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0089	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	98.133.200	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0090	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	99.343.500	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0091	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	96.396.800	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0092	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	92.203.500	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0093	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	77.439.200	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0094	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	91.639.500	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0095	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	121.378.000	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0096	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	107.523.500	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0097	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	79.016.970	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0098	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	106.351.500	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0099	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	7 Kelurahan	75.970.400	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0100	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	107.023.500	Kec. Sukolilo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0101	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	62.709.160	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0102	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	91.243.500	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0103	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	8 Kelurahan	66.638.650	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0104	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	69.967.500	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0105	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	109.353.310	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0106	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	98.135.500	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0107	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	70.499.320	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0108	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	89.911.500	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0109	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	78.698.800	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0110	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	98.539.500	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0111	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Kelurahan	60.442.400	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0112	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	102.527.500	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0113	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	69.703.000	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0114	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	92.075.500	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0115	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 Kelurahan	92.765.500	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0116	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	79.119.500	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0117	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	44.379.500	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.01.02.0118	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	44.379.500	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.01.02.0119	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	297.339.500	Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.2.01.02.0120	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	320.147.500	Sekretariat DPRD
2.1.2.02	Keuangan			34.331.341.492	
2.1.2.02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	6.013.642.789	
2.1.2.02.01.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	225.245.075	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.02.01.0002	Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	4 kali	113.051.100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0003	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72,000 Berkas	2.264.895.112	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0004	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah berkas Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	73,932 Berkas	121.474.151	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0005	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah dokumen APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas yang disusun	17 dokumen	1.185.504.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0007	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	19 dokumen	1.441.416.550	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0008	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	4 Dokumen	662.055.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	22,70%	28.317.698.703	
2.1.2.02.02.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah wajib Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	37,599 Wajib Pajak	4.895.139.592	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah wajib Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	5,016 Wajib Pajak	8.362.259.717	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak (PBB dan BPHTB) hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	657,436 Wajib Pajak	11.291.506.186	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0004	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan, dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	8,098 Berkas	762.391.523	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0005	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah Berkas Penagihan, dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	4,209 Berkas	617.736.449	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0006	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan, dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	28,094 Berkas	2.388.665.235	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			276.954.264.385	
2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	3.321.888.385	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%		
		Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	30%		
		Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%		
2.1.2.03.01.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi yang disusun	2 dokumen	885.941.800	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	1 dokumen	361.636.900	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0003	Pengembangan Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	678.761.704	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0004	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	274 lembaga	293.605.540	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0006	Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi yang disusun	2 dokumen	414.933.140	Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	687.009.301	Bagian Organisasi
2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	6.094.368.260	
		Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%		
		Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%		
		Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.02.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	12 dokumen	488.147.800	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	65 dokumen	3.186.818.160	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	71 dokumen	1.354.549.100	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	70 dokumen	1.064.853.200	Bagian Hukum
2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	146.551.018.926	
		Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	56,89%		
2.1.2.03.03.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	738.253.600	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	587.482.948	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0003	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah rupabumi yang diajukan pembakuan	115 objek	321.877.800	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0004	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185 lembaga	1.325.795.020	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0005	Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga LPMK, RW, RT yang mendapatkan pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	10,596 lembaga	3.202.257.521	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0006	Kajian Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen kajian Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1.960.972.400	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	91 lembaga	1.019.771.432	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	21 lembaga	739.558.032	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	27 lembaga	810.468.832	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	62 lembaga	834.916.871	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	15 lembaga	796.127.599	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	78 lembaga	701.182.028	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	17 lembaga	682.567.738	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	37 lembaga	794.284.648	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	65 lembaga	890.958.862	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	95 lembaga	977.235.848	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	107 lembaga	1.029.392.248	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	110 lembaga	1.054.967.448	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0019	Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	62 lembaga	910.415.615	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	16 lembaga	733.074.805	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	29 lembaga	790.566.875	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	49 lembaga	841.303.605	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	51 lembaga	806.338.142	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	44 lembaga	800.717.268	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Gunungsari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	47 lembaga	810.594.862	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0026	Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	53 lembaga	810.950.317	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	41 lembaga	811.188.405	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	56 lembaga	849.820.525	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0029	Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	55 lembaga	1.005.738.415	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	45 lembaga	837.887.555	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0031	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	900.778.417	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0032	Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	59 lembaga	812.811.190	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	72 lembaga	824.763.780	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	69 lembaga	901.039.160	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	94 lembaga	848.996.700	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	82 lembaga	928.500.290	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	66 lembaga	936.362.668	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	46 lembaga	813.895.970	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	92 lembaga	1.011.374.468	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	130 lembaga	1.219.842.210	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	60 lembaga	911.066.110	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	68 lembaga	843.544.500	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	48 lembaga	938.247.686	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	38 lembaga	754.364.150	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	57 lembaga	752.335.010	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	37 lembaga	662.613.440	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	67 lembaga	866.557.510	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	32 lembaga	802.810.510	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	31 lembaga	727.591.690	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	30 lembaga	694.162.622	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	88 lembaga	1.131.605.861	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	81 lembaga	1.066.483.648	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	21 lembaga	724.365.738	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	77 lembaga	1.115.964.012	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	161 lembaga	1.013.057.236	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	51 lembaga	766.169.161	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Tanah Kalikeding	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	156 lembaga	1.820.825.655	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	81 lembaga	1.071.445.794	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0059	Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	84 lembaga	937.051.614	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	87 lembaga	999.485.840	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	108 lembaga	948.319.594	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	80 lembaga	786.127.410	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	35 lembaga	698.439.552	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	24 lembaga	714.324.503	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	21 lembaga	650.180.905	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	62 lembaga	806.943.745	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	36 lembaga	940.175.975	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	20 lembaga	675.463.458	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	45 lembaga	867.337.345	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	45 lembaga	896.057.345	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	70 kali	1.009.102.768	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	27 lembaga	737.510.095	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	67 lembaga	848.982.252	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	74 lembaga	890.371.145	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	63 lembaga	1.024.320.620	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	81 lembaga	958.857.020	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Porgram-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	67 lembaga	876.872.620	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	72 lembaga	871.379.220	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	94 lembaga	980.907.620	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	108 lembaga	936.896.040	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	41 lembaga	780.360.790	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	35 lembaga	905.283.980	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	43 lembaga	988.775.910	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	102 lembaga	1.082.203.791	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	60 lembaga	579.962.502	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	111 lembaga	1.102.513.882	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	72 lembaga	952.813.307	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	875.699.345	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	62 lembaga	784.830.800	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	22 lembaga	731.780.130	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	106 lembaga	1.175.715.670	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	37 lembaga	797.530.257	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	85 lembaga	1.011.975.756	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	101 lembaga	1.047.254.203	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	883.560.746	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	104 lembaga	974.105.635	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	142 lembaga	1.203.741.150	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	131 lembaga	1.299.192.446	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	78 lembaga	875.822.300	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	104 lembaga	976.604.718	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	107 lembaga	1.012.773.952	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	109 lembaga	998.073.552	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	131 lembaga	1.112.555.600	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	185 lembaga	1.440.335.552	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	63 lembaga	746.258.870	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	55 lembaga	731.551.810	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	95 lembaga	849.623.030	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	72 lembaga	759.630.330	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	825.150.210	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	30 lembaga	698.639.220	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	55 lembaga	870.700.620	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	58 lembaga	786.753.220	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	864.177.820	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	67 lembaga	853.335.120	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	73 lembaga	856.492.620	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	83 lembaga	941.316.920	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	23 lembaga	863.706.825	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	58 lembaga	885.054.565	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	108 lembaga	1.016.463.510	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	43 lembaga	870.023.010	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	38 lembaga	719.049.208	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	53 lembaga	829.745.958	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	72 lembaga	873.965.013	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Gading	Jumlah LPMK, RW dan RT	107 lembaga	1.063.966.277	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	101 lembaga	1.056.630.573	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	91 lembaga	1.009.981.514	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	124 lembaga	1.233.821.435	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	108 lembaga	1.091.566.805	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	60 lembaga	887.968.673	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	87 lembaga	997.618.368	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	43 lembaga	727.212.368	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	35 lembaga	764.026.468	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	65 lembaga	844.285.928	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	140 lembaga	1.195.801.508	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	42 lembaga	727.698.558	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	46 lembaga	708.823.170	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	86 lembaga	990.034.726	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	82 lembaga	892.186.765	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	54 lembaga	868.476.050	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	60 lembaga	883.766.641	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	85 lembaga	979.919.849	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	40 lembaga	735.631.460	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	51 lembaga	666.575.855	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	52 lembaga	908.812.835	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	42 lembaga	787.330.025	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	80 lembaga	921.458.910	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	48 lembaga	857.055.945	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	33 lembaga	843.581.842	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	48 lembaga	818.616.117	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	71 lembaga	758.131.775	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	74 lembaga	1.164.003.820	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	45 lembaga	818.689.235	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	43 lembaga	846.729.305	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	45 lembaga	774.560.077	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	102 lembaga	972.091.102	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	83 lembaga	916.825.502	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	46 lembaga	786.381.212	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	139 lembaga	1.131.746.822	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	99 lembaga	990.224.626	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0160	Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan	105 lembaga	1.100.333.824	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	2.012.367.909	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%		
2.1.2.03.04.0001	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat	2 dokumen	434.301.685	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0002	Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	446.761.125	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0003	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	2 dokumen	571.080.399	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0004	Evaluasi Program Layanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	269.788.600	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0006	Analisis dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisis dan evaluasi Perekonomian Kota Surabaya yang disusun	4 dokumen	290.436.100	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	96.300.023.523	
		Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%		
2.1.2.03.05.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	24 kegiatan	5.374.260.300	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah pelaksanaan kegiatan informasi dan pengolahan data	138 kali	9.655.072.650	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0003	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	3 kali	11.292.083.500	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	86 kali	58.156.009.425	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 raperda	2.335.080.000	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0006	Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun	10 dokumen	1.336.112.500	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0007	Pengendalian Keamanan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan yang dilaksanakan	365 kali	992.492.648	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0008	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	1,106 kali	3.211.460.375	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	1.974.276.125	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0010	Penerimaan Studi Banding	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Studi Banding	240 lembaga	1.973.176.000	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	9.376.909.840	
2.1.2.03.06.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	9.376.909.840	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	11.848.554.816	
		Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%		
		Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	60%		
2.1.2.03.07.0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	10 kali	963.598.610	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0002	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi	16 lembaga	986.384.611	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi	4 lembaga	1.430.386.600	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0004	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	58 orang	8.095.704.275	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	21 lembaga	224.789.700	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0006	Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	1 dokumen	147.691.020	Bagian Administrasi Kerjasama

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	75%	217.799.500	
		Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	57,14%		
2.1.2.03.08.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	2 lembaga	217.799.500	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	1.231.333.225	
2.1.2.03.09.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	6 BUMD	696.279.025	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.03.09.0002	Penyusunan Legalitas Operasional Usaha BUMD	Jumlah Laporan Legalitas Operasional Usaha yang disusun	6 dokumen	535.054.200	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.04	Pengawasan			6.636.744.736	
2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	6.636.744.736	
		Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%		
		Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah III	100%		
		Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	100%		
		Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	100%		
		Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah III	100%		
2.1.2.04.01.0001	Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5,729 orang	1.176.858.838	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.04.01.0002	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah PD yang dievaluasi LKj-nya	72 Perangkat Daerah	274.171.320	Inspektorat
2.1.2.04.01.0003	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah PD dan Sekolah yang dilakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan	140 lembaga	499.243.660	Inspektorat
2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	18 Perangkat Daerah	449.984.765	Inspektorat
2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	18 Perangkat Daerah	443.260.765	Inspektorat
2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	18 Perangkat Daerah	424.200.765	Inspektorat
2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	18 Perangkat Daerah	478.572.765	Inspektorat
2.1.2.04.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	35 lembaga	678.476.710	Inspektorat
2.1.2.04.01.0009	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	35 lembaga	671.752.710	Inspektorat
2.1.2.04.01.0010	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	35 lembaga	652.692.710	Inspektorat
2.1.2.04.01.0011	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	35 lembaga	707.064.710	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.01.0012	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	180.465.018	Inspektorat
2.2	Unsur Manajemen				
2.2.2	Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			14.354.605.108	
2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	92%	14.354.605.108	
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	49,05%		
		Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	90,33%		
		Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	40%		
2.2.2.01.01.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaianya	800 orang	768.450.050	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Pelaksanaan Assesment Centre	Jumlah aparatur yang mengikuti assesment	400 orang	619.169.425	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0003	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang ditata administrasi kepegawaianya	14,315 orang	845.705.770	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0004	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah	322 orang	1.288.579.320	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0006	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	37 orang	1.206.112.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0007	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	1,394 orang	4.880.187.570	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0008	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Jabatan dan Promosi Jabatan	1 dokumen	1.253.665.600	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0009	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Sistem Data Pegawai yang dikelola	1 aplikasi	208.643.025	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0010	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam negeri	80 orang	667.372.725	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0011	Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang difasilitasi penilaian kinerjanya	6,285 orang	538.657.298	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	1 dokumen	457.132.900	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS	10,000 orang	1.620.929.425	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran			780.024.508.604	
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74%	419.393.850.855	
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.545.704.810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.262.033.016	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	861.045.498	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.688.075.602	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.204.214.717	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.259.596.130	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.841.887.573	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.492.198.882	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	988.824.918	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.596.440.367	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	705.292.960	Bagian Hukum

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.166.894.913	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	406.092.142	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	492.823.520	Bagian Organisasi
2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	708.183.503	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	428.715.291	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.416.442.678	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	52.188.803.973	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	23.312.790.573	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.046.720.543	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.484.904.580	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6.284.252.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	89.389.047.657	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.925.997.612	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.529.442.124	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	34.842.455.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6.069.481.963	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.475.559.451	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5.993.973.411	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7.934.007.146	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.919.173.590	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.450.326.343	Dinas Perdagangan
2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	16.237.600.862	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7.962.633.927	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.971.299.690	Dinas Sosial
2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.122.187.173	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.730.062.225	Inspektorat
2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	413.281.340	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	880.342.974	Kec. Benowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	586.247.495	Kec. Bubutan
2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	687.059.426	Kec. Bulak
2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	449.008.600	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	535.595.680	Kec. Gayungan
2.2.2.02.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	870.272.332	Kec. Genteng
2.2.2.02.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	660.456.553	Kec. Gubeng
2.2.2.02.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	598.941.900	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	751.271.778	Kec. Jambangan
2.2.2.02.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	311.157.462	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	685.631.127	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	784.799.949	Kec. Krembangan
2.2.2.02.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	474.920.370	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	541.455.983	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	642.197.510	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	753.044.538	Kec. Pakal
2.2.2.02.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	694.250.306	Kec. Rungkut
2.2.2.02.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	377.697.602	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	651.197.955	Kec. Sawahan
2.2.2.02.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	669.456.930	Kec. Semampir
2.2.2.02.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	570.514.880	Kec. Simokerto
2.2.2.02.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	578.221.319	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	410.796.498	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	571.986.110	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	868.283.650	Kec. Tandes
2.2.2.02.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	690.687.954	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	745.462.809	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	472.656.501	Kec. Wiyung
2.2.2.02.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	581.863.076	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	830.998.580	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	26.232.204.658	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	48.674.793.555	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.384.035.961	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.827.870.438	Sekretariat DPRD
2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80,77%	360.630.657.749	
		Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	79%		
		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		
		Persentase pemanfaatan aset	92%		
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		
		Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	40%		
2.2.2.02.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	182 unit	1.072.338.770	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.02.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	81 Unit	757.694.530	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	72 unit	454.207.564	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	145 unit	288.517.739	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.02.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	256 unit	516.376.458	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.02.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	278 unit	752.801.874	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.02.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	104 unit	1.886.090.523	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	166 Unit	666.056.942	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	100 unit	2.111.456.511	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.02.02.0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	38 Unit	337.369.088	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	76 unit	215.881.000	Bagian Hukum
2.2.2.02.02.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	52 unit	173.714.447	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	11 unit	140.245.490	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	44 unit	169.346.010	Bagian Organisasi
2.2.2.02.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	37 unit	205.678.153	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	16 unit	211.854.102	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.02.02.0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	6 dokumen	1.979.396.400	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	800 Dokumen	5.736.322.837	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	550 unit	6.933.550.975	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	299 unit	518.397.191	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	9,220 stel	4.402.741.350	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0022	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	2,022 unit	21.738.986.499	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0023	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	2.091.419.460	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	5.246.090.273	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.02.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	72 unit	1.497.879.780	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	248 unit	2.878.807.644	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	78 unit	922.543.566	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	505 unit	1.221.601.041	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	419 Unit	12.480.494.453	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	148 Unit	1.654.820.098	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	133 unit	1.220.601.190	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	107 Unit	4.631.882.287	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.02.02.0033	Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/ direhabilitasi dan diawasi	34 bangunan	170.739.518.167	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0034	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multivears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi	2 bangunan	43.266.762.551	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	86 unit	1.938.700.305	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0036	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	60 dokumen	2.171.161.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	56 Unit	202.296.920	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	582 Unit	3.946.151.146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.02.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	382 unit	4.176.106.306	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	30 Unit	621.080.472	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	1,057 unit	1.389.399.913	Dinas Perdagangan
2.2.2.02.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	60 unit	9.667.048.250	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.02.0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	220 unit	1.786.736.630	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.02.0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	199 Unit	601.436.881	Dinas Sosial
2.2.2.02.02.0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	795 Unit	537.002.832	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.02.0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	82 Unit	775.373.970	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.02.0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	34 unit	191.512.278	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.02.0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	21 Unit	184.965.392	Kec. Benowo
2.2.2.02.02.0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	22 Unit	276.938.019	Kec. Bubutan
2.2.2.02.02.0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	15 unit	209.247.329	Kec. Bulak
2.2.2.02.02.0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	15 Unit	159.429.455	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.02.0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	11 unit	141.579.352	Kec. Gayungan
2.2.2.02.02.0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	15 unit	259.852.257	Kec. Genteng
2.2.2.02.02.0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	23 unit	199.510.085	Kec. Gubeng
2.2.2.02.02.0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	31 unit	139.336.757	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.02.0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	12 Unit	186.904.414	Kec. Jambangan
2.2.2.02.02.0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	8 unit	175.325.458	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.02.0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	26 unit	161.862.245	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	15 Unit	181.233.265	Kec. Krembangan
2.2.2.02.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	12 unit	190.455.216	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	14 unit	110.966.977	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	26 unit	218.073.889	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	37 Unit	219.534.584	Kec. Pakal
2.2.2.02.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	10 unit	192.689.753	Kec. Rungkut
2.2.2.02.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	9 unit	189.619.936	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	6 Unit	139.114.996	Kec. Sawahan
2.2.2.02.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	32 Unit	197.112.321	Kec. Semampir
2.2.2.02.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	26 Unit	332.105.224	Kec. Simokerto
2.2.2.02.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	18 Unit	202.071.776	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	9 unit	185.408.368	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	11 Unit	207.099.374	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	27 Unit	241.610.767	Kec. Tandes
2.2.2.02.02.0073	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	17 unit	179.337.504	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.02.0074	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	12 Unit	206.383.368	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.02.0075	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	15 Unit	145.233.714	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.02.0076	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	29 Unit	201.456.894	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.02.0077	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	12 unit	173.083.072	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.02.0078	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	355 unit	7.309.943.521	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.02.0079	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	481 unit	10.265.891.105	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.02.0080	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	311 Unit	3.140.404.980	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.02.0081	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	231 unit	6.981.424.318	Sekretariat DPRD
TOTAL				6.623.541.052.648	

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 serta mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan RPJMN Tahun 2015 – 2019. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

RKPD Kota Surabaya tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2018 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2018 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;

2. RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
4. Dalam hal RKPD Tahun 2018 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018.

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I.
 NIP. 19691017 199303 2 006